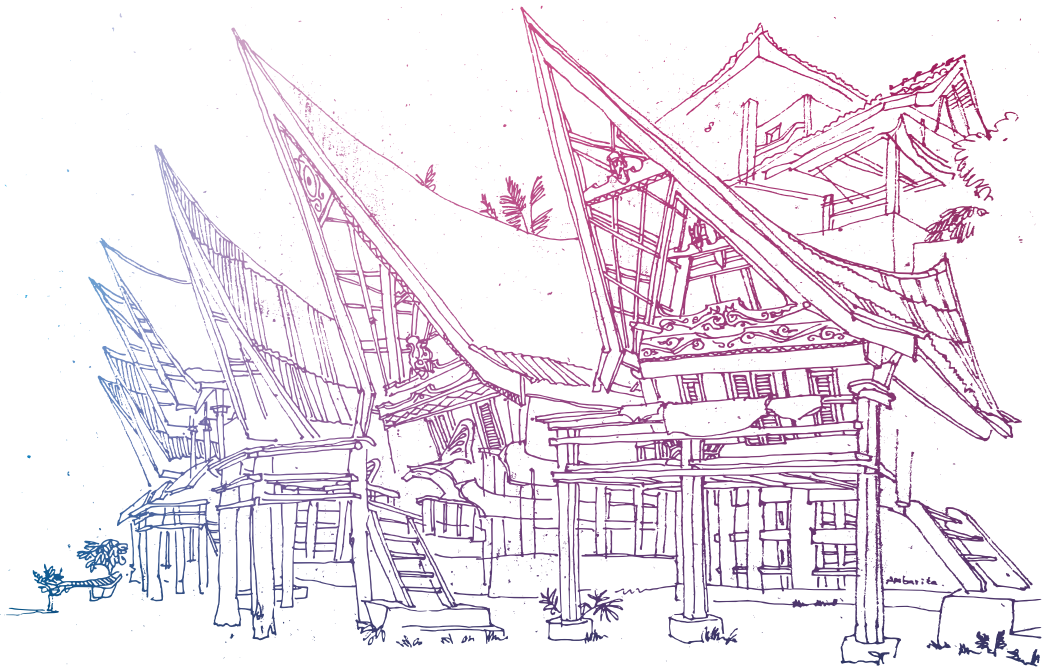


# LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Utara





# Laporan Perekonomian

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

Mei 2021



# Visi, Misi, & Nilai-nilai Strategis

## Visi Bank Indonesia

---

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

## Misi Bank Indonesia

---

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional proaktif.

## Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

---

1. Kejujuran dan integritas (*trust and integrity*);
2. Profesionalisme (*professionalism*);
3. Keunggulan (*excellence*);
4. Mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan
5. Koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).



# Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

## Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

---

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

## Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

---

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.





## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara Periode Mei 2021. Laporan ini memuat evaluasi perkembangan ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2021 dan prospek keseluruhan tahun 2021. Publikasi laporan ini sekaligus menjadi bagian dari misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.

*Pertama*, kami ingin menyampaikan kondisi perekonomian Sumatera Utara periode triwulan I-2021. Pada periode berjalan, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tercatat -1,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -2,94% (yoy). Dari sisi permintaan perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor yang meningkat. Perbaikan di negara maupun provinsi mitra dagang didukung dengan peningkatan harga komoditas menjadi faktor utama akselerasi perekonomian Sumatera Utara. Dari sisi Lapangan Usaha, kinerja seluruh sektor utama pada triwulan laporan terakselerasi. Ke depan, perekonomian Sumatera Utara memiliki banyak ruang untuk tumbuh berkenaan dengan realisasi yang tercatat masih lebih rendah dari nasional yang sebesar -0,74% (yoy) dan Sumatera yang sebesar -0,86% (yoy). Kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat seiring dengan program vaksinasi yang terus berjalan menjadi kunci utama pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Sementara itu, inflasi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 menurun, terutama didorong oleh meredanya tekanan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini masih menjadi sumber utama tekanan inflasi meski magnitudenya menurun cukup signifikan seiring dengan normalisasi harga aneka cabai yang sempat meningkat pada akhir tahun. Selain itu deflasi aneka bawang karena melimpahnya pasokan bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah, dan impor bawang putih dari Tiongkok juga turut mendorong penurunan laju inflasi pada triwulan laporan. Adapun tekanan inflasi bersumber dari minyak goreng, akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional. Sejalan dengan itu, ikan asin teri dan tomat juga turut menyumbang inflasi akibat penurunan pasokan, imbas gangguan cuaca yang mengganggu aktivitas melaut nelayan dan erupsi Gunung Sinabung. Dampaknya, inflasi pada triwulan I-2021 tercatat sebesar 1,43% (yoy), turun cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,96% (yoy). Dengan realisasi ini, laju inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan berada di atas inflasi Nasional sebesar 1,37% (yoy) dan di bawah inflasi Sumatera sebesar 1,60% (yoy).

*Kedua*, beberapa pandangan kami sampaikan terkait prospek PDRB dan inflasi secara keseluruhan tahun 2021. Optimisme pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun 2021. Percepatan ekonomi bersumber dari permintaan eksternal dan domestik yang diperkirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dari 2020. Konsumsi rumah tangga mulai pulih didorong oleh menguatnya pendapatan seiring dengan masih berlanjutnya insentif program Pemulihan Ekonomi Nasional dan implementasi program vaksinasi. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung pada tahun 2021, inflasi Sumatera Utara tahun 2021 juga diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2020 namun masih dalam rentang sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Fase pemulihan yang berlangsung akan meningkatkan permintaan domestik sekaligus memperbaiki daya beli masyarakat. Di sisi lain, risiko tekanan inflasi juga dapat disebabkan oleh tertundanya pengaruh ekspansi moneter yang dilakukan pada tahun 2020.

Akhirnya, selain sebagai referensi yang bermanfaat, kami mengharapkan buku ini dapat memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Laporan Perekonomian Provinsi masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, masukan serta dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari laporan ini.

Medan, Mei 2021  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara

ttd

**Soekowardojo**  
Direktur Eksekutif

## Daftar Isi



Visi Misi Bank Indonesia	II
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	XI
Tabel Indikator	XII
Ringkasan Umum	XVI
Daftar Istilah	101
Tim Penyusun	103

## Bab II Keuangan Pemerintah 20

2.1 Gambaran Umum APBD 2021	21
2.2 Realisasi APBD Triwulan I- 2021 Melambat	22
2.3 Pagu Belanja APBN untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Lebih Rendah	25
2.4 Realisasi Belanja APBN pada Triwulan I-2021 Lebih Optimal	25

## Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah 2

1.1 Optimisme Pemulihan Ekonomi dalam Mengawali Tahun 2021	3
1.2 Ekspor Menjadi Komponen Utama Pendorong Perekonomian	4
1.3 Akselerasi Lapangan Usaha Utama Menopang Laju Pertumbuhan Ekonomi	9
<b>Boks 1</b> Perbaikan Indikator Survei Liasan Triwulan I-2021 Sejalan Dengan Akselerasi Perekonomian Sumut	15

## Bab III Perkembangan Inflasi Daerah 28

3.1 Tekanan Inflasi Triwulan I-2021 Menurun	29
3.2 Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau Penyumbang Inflasi Utama	30
3.3 Secara Spasial, Tekanan Inflasi Menurun di Seluruh Kota IHK	34
3.4 Tracking Inflasi	38
3.5 Program Pengendalian Inflasi Daerah	41



**Bab IV**

**Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM**

44

4.1 Kinerja Perbankan Triwulan I-2021 Kembali Mencatat Kontraksi	45
4.2 Intermediasi Perbankan Mengalami Kontraksi, Namun Berada Pada Rentang Optimal	46
4.3 Kinerja Korporasi Meningkat, Sementara Kredit Rumah Tangga Belum Menunjukkan Perbaikan	54
4.4 Kredit Rumah Tangga	55
<b>Boks 2</b> Kebijakan Pelonggaran LTV/FV dan DP 0%, Upaya Bank Indonesia Mendorong Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga	59

**Bab VI**

**Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan**

76

6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Sumatera Utara Melemah	77
6.2 Kesejahteraan	81

**Bab V**

**Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

64

5.1 Sistem Pembayaran Non Tunai Berjalan Baik	65
5.2. Elektronifikasi Berjalan Lancar	66
5.3 Sistem Pembayaran Tunai Sesuai Pola Historis	67
5.4 Kegiatan Penukaran Valuta Asing dan Penyelenggaraan Transfer Dana Terjaga	68
<b>Boks 3</b> Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Mendorong Implementasi & Akseptasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Sumatera Utara	71

**Bab VII**

**Prospek Perekonomian Daerah**

88

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2021	89
7.2 Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2021	91
7.3 Rekomendasi	92
<b>Boks 4</b> Genjot Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Kawasan Toba Caldera Resort	95

# Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional TW-I 2021	3	Grafik 1.23	Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional	13
Grafik 1.2	Net Ekspor Sumatera Utara	3	Grafik 1.24	Google Mobility Index	13
Grafik 1.3	Kredit Rumah Tangga	4	Grafik 2.1	Perkembangan Pagu APBD Provinsi Sumatera Utara	21
Grafik 1.4	Simpanan Pemerintah Daerah	5	Grafik 2.2	Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara	21
Grafik 1.5	PMA PMDN	5	Grafik 2.3	Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	21
Grafik 1.6	Nominal dan Volume Ekspor	6	Grafik 2.4	Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara	22
Grafik 1.7	<i>Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing</i>	6	Grafik 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I-2020	22
Grafik 1.8	Pangsa Komoditas Ekspor	6	Grafik 2.6	Pemda dengan Realisasi PAD Terbesar	23
Grafik 1.9	Ekspor CPO	7	Grafik 2.7	Realisasi Belanja APBD Triwulan I-2021	23
Grafik 1.10	Ekspor berdasarkan Negara Tujuan	7	Grafik 2.8	Pemda dengan Realisasi Terbesar Belanja APBD Triwulan I-2021	24
Grafik 1.11	Nominal dan Volume Impor	8	Grafik 2.9	Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara	26
Grafik 1.12	Penumpang Angkutan Udara Internasional yang Berangkat	8	Grafik 2.10	Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja	26
Grafik 1.13	Nominal Impor Berdasarkan Kelompok Barang	8	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional	29
Grafik 1.14	Nominal Impor Berdasarkan Negara Asal	8	Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya	29
Grafik 1.15	Nilai Tukar Petani	9	Grafik 3.3	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok	31
Grafik 1.16	Kredit Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit	10	Grafik 3.4	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	31
Grafik 1.17	Nilai Ekspor ke Tiongkok	10	Grafik 3.5	Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	32
Grafik 1.18	Kredit Industri Pengolahan	11	Grafik 3.6	Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air & Gas	32
Grafik 1.19	Kredit Konstruksi	11	Grafik 3.7	Inflasi Kelompok Transportasi	33
Grafik 1.20	SKDU Konstruksi	11	Grafik 3.8	Disagregasi Inflasi Kota Medan	35
Grafik 1.21	Survei Penjualan Eceran	12	Grafik 3.9	Disagregasi Inflasi Kota Sibolga	36
Grafik 1.22	Volume Transaksi <i>E-commerce</i> berdasarkan Provinsi Penjual	13	Grafik 3.10	Disagregasi Inflasi Kota Pematangsiantar	36

# Daftar Grafik

<b>Grafik 3.11</b>	Disagregasi Inflasi Kota Padangsidempuan	37	<b>Grafik 4.20</b>	Likert Scale Permintaan Ekspor dan Domestik	51
<b>Grafik 3.12</b>	Disagregasi Inflasi Kota Gunungsitoli	38	<b>Grafik 4.21</b>	Pertumbuhan Jumlah Rekening Kredit	51
<b>Grafik 3.13</b>	Historis Inflasi Sumatera Utara	40	<b>Grafik 4.22</b>	Suku Bunga Kredit	52
<b>Grafik 4.1</b>	Perkembangan Kinerja Perbankan	45	<b>Grafik 4.23</b>	Pertumbuhan Jumlah Rekening Kredit	52
<b>Grafik 4.2</b>	Rasio BOPO Perbankan	45	<b>Grafik 4.24</b>	Perkembangan Kredit Konvensional dan Syariah	52
<b>Grafik 4.3</b>	Perkembangan Intermediasi Perbankan	45	<b>Grafik 4.25</b>	Perkembangan NPL Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	52
<b>Grafik 4.4</b>	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga	46	<b>Grafik 4.26</b>	Penyaluran Kredit Berdasarkan Kab/ Kota	53
<b>Grafik 4.5</b>	Pertumbuhan DPK Jenis Deposito	46	<b>Grafik 4.27</b>	Pertumbuhan Kredit UMKM	53
<b>Grafik 4.6</b>	Pangsa Deposito Berdasarkan Nilai	46	<b>Grafik 4.28</b>	Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit	53
<b>Grafik 4.7</b>	Pertumbuhan DPK Jenis Tabungan	47	<b>Grafik 4.29</b>	Penyaluran kredit UMKM Berdasar Segment UMKM	53
<b>Grafik 4.8</b>	Pangsa Tabungan Berdasarkan Nilai	47	<b>Grafik 4.30</b>	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	54
<b>Grafik 4.9</b>	Pertumbuhan Giro Penduduk	47	<b>Grafik 4.31</b>	Perkembangan NPL Kredit UMKM	54
<b>Grafik 4.10</b>	Pangsa Kepemilikan Giro	47	<b>Grafik 4.32</b>	Pertumbuhan Kredit Korporasi	55
<b>Grafik 4.11</b>	DPK Konvensional dan Syariah	48	<b>Grafik 4.33</b>	Likert Scale Harga Jual	55
<b>Grafik 4.12</b>	Pertumbuhan DPK Berdasarkan Jenis Nasabah	48	<b>Grafik 4.34</b>	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan	55
<b>Grafik 4.13</b>	Likert Scale Investasi	48	<b>Grafik 4.35</b>	Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan sektor Ekonomi	55
<b>Grafik 4.14</b>	Perkembangan Kredit	49	<b>Grafik 4.36</b>	Indeks Ekspektasi Penghasilan	56
<b>Grafik 4.15</b>	Perkembangan Kredit Berdasarkan Penggunaan	49	<b>Grafik 4.37</b>	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	56
<b>Grafik 4.16</b>	Perkembangan KMK Berdasarkan Sektoral	49	<b>Grafik 4.38</b>	Perkembangan Kredit Multiguna	57
<b>Grafik 4.17</b>	Perkembangan KI Berdasarkan Sektoral	50	<b>Grafik 5.1</b>	Perkembangan RTGS	65
<b>Grafik 4.18</b>	Pertumbuhan Kredit Konsumsi	50	<b>Grafik 5.2</b>	Perkembangan SKNBI	65
<b>Grafik 4.19</b>	Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	50	<b>Grafik 5.3</b>	Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet, Kartu Kredit, dan UE	65



# Daftar Grafik

Grafik 5.4	Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debet	66	Grafik 6.8	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan	80
Grafik 5.5	Alokasi Penggunaan Kartu Kredit	66	Grafik 6.9	Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama	80
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi E-Commerce	66	Grafik 6.10	Perkembangan Nilai Tukar Petani	81
Grafik 5.7	Perkembangan BPNT	67	Grafik 6.11	Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan	81
Grafik 5.8	Perkembangan PKH	67	Grafik 6.12	IT dan IB Sumatera Utara	81
Grafik 5.9	Perkembangan <i>Inflow - Outflow</i>	68	Grafik 6.13	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara	82
Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	68	Grafik 6.14	Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan dan Perkotaan	82
Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi PTD BB	69	Grafik 6.15	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	82
Grafik 6.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka	77	Grafik 6.16	Perkembangan Koefisien Gini	83
Grafik 6.2	TPT Menurut Jenjang Pendidikan	78	Grafik 6.17	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan	84
Grafik 6.3	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	78	Grafik 6.18	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Pedesaan	84
Grafik 6.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK	78	Grafik 6.19	Perkembangan IPM Sumut dan Nasional	85
Grafik 6.5	Pangsa Pekerja Sektoral	78	Grafik 6.20	IPM 33 Kabupaten/Kota Sumut	85
Grafik 6.6	Perkembangan NTP	79	Grafik 7.1	Proyeksi PDRB	89
Grafik 6.7	Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	79	Grafik 7.2	Proyeksi Inflasi	91



Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara	24
Tabel 2.2	Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara	25
Tabel 2.3	Pagu dan Realisasi APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)	25
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan I-2021	30
Tabel 3.2	Pertumbuhan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional	33
Tabel 3.3	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran	34
Tabel 3.4	Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel	39
Tabel 4.1	Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai	49
Tabel 4.2	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor	57
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perumahan	57
Tabel 6.1	Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)	80
Tabel 6.2	Harga Gabah	81
Tabel 6.3	Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan	83
Tabel 6.4	IPM Sumut Menurut Komponen	84
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	90



# Tabel Indikator

	2019					2020					2021
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB (% yoy)</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,25%</b>	<b>-2,77%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-1,85%</b>
<b>PENGELUARAN</b>											
Konsumsi Rumah Tangga	4,40%	4,41%	4,92%	4,07%	4,45%	4,47%	-5,57%	-5,76%	-4,77%	-2,98%	-4,86%
Konsumsi LNPRT	23,85%	11,84%	3,10%	2,21%	9,95%	-8,90%	-5,44%	-0,04%	-1,10%	-4,02%	-5,84%
Konsumsi Pemerintah	8,18%	4,45%	3,04%	-11,04%	0,61%	-7,40%	0,28%	-0,50%	3,92%	-0,87%	0,77%
PMTB	8,60%	7,19%	8,84%	8,35%	8,25%	6,93%	-0,53%	-5,86%	-4,56%	-1,17%	-3,67%
Ekspor	5,54%	-3,23%	-9,11%	-0,55%	-2,17%	-6,15%	-10,87%	-8,58%	-15,12%	-10,36%	8,65%
Impor	7,50%	-6,06%	-10,83%	-3,01%	-3,68%	-8,07%	-13,54%	-16,44%	-20,42%	-14,97%	5,42%
<b>PERMINTAAN</b>											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07%	6,03%	4,07%	4,44%	5,13%	6,14%	1,40%	0,61%	-0,18%	1,95%	0,20%
Pertambangan dan Penggalian	5,47%	3,88%	4,34%	4,48%	4,53%	3,48%	-3,58%	-4,73%	-4,17%	-2,31%	-3,23%
Industri Pengolahan	2,28%	0,68%	1,20%	0,80%	1,23%	0,30%	-0,79%	-1,47%	-1,34%	-0,84%	1,01%
Pengadaan Listrik, Gas	1,85%	4,69%	3,58%	9,55%	4,92%	9,05%	1,14%	4,40%	-1,48%	3,16%	-0,24%
Pengadaan Air	3,48%	6,54%	6,38%	5,34%	5,44%	5,63%	2,28%	3,64%	3,64%	3,79%	3,34%
Konstruksi	7,42%	7,52%	7,19%	7,07%	7,29%	3,05%	-6,14%	-5,16%	-5,10%	-3,42%	-3,07%
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59%	6,40%	8,00%	7,66%	6,93%	4,62%	-4,46%	-3,35%	-4,25%	-1,94%	-2,13%
Transportasi dan Pergudangan	5,21%	5,18%	6,31%	6,47%	5,80%	4,76%	-20,32%	-17,84%	-16,93%	-12,77%	-18,30%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72%	9,01%	9,15%	8,65%	8,88%	8,00%	-14,77%	-14,54%	-14,83%	-9,26%	-15,11%
Informasi dan Komunikasi	8,96%	9,82%	9,85%	9,87%	9,63%	9,97%	5,42%	4,90%	4,66%	6,17%	4,64%
Jasa Keuangan	0,30%	1,59%	0,33%	5,48%	1,92%	5,14%	-2,32%	0,34%	2,08%	1,29%	1,53%
Jasa Perantara Keuangan	-1,76%	0,07%	-1,72%	6,10%	0,63%	5,97%	-0,76%	3,27%	5,62%	3,53%	5,87%
Real Estate	4,79%	4,85%	4,85%	4,88%	4,84%	4,85%	0,51%	0,52%	0,52%	1,57%	0,52%
Jasa Perusahaan	5,26%	5,56%	5,63%	6,76%	5,81%	5,17%	-7,69%	-7,96%	-7,84%	-4,71%	-8,81%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,36%	8,37%	7,97%	7,76%	8,11%	4,77%	0,64%	-0,01%	-2,13%	0,73%	-1,10%
Jasa Pendidikan	3,93%	5,28%	5,39%	4,81%	4,86%	4,49%	0,58%	0,58%	0,56%	1,52%	0,36%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40%	5,42%	4,40%	3,36%	4,63%	2,52%	-3,95%	-4,16%	-4,16%	-2,46%	-8,34%
Jasa lainnya	5,71%	6,14%	6,59%	6,54%	6,25%	5,16%	-6,77%	-6,49%	-6,49%	-3,74%	-6,49%

Sumber: BPS, diolah

	2019					Total	2019					Total	2021
	I	II	III	IV	I		II	III	IV	I			
<b>INFLASI</b>													
<b>INDEKS HARGA KONSUMEN</b>													
Provinsi Sumatera Utara	186,08	193,69	192,20	190,05	190,05	103,02	103,09	102,88	104,48	104,48	104,50		
Medan	185,30	193,39	192,00	189,35	189,35	102,89	102,94	102,71	104,15	104,15	104,18		
Pematangsiantar	191,79	196,82	194,28	194,78	194,78	103,33	103,17	102,89	105,55	105,55	106,03		
Padangsidempuan	181,51	185,92	184,62	184,94	184,94	104,56	105,38	105,06	107,08	107,08	106,58		
Sibolga	196,45	204,56	203,18	202,49	202,49	103,76	103,38	103,35	106,17	106,17	105,92		
Gunung Sitoli	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	103,42	103,30	104,96	107,85	107,85	106,75		
Sumatera	101,38	103,05	102,91	103,10	103,10	103,66	103,77	103,59	105,06	105,06	105,33		
Nasional	135,87	138,16	138,37	139,07	139,07	105,98	106,55	106,99	107,60	107,60	108,44		
<b>LAJU INFLASI TAHUNAN (%YOY)</b>													
Provinsi Sumatera Utara	1,05	5,86	4,47	2,33	2,33	1,81	-0,09	0,31	1,96	1,96	1,43		
Medan	0,87	6,19	4,81	2,43	2,43	1,66	-0,15	-0,18	1,76	1,76	1,25		
Pematangsiantar	2,00	3,99	2,47	1,54	1,54	2,43	0,01	0,65	2,78	2,78	2,61		
Padangsidempuan	2,46	4,33	3,01	2,15	2,15	2,92	1,38	1,94	3,27	3,27	1,93		
Sibolga	0,78	5,39	4,02	2,58	2,58	2,52	-0,45	0,03	2,42	2,42	2,08		
Gunung Sitoli	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,31	-1,74	1,91	5,32	5,32	3,22		
Sumatera	2,04	2,94	2,86	1,86	1,86	2,25	0,69	0,66	1,90	1,90	1,60		
Nasional	2,48	3,28	3,39	2,72	2,72	2,96	1,96	1,42	1,68	1,68	1,37		
<b>LAJU INFLASI KUMULATIF (%YTD)</b>													
Provinsi Sumatera Utara	0,19	4,29	3,49	2,33	2,33	0,54	0,61	0,40	1,96	1,96	0,02		
Medan	0,24	4,61	3,86	2,43	2,43	0,53	0,58	0,35	1,76	1,76	0,03		
Pematangsiantar	-0,02	2,60	1,28	1,54	1,54	0,61	0,46	0,19	2,78	2,78	0,45		
Padangsidempuan	0,26	2,69	1,98	2,15	2,15	0,84	1,63	1,32	3,27	3,27	-0,47		
Sibolga	-0,48	3,62	2,93	2,58	2,58	0,10	-0,27	-0,30	2,42	2,42	-0,24		
Gunung Sitoli	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,00	0,88	2,50	5,32	5,32	-1,02		
Sumatera	0,16	1,81	1,67	1,86	1,86	0,55	0,65	0,48	1,90	1,90	0,25		
Nasional	0,35	2,05	2,20	2,72	2,72	0,76	1,09	0,89	1,68	1,68	0,44		
<b>LAJU INFLASI BULANAN (%MTM)</b>													
Provinsi Sumatera Utara	0,31	1,63	-1,81	-0,19	-0,19	-0,16	-0,07	-0,01	0,75	0,75	-0,08		
Medan	0,32	1,68	-1,92	-0,28	-0,28	-0,19	-0,09	-0,05	0,65	0,65	-0,03		
Pematangsiantar	0,27	0,91	-1,18	0,34	0,34	-0,12	-0,13	0,29	1,47	1,47	-0,23		
Padangsidempuan	0,25	1,79	-0,95	-0,13	-0,13	0,53	-0,02	0,29	1,00	1,00	-0,57		
Sibolga	0,24	2,25	-1,94	0,51	0,51	-0,79	0,13	0,29	1,32	1,32	-0,29		
Gunung Sitoli	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,43	0,22	1,00	1,87	1,87	-0,54		
Sumatera	0,05	0,57	-0,42	0,32	0,32	-0,15	0,05	-0,05	0,72	0,72	0,02		
Nasional	0,11	0,55	-0,27	0,34	0,34	0,10	0,18	-0,05	0,45	0,45	0,08		

# Tabel Indikator

	2019				Total	2019				Total	2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
<b>Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)</b>	<b>226,35</b>	<b>230,87</b>	<b>234,73</b>	<b>235,35</b>	<b>235,35</b>	<b>244,76</b>	<b>248,91</b>	<b>262,17</b>	<b>261,86</b>	<b>261,86</b>	<b>267,95</b>
Giro	33,52	35,52	35,27	32,27	32,27	36,81	35,86	40,67	34,58	34,58	41,95
Tabungan	88,71	92,62	93,74	99,05	99,05	93,18	103,92	108,97	113,66	113,66	112,21
Deposito	104,12	102,73	105,72	104,03	104,03	109,11	109,14	112,53	113,62	113,62	113,79
<b>Kredit (Rp Triliun)</b>	<b>215,64</b>	<b>218,10</b>	<b>222,31</b>	<b>226,02</b>	<b>226,02</b>	<b>231,68</b>	<b>226,12</b>	<b>231,37</b>	<b>223,73</b>	<b>223,73</b>	<b>230,92</b>
Modal Kerja	105,68	106,13	107,43	105,91	105,91	109,24	101,64	105,21	102,05	102,05	109,39
Investasi	54,00	54,58	56,65	59,60	59,60	61,25	62,54	63,74	59,17	59,17	58,48
Konsumsi	55,96	57,38	58,24	60,51	60,51	61,19	61,94	62,41	62,50	62,50	63,06
<b>Loan to Deposit Ratio (%)</b>	<b>95,27%</b>	<b>94,47%</b>	<b>94,71%</b>	<b>96,04%</b>	<b>96,04%</b>	<b>94,66%</b>	<b>90,84%</b>	<b>88,25%</b>	<b>85,44%</b>	<b>85,44%</b>	<b>86,18%</b>
<b>NPL Kredit</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,90%</b>	<b>3,29%</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,04%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,61%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,50%</b>

Sumber: Data Bank Umum Sumatera Utara Menurut Lokasi Proyek

	2019				Total	2019				Total	2021
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>											
<b>SP TUNAI</b>											
Inflow (Rp juta)	12.570.447	14.699.299	11.062.215	8.780.360	47.112.321	12.859.535	8.759.841	7.819.315	7.170.622	36.609.313	14.640.646
Outflow (Rp juta)	(6.639.749)	(14.284.982)	(9.278.520)	(13.976.995)	(44.180.246)	(6.851.062)	(8.903.666)	(8.537.725)	(15.168.861)	(39.461.314)	(4.775.401)
Netflow (Rp juta)	5.930.698	414.317	1.783.695	(5.196.635)	2.932.075	6.008.473	(143.826)	(718.409)	(7.998.239)	(2.852.001)	9.865.245
<b>SP NON TUNAI</b>											
RTGS- Volume Transaksi	23.977	16.351	36.839	62.974	140.141	54.506	58.163	70.601	79.406	262.676	69.323
RTGS- Nominal Transaksi (Rp miliar)	99.527	77.256	157.021	260.844	594.649	198.353	216.489	212.995	243.379	871.215	233.777
SKNBI- Volume Transaksi	720.812	717.166	785.591	802.301	3.025.870	738.999	656.732	695.776	751.329	2.842.836	692.628
SKNBI- Nominal Transaksi (Rp miliar)	34.074	33.799	38.282	42.291	148.445	40.914	35.669	37.087	39.832	153.503	38.565

Sumber: Bank Indonesia, diolah



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL

**Mengawali tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Sumatera Utara mulai terlihat.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tercatat -1,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -2,94% (yoy). Dari sisi permintaan perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor yang meningkat. Perbaikan di negara maupun provinsi mitra dagang didukung dengan peningkatan harga komoditas menjadi faktor utama akselerasi perekonomian Sumatera Utara. Dari sisi Lapangan Usaha, kinerja seluruh sektor utama pada triwulan laporan terakselerasi. Ke depan perekonomian Sumatera Utara memiliki banyak ruang untuk bertumbuh berkenaan dengan realisasi yang tercatat masih lebih rendah dari nasional yang sebesar -0,74% (yoy) dan Sumatera yang sebesar -0,86% (yoy). Kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat seiring dengan program vaksinasi yang terus berjalan menjadi kunci utama pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

## ASESMEN KEUANGAN DAERAH

**Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2021 meningkat.** Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada APBD 2021 naik masing-masing sebesar 6,3% dan 6% dibandingkan dengan APBD 2020. Realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2021 belum optimal pada seluruh pos pendapatan sejalan dengan kebijakan insentif perpajakan yang berdampak pada menurunnya pendapatan wajib pajak sebagai dampak pandemi COVID-19 dan tertahannya penyaluran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara, realisasi belanja masih di bawah target didorong oleh penurunan pada jenis belanja operasional dan belanja modal. Di sisi lain, pagu belanja Pemerintah Pusat ke Sumatera Utara turun 5,6% dari tahun 2020, dengan optimalisasi realisasi belanja yang naik 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Optimalisasi realisasi belanja APBN di daerah didorong oleh belanja modal untuk percepatan pembangunan dan belanja bantuan sosial terutama penanganan pandemi COVID-19.



## ASESMEN INFLASI

**Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 menurun, terutama didorong oleh meredanya tekanan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.** Kelompok ini masih menjadi sumber utama tekanan inflasi meski *magnitudenya* menurun cukup signifikan seiring dengan normalisasi harga aneka cabai yang sempat meningkat pada akhir tahun. Selain itu deflasi aneka bawang karena melimpahnya pasokan bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah, dan impor bawang putih dari Tiongkok juga turut mendorong penurunan laju inflasi pada triwulan laporan. Adapun tekanan inflasi terutama bersumber dari minyak goreng, akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional. Sejalan dengan itu, ikan asin teri dan tomat jugat turut menyumbang inflasi akibat penurunan pasokan, imbas gangguan cuaca dan erupsi Gunung Sinabung. Dampaknya, inflasi pada triwulan I-2021 tercatat sebesar 1,43% (yoy), turun cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,96% (yoy). Dengan realisasi ini, laju inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan berada di atas inflasi Nasional sebesar 1,37% (yoy) dan di bawah inflasi Sumatera sebesar 1,60% (yoy). Pada triwulan II-2021 tekanan inflasi Sumatera Utara diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I-2021 sebelumnya, sesuai dengan pola historisnya. Peningkatan ini terutama diperkirakan bersumber dari meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sehubungan dengan naiknya permintaan masyarakat dan industri seiring dengan perbaikan ekonomi yang turut mempengaruhi harga pangan domestik.

## ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

**Tekanan stabilitas sistem keuangan Sumatera Utara pada triwulan I-2021 meningkat,** tercermin dari tingkat profitabilitas bank yang melambat serta rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang meningkat. Meskipun demikian, risiko kredit terjaga pada level 3,5%. Penyaluran pembiayaan tercatat meningkat didorong oleh perbaikan kinerja kredit modal kerja. Hal ini merepresentasikan optimisme pelaku usaha yang mulai meningkat. Perbaikan kredit korporasi turut mengonfirmasi hal ini. Sementara itu, daya beli masyarakat yang belum kuat diindikasikan menjadi penyebab perlambatan kredit rumah tangga terutama terjadi pada kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor di tengah perbaikan KPR. Di sisi lain, DPK juga menunjukkan perlambatan pada jenis tabungan dan deposito, diindikasikan terkait dengan penurunan suku bunga perbankan dan mencerminkan masih adanya precautionary motive serta pembatasan konsumsi seiring belum usainya wabah COVID-19.



## **ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

**Perkembangan sistem pembayaran pada triwulan I-2021 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.** Aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 mengalami net inflow sebesar Rp9,87 triliun, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow*. Hal ini mengindikasikan aliran kas masuk (*inflow*) ke khazanah Bank Indonesia se-Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan aliran kas keluar (*outflow*). Dari sisi sistem pembayaran non tunai, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berjalan dengan baik, meskipun melambat. Selain itu, nominal transaksi Kartu ATM Debet dan Kartu Kredit cukup terjaga. Di sisi lain, tren digitalisasi semakin meningkat tercermin dari pesatnya penggunaan uang elektronik dan transaksi *e-commerce*. Perkembangan sistem pembayaran sesuai dengan pola seasonal dimana pada awal tahun aktivitas ekonomi cenderung turun pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini juga terkonfirmasi dari penurunan konsumsi masyarakat dan belum terealisasinya belanja Pemerintah pada awal tahun.

## **ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN**

**Di tengah pemulihan ekonomi yang terus berjalan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masih diliputi tantangan.** Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja berkurang seiring meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Februari 2021 tercatat 6,01% atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,73%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 69,39% pada Februari 2021, turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 72,2%. Sementara itu, Nilai Tukar Petani mencatat apresiasi. Sedangkan di sisi kesejahteraan, ketimpangan pendapatan, baik di perkotaan maupun perdesaan, semakin berkurang, meskipun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat



## **PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH**

Pemulihan ekonomi akan berlanjut hingga akhir 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Sumatera Utara diprediksi tumbuh pada rentang 3%-4,5%. Program vaksinasi diharapkan menjadi jawaban dari perbaikan perekonomian. Peningkatan pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, menunjukkan perbaikan. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat di HBKN Idul Fitri dan jaring pengaman sosial dari pemerintah. Sementara itu, secara keseluruhan tahun, tekanan inflasi diperkirakan meningkat namun masih dalam rentang sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Fase pemulihan yang berlangsung akan meningkatkan permintaan domestik sekaligus memperbaiki daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kenaikan harga.



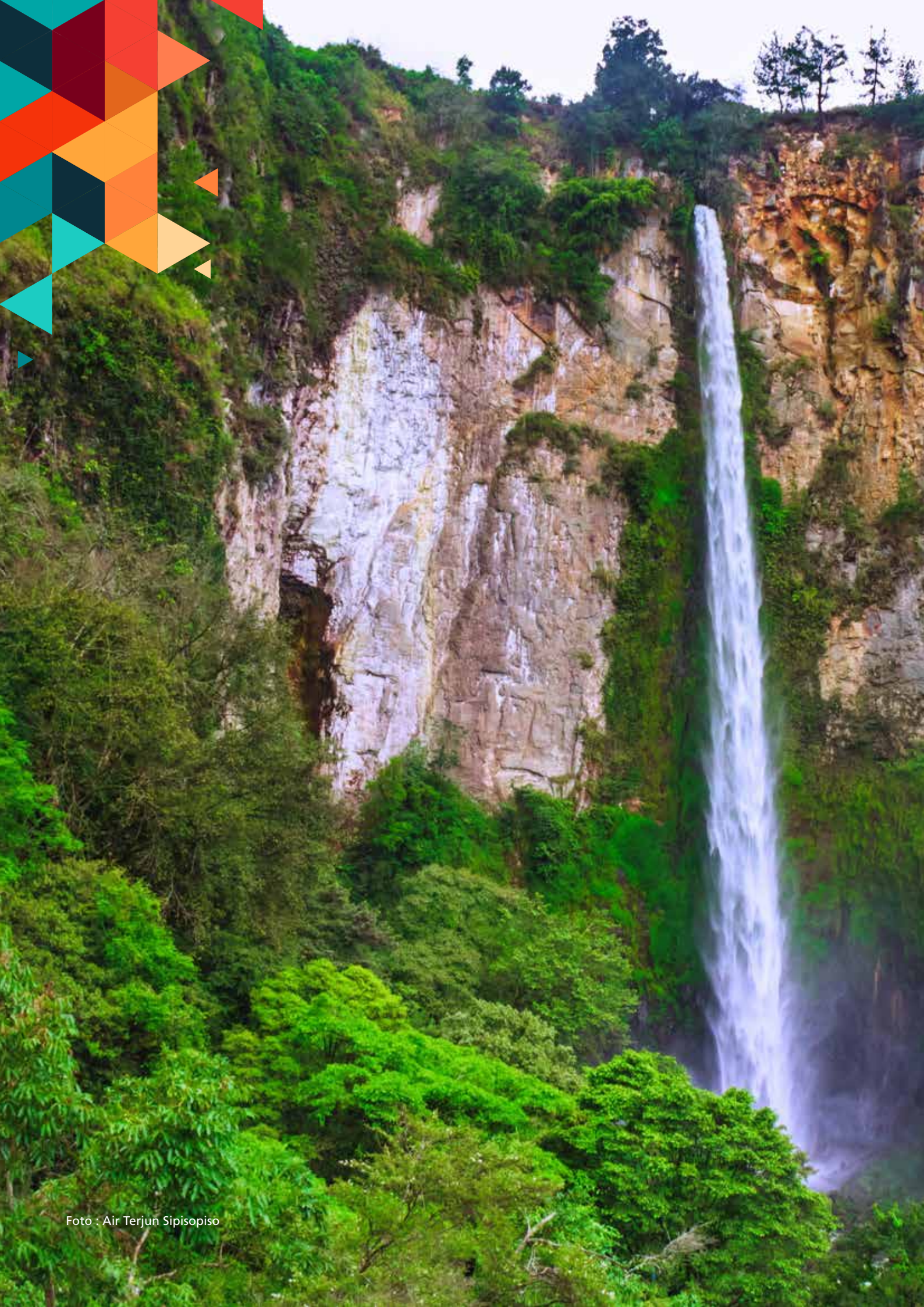



Foto : Air Terjun Sipisopiso



Bab I

## Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Mengawali tahun 2021, optimisme pemulihan ekonomi Sumatera Utara mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tercatat -1,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -2,94% (yoy). Dari sisi permintaan perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor yang meningkat. Perbaikan di negara maupun provinsi mitra dagang didukung dengan peningkatan harga komoditas menjadi faktor utama akselerasi perekonomian Sumatera Utara. Dari sisi Lapangan Usaha, kinerja seluruh sektor utama pada triwulan laporan terakselerasi. Ke depan perekonomian Sumatera Utara memiliki banyak ruang untuk bertumbuh berkenaan dengan realisasi yang tercatat masih lebih rendah dari nasional yang sebesar -0,74% (yoy) dan Sumatera yang sebesar -0,86% (yoy). Kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat seiring dengan program vaksinasi yang terus berjalan menjadi kunci utama pemulihan ekonomi Sumatera Utara



## 1.1 OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI DALAM MENGAWALI TAHUN 2021



### PERTUMBUHAN EKONOMI % (yoy)

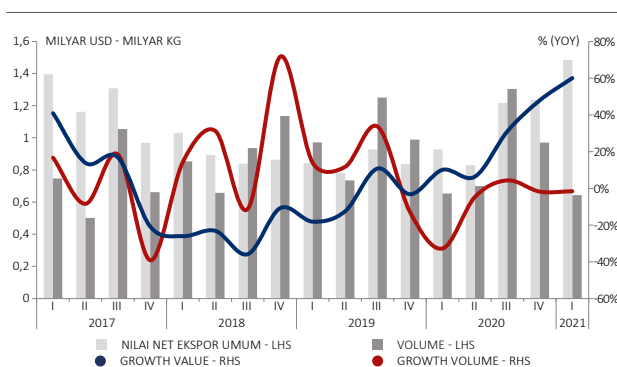
SUMATERA UTARA **-2.94** **-1.85**

■ Triwulan IV 2020 ■ Triwulan I 2021

NASIONAL **-2.19** **-0.74**

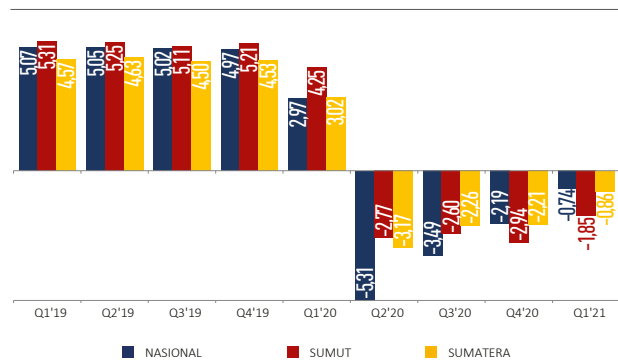
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tercatat -1,85% (yoy), kembali menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -2,94% (yoy). Namun, realisasi ini masih lebih rendah dari nasional yang sebesar -0,74% (yoy) dan Sumatera yang sebesar -0,86% (yoy).

**Dari sisi permintaan**, perbaikan terutama disebabkan oleh ekspor yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya khususnya kelompok komoditas industri makanan. Perbaikan kinerja ini didorong oleh geliat permintaan eksternal dari negara mitra dagang serta peningkatan harga komoditas. Perkembangan indikator *purchasing managers' index* (PMI) di AS,



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.2 Net Ekspor Sumatera Utara



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional TW-I 2021

Singapura, Zona Eropa, dan Jepang mengkonfirmasi hal tersebut. Senada dengan perbaikan ekspor, kinerja impor juga turut mengalami pertumbuhan positif.

Meski masih mengalami kontraksi, komponen investasi turut mencatatkan perbaikan. Di sisi lain, kontraksi lebih dalam pada konsumsi rumah tangga menahan perbaikan. Hal ini diduga karena pada triwulan yang sama tahun lalu, efek pandemi belum berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Terakhir, sesuai dengan pola historisnya, konsumsi pemerintah mencatatkan deselerasi pada triwulan I-2021.

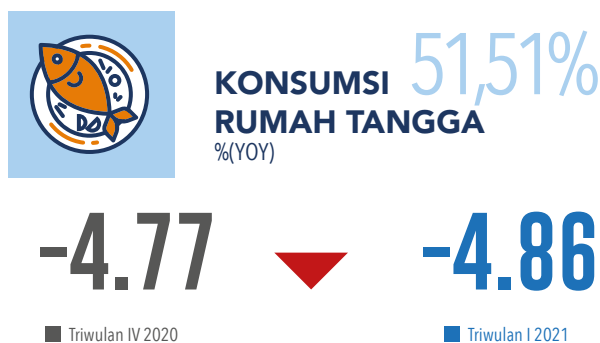
**Dari sisi penawaran**, perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh perbaikan komponen utama yang secara keseluruhan menjadi cerminan dari optimisme vaksinasi COVID-19 serta perbaikan ekonomi global dan domestik. Lebih lanjut, perbaikan industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan Tiongkok terhadap CPO menjelang hari raya Imlek. Perbaikan pertanian terjadi karena adanya musim panen beberapa komoditas utama pada pertengahan hingga akhir triwulan I-2021. Namun demikian, meski menunjukkan adanya perbaikan, sektor perdagangan masih mengalami kontraksi yang cukup dalam sejalan dengan sisi permintaan. Hal ini juga diduga karena sepanjang triwulan I-2021, Sumatera Utara secara ketat melakukan PPKM Mikro.



	2019					2020					2021
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,25%</b>	<b>-2,77%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-1,85%</b>
<b>PENGELUARAN</b>											
Konsumsi Rumah Tangga	4,40%	4,41%	4,92%	4,07%	4,45%	4,47%	-5,57%	-5,76%	-4,77%	-2,98%	-4,86%
Konsumsi LNPRT	23,85%	11,84%	3,10%	2,21%	9,95%	-8,90%	-5,44%	-0,04%	-1,10%	-4,02%	-5,84%
Konsumsi Pemerintah	8,18%	4,45%	3,04%	-11,04%	0,61%	-7,40%	0,28%	-0,50%	3,92%	-0,87%	0,77%
PMTB	8,60%	7,19%	8,84%	8,35%	8,25%	6,93%	-0,53%	-5,86%	-4,56%	-1,17%	-3,67%
Ekspor	5,54%	-3,23%	-9,11%	-0,55%	-2,17%	-6,15%	-10,87%	-8,58%	-15,12%	-10,36%	8,65%
Impor	7,50%	-6,06%	-10,83%	-3,01%	-3,68%	-8,07%	-13,54%	-16,44%	-20,42%	-14,97%	5,42%

Sumber: BPS (diolah)

## 1.2 EKSPOR MENJADI KOMPONEN UTAMA PENDORONG PEREKONOMIAN

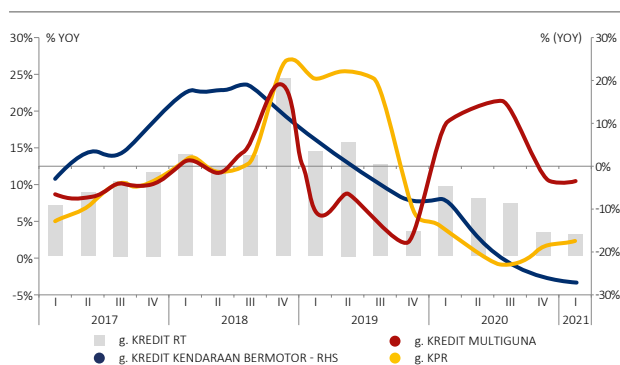


Pada triwulan laporan, konsumsi rumah tangga di Sumut mengalami kontraksi -4,86% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -4,77% (yoy). Upaya pembatasan aktivitas di tempat umum, mencakup jam operasional dan kapasitas, diprediksi menjadi salah satu penyebab kontraksi yang terjadi. Lebih lanjut apabila dibandingkan dengan

triwulan I-2020, diduga pandemi COVID-19 belum mempengaruhi konsumsi rumah tangga dimana kasus positif pertama Sumatera Utara tercatat pada pertengahan triwulan I-2020, yakni 17 Maret 2020. Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison dengan beberapa pelaku usaha ritel yang menyatakan bahwa penurunan realisasi permintaan merupakan *based effect* dari masih normalnya konsumsi pada periode yang sama di tahun lalu berikut dengan terjadinya fenomena *panic buying*.

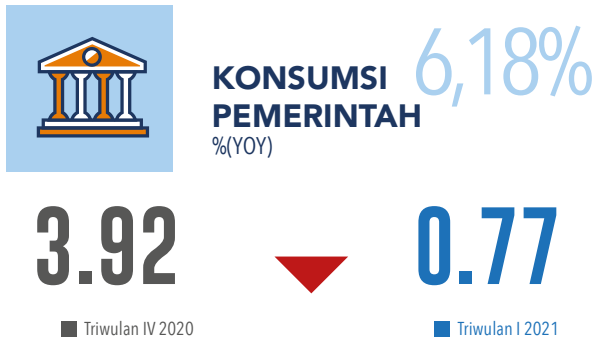
Selain itu, kontraksi konsumsi RT ini juga sejalan dengan hasil SK yang meskipun masih berada dalam level pesimis (di bawah 100). Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya optimisnya masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Perkembangan konsumsi RT ini juga tercermin dari indikator pembiayaan yang melambat, di mana penyaluran kredit RT pada triwulan I-2021 tercatat tumbuh 3,05% (yoy), lebih rendah dari 3,29% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Deselerasi ini terjadi pada dua jenis kredit dengan pangsa utama, yakni kredit kendaraan bermotor dan kredit multiguna.

Namun demikian, sektor properti berhasil menahan konsumsi rumah tangga terkontraksi lebih dalam. Hal ini didorong oleh relaksasi kebijakan makroprudensial berupa LTV/FTV dan fiskal berupa pembebasan PPN pembelian rumah. Akselerasi pada sektor properti dikonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR).



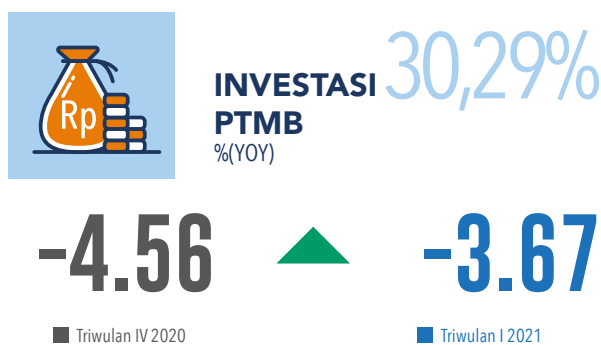
Sumber: LBU - Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.3 Kredit Rumah Tangga

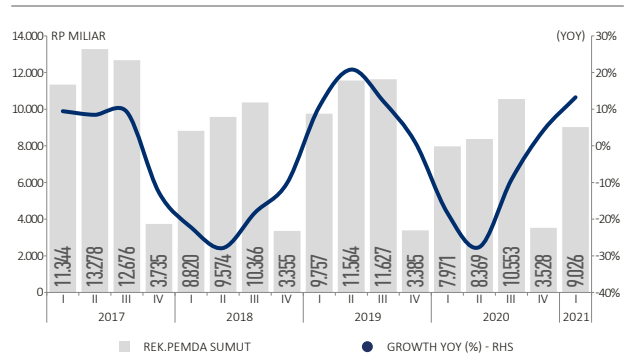


Sejalan dengan pola historisnya, konsumsi pemerintah pada triwulan I-2021 tercatat tumbuh 0,77% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,92% (yoy). Pemerintah diprediksi belum banyak melakukan aktivitas belanja pada triwulan I-2021. Pada awal tahun, pemerintah fokus melakukan konsolidasi untuk menentukan aktivitas belanja yang menjadi prioritas dan melakukan proses pengadaan belanja modal 2021.

Masih terbatasnya realisasi belanja fiskal daerah ini antara lain dipengaruhi realisasi TKDD yang belum optimal, proses *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19, serta proses adaptasi sistem keuangan baru yang lebih terintegrasi. Selain itu, pada awal tahun 2021 terdapat sejumlah daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga tercermin dari posisi dana milik Pemda di perbankan pada Maret 2021 yang juga lebih rendah dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir.



Pada Januari – Maret 2021, investasi tumbuh -3,67% (yoy), melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya yang sebesar -4,56% (yoy). Berdasarkan komponennya, perbaikan terjadi pada sub sektor



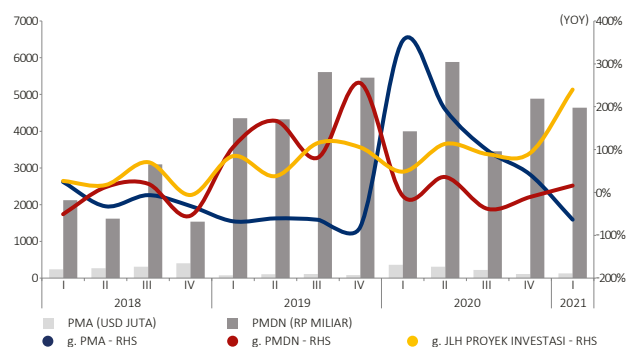
Sumber: LBU - Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.4 Simpanan Pemerintah Daerah

dengan pangsa utama, yakni sub sektor bangunan. Realisasi ini merupakan bentuk optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi, sejalan dengan akselerasi pada lapangan usaha utama seperti industri pengolahan.

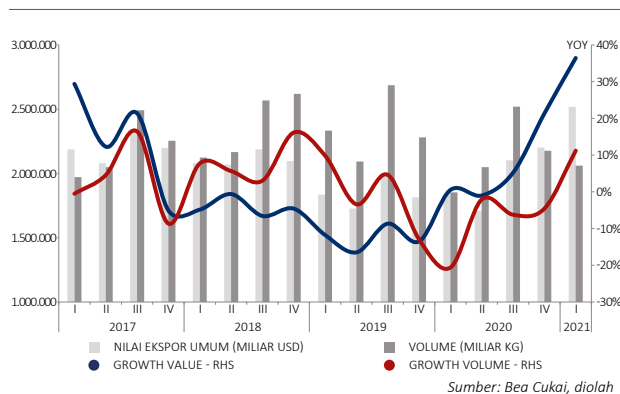
Peningkatan permintaan mendorong pengusaha sektor pengolahan sawit membangun *Power Plant* (bekerja sama dengan Tiongkok), *refinery*, dan *oleochemical plant*, di wilayah Sumatera Utara dan Belitung. Salah satu investor utama dari sektor perdagangan juga tercatat melakukan pembangunan gerai baru di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan optimisme terhadap potensi bisnis ritel ke depan. Dari LU Konstruksi, sejalan dengan peningkatan permintaan properti, pelaku usaha properti terus melakukan penambahan bangunan.

Di samping itu, terdapat proyek-proyek swasta maupun pemerintah yang mulai kembali berjalan setelah sempat tertunda pada tahun 2020. Data



Sumber: BKPM, diolah

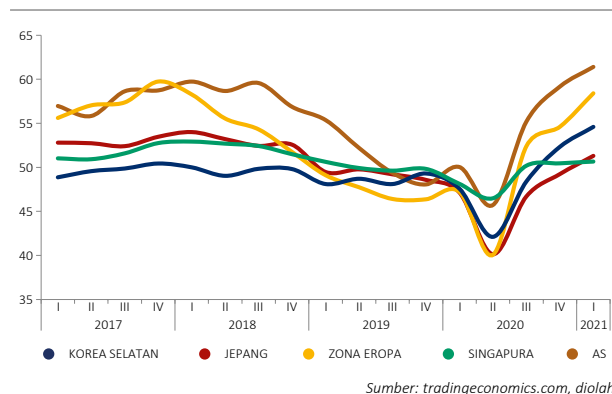
Grafik 1.5 PMA PMDN



**Grafik 1.6** Nominal dan Volume Ekspor

BKPM mengkonfirmasi hal ini yang menyatakan bahwa secara keseluruhan terdapat kenaikan pertumbuhan jumlah proyek investasi dari 92% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi sebesar 240% (yoy) pada triwulan laporan. Selain itu juga tercatat perbaikan pertumbuhan nominal investasi menjadi sebesar 9% (yoy) terakselerasi positif dibandingkan dengan triwulan IV-2020 yang tercatat sebesar -10% (yoy). Secara spasial perbaikan utamanya terjadi pada investasi dalam negeri.

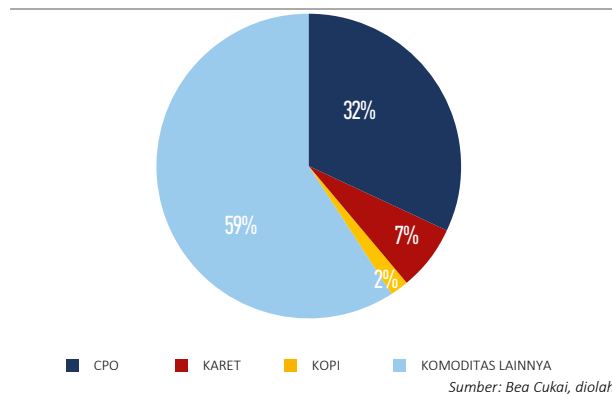
Dalam mendorong promosi investasi, Bank Indonesia Sumatera Utara secara aktif tetap melakukan pameran promosi investasi, *business matching*, serta pengoptimalan media promosi (*website*). Adapun pada tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan *one-on-one meeting* dengan HKTDC bekerjasama dengan *Hong Kong Business Association* (IDHKBA). Beberapa proyek yang terlibat mencakup LRT Mebidang, KA Siantar-Parapat, dan Rusunawa KEK Sei Mangkei.



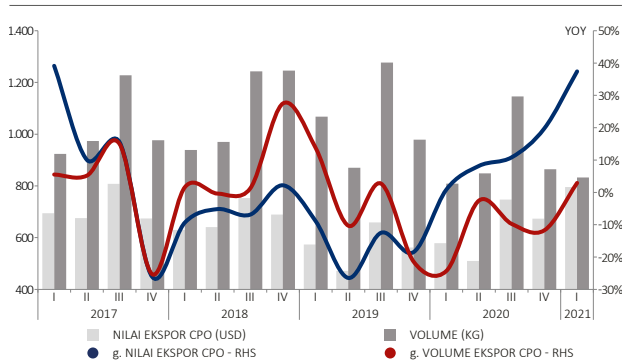
**Grafik 1.7** Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing

Pertumbuhan ekspor pada triwulan I-2021 mencatatkan perbaikan yang signifikan, yakni menjadi sebesar 8,65% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang sebesar -15,12% (yoy). Berdasarkan data dari Bea Cukai, secara total nominal, ekspor Sumatera Utara pada triwulan laporan tercatat tumbuh 36,5% (yoy) melanjutkan perbaikan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,4% (yoy). Demikian halnya terjadi peningkatan pertumbuhan total volume yang pada triwulan IV-2020 kontraksi -4,6% (yoy) berbalik arah menjadi 11,2% (yoy) pada triwulan I-2021.

Peningkatan ekspor diperkirakan bersumber dari peningkatan permintaan dari negara - negara mitra dagang. Aktivitas produksi industri hilir di negara tujuan mengalami perbaikan seiring dengan perbaikan kondisi COVID-19 pada triwulan berjalan, sebagaimana tercermin dari kenaikan PMI.



**Grafik 1.8** Pangsa Komoditas Ekspor

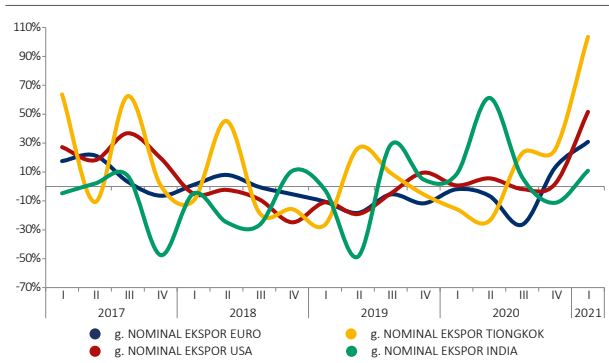


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.9 Ekspor CPO

Berdasarkan komponennya, ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah tercatat mengalami peningkatan. Akselerasi paling tinggi terjadi pada ekspor luar negeri untuk kategori barang. Lebih lanjut untuk ekspor luar negeri kategori jasa turut mencatatkan perbaikan, namun belum signifikan terlihat dari kedatangan wisatawan mancanegara yang masih terbatas. Restriksi yang diberlakukan oleh berbagai negara khususnya Malaysia dan Singapura yang sangat dominan dalam kunjungan wisman di Sumut berdampak pada kinerja ekspor jasa. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekspor antar daerah turut dipengaruhi berlanjutnya program biodiesel oleh pemerintah.

Berdasarkan komoditasnya, CPO sebagai komoditas utama dengan pangsa ekspor sebesar 32% mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Berdasarkan data dari Bea Cukai, secara total nominal, ekspor CPO pada triwulan laporan tercatat tumbuh 37,4% (yoy) melanjutkan perbaikan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,4% (yoy). Demikian halnya terjadi peningkatan pertumbuhan total volume yang pada triwulan IV-2020 kontraksi -11,7% (yoy) berbalik arah menjadi 2,9% (yoy) pada triwulan I-2021. Meskipun pandemi COVID-19 secara umum membuat ekonomi dunia resesi, namun permintaan terhadap produk olahan sawit justru tetap stabil. Kestabilan permintaan dunia terhadap produk sawit juga dipengaruhi turunnya produksi sawit Malaysia akibat sempat terhentinya aktivitas korporasi sawit Malaysia akibat pandemi, sehingga meningkatkan posisi tawar dan permintaan terhadap produk sawit Indonesia. Lebih



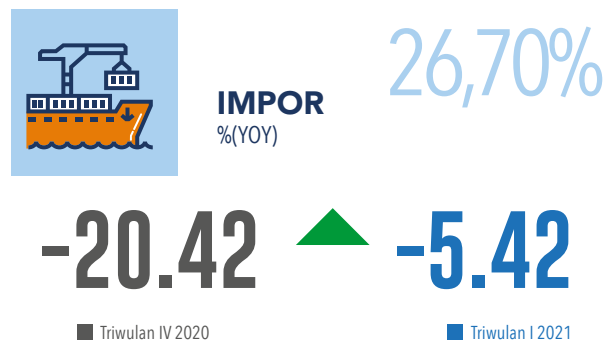
Sumber: Bea Cukai, diolah

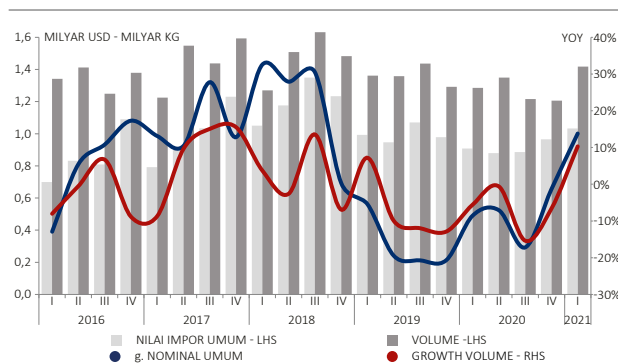
Grafik 1.10 Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

lanjut, stabilnya permintaan ekspor juga ditopang oleh tetap tingginya kebutuhan produk minyak sawit *edible*, khususnya minyak goreng, selama pandemi COVID-19, mengingat minyak goreng merupakan produk yang esensial bagi kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan peningkatan ekspor komoditas CPO, peningkatan ekspor karet dipengaruhi kenaikan harga karet dunia dan *based effect* rendahnya produksi di tahun sebelumnya, yang ketika itu harga karet sangat rendah sehingga petani kurang mendapat insentif untuk berproduksi. Peningkatan harga karet pada awal 2021 membuat produksi karet lokal kembali meningkat, meskipun peningkatan permintaan masih tumbuh terbatas karena ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi. Peningkatan kinerja ekspor juga ditopang oleh upaya perluasan pasar ekspor ke Taiwan dan India.

Berdasarkan negaranya, peningkatan ekspor paling signifikan merupakan ekspor ke negara Tiongkok. Peningkatan permintaan ekspor ini berkaitan dengan perayaan Imlek.



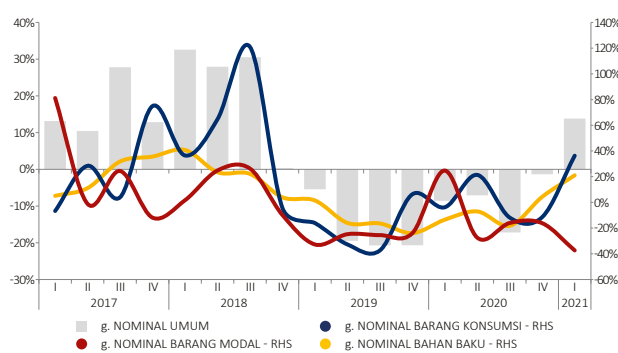


Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.11** Nominal dan Volume Impor

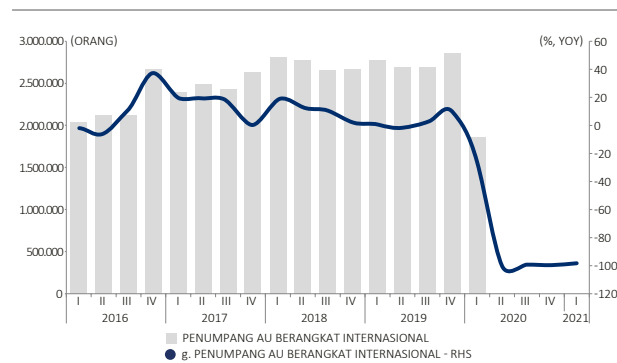
Sejalan dengan ekspor, pertumbuhan impor tercatat 5,42% (yoy) pada triwulan I-2021, jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -20,42% (yoy). Berdasarkan data dari Bea Cukai, secara total nominal, impor Sumatera Utara pada triwulan laporan tercatat tumbuh 13,8% (yoy) melanjutkan perbaikan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh -1,4% (yoy). Demikian halnya terjadi peningkatan pertumbuhan total volume yang pada triwulan IV-2020 kontraksi -6,6% (yoy) berbalik arah menjadi 10,3% (yoy) pada triwulan I-2021.

Berdasarkan komponennya, impor luar negeri dan impor antar daerah tercatat mengalami peningkatan. Dari sisi jasa perbaikan terjadi seiring dengan aktivitas penerbangan internasional sudah mulai dilonggarkan pada triwulan laporan. Namun, pertumbuhan penumpang internasional masih jauh dari kondisi normal dimana ketatnya izin keluar warga negara asing oleh negaranya dan kebijakan restriksi perjalanan ke negara Indonesia sebagai salah satu negara zona



Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.13** Nominal Impor Berdasarkan Kelompok Barang



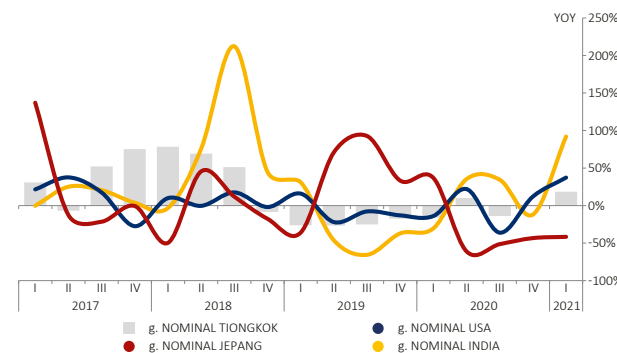
Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1.12** Penumpang Angkutan Udara Internasional yang Berangkat

merah, menyebabkan kunjungan wisman menurun signifikan.

Berdasarkan kelompok, peningkatan pertumbuhan terjadi pada impor barang konsumsi dan bahan baku. Kendati demikian, impor barang modal masih mengalami kontraksi yang semakin dalam. Secara nominal, impor barang modal terkontraksi -37,41% (yoy) pada triwulan I-2021 lebih dalam dibandingkan pada triwulan IV-2020 yang sebesar -16,22% (yoy).

Berdasarkan negaranya, impor dari seluruh negara tujuan utama tercatat mengalami peningkatan dengan peningkatan impor paling signifikan berasal dari negara India. Secara nominal, impor dari negara India tumbuh 91,9% (yoy) pada triwulan I-2021 jauh lebih tinggi dibandingkan pada triwulan IV-2020 yang sebesar -12% (yoy). Selain karena pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, peningkatan yang signifikan ini juga merupakan *based effect* dari triwulan yang sama pada tahun 2020.



Sumber: Bea Cukai, diolah

**Grafik 1.14** Nominal Impor Berdasarkan Negara Asal

	2019					2020					2021
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
<b>PDRB</b>	<b>5,31%</b>	<b>5,25%</b>	<b>5,11%</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,25%</b>	<b>-2,77%</b>	<b>-2,60%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>-1,07%</b>	<b>-1,85%</b>
<b>PERMINTAAN</b>											
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07%	6,03%	4,07%	4,44%	5,13%	6,14%	1,40%	0,61%	-0,18%	1,95%	0,20%
Pertambangan dan Penggalian	5,47%	3,88%	4,34%	4,48%	4,53%	3,48%	-3,58%	-4,73%	-4,17%	-2,31%	-3,23%
Industri Pengolahan	2,28%	0,68%	1,20%	0,80%	1,23%	0,30%	-0,79%	-1,47%	-1,34%	-0,84%	1,01%
Pengadaan Listrik, Gas	1,85%	4,69%	3,58%	9,55%	4,92%	9,05%	1,14%	4,40%	-1,48%	3,16%	-0,24%
Pengadaan Air	3,48%	6,54%	6,38%	5,34%	5,44%	5,63%	2,28%	3,64%	3,64%	3,79%	3,34%
Konstruksi	7,42%	7,52%	7,19%	7,07%	7,29%	3,05%	-6,14%	-5,16%	-5,10%	-3,42%	-3,07%
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,59%	6,40%	8,00%	7,66%	6,93%	4,62%	-4,46%	-3,35%	-4,25%	-1,94%	-2,13%
Transportasi dan Pergudangan	5,21%	5,18%	6,31%	6,47%	5,80%	4,76%	-20,32%	-17,84%	-16,93%	-12,77%	-18,30%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72%	9,01%	9,15%	8,65%	8,88%	8,00%	-14,77%	-14,54%	-14,83%	-9,26%	-15,11%
Informasi dan Komunikasi	8,96%	9,82%	9,85%	9,87%	9,63%	9,97%	5,42%	4,90%	4,66%	6,17%	4,64%
Jasa Keuangan	0,30%	1,59%	0,33%	5,48%	1,92%	5,14%	-2,32%	0,34%	2,08%	1,29%	1,53%
Jasa Perantara Keuangan	-1,76%	0,07%	-1,72%	6,10%	0,63%	5,97%	-0,76%	3,27%	5,62%	3,53%	5,87%
Real Estate	4,79%	4,85%	4,85%	4,88%	4,84%	4,85%	0,51%	0,52%	0,52%	1,57%	0,52%
Jasa Perusahaan	5,26%	5,56%	5,63%	6,76%	5,81%	5,17%	-7,69%	-7,96%	-7,84%	-4,71%	-8,81%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,36%	8,37%	7,97%	7,76%	8,11%	4,77%	0,64%	-0,01%	-2,13%	0,73%	-1,10%
Jasa Pendidikan	3,93%	5,28%	5,39%	4,81%	4,86%	4,49%	0,58%	0,58%	0,56%	1,52%	0,36%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40%	5,42%	4,40%	3,36%	4,63%	2,52%	-3,95%	-4,16%	-4,16%	-2,46%	-8,34%
Jasa lainnya	5,71%	6,14%	6,59%	6,54%	6,25%	5,16%	-6,77%	-6,49%	-6,49%	-3,74%	-6,49%

Sumber: BPS (diolah)



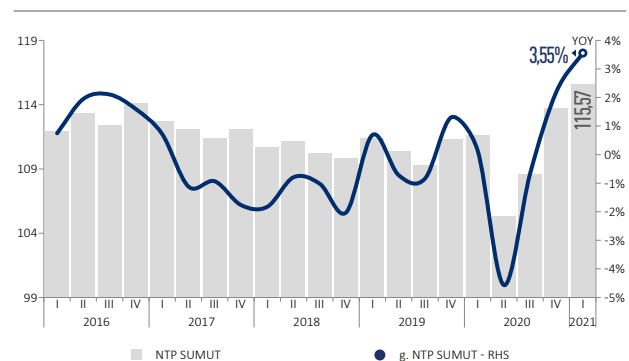
■ Triwulan IV 2020      ■ Triwulan I 2021

### 1.3 AKSELERASI LAPANGAN USAHA UTAMA MENOPANG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada triwulan I-2021, LU Pertanian tercatat tumbuh 0,20% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang sebesar -0,18% (yoy). Kinerja LU pertanian yang solid diikuti oleh perbaikan kesejahteraan petani. Hal tersebut tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani

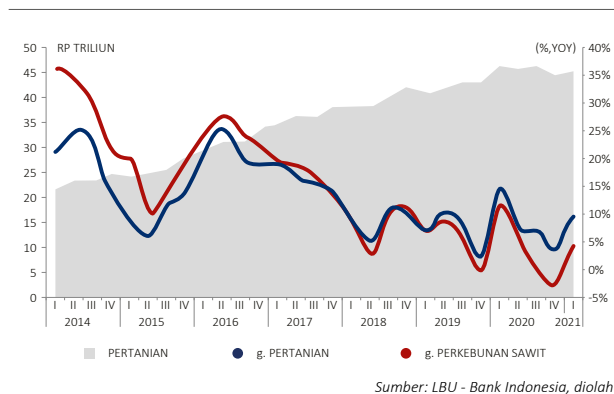
(NTP) pada triwulan I-2021 yang tercatat meningkat, dari 113,7 pada triwulan IV-2020 menjadi 115,6.

Pertumbuhan utamanya terjadi pada sub sektor perkebunan didorong oleh perkiraan produksi kelapa sawit yang membaik akibat tanaman *replanting* yang



Sumber: BPS, diolah

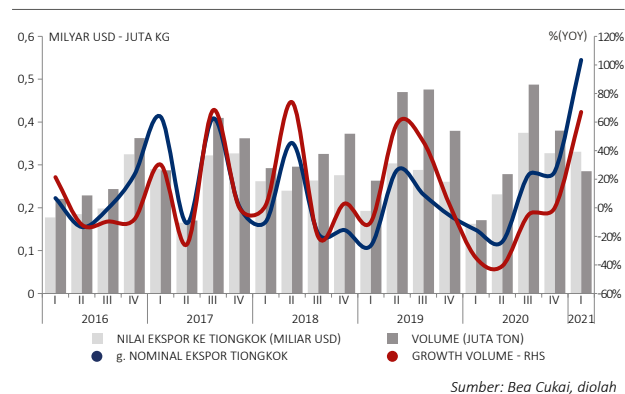
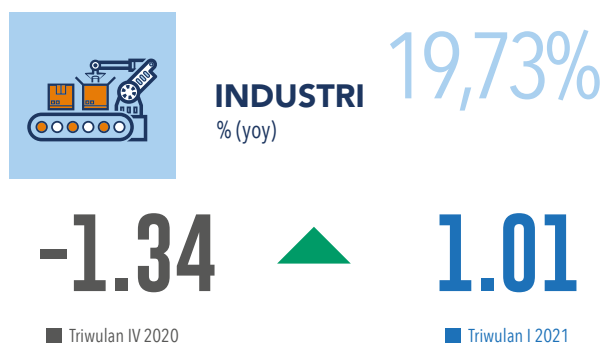
**Grafik 1.15** Nilai Tukar Petani



**Grafik 1.16** Kredit Pertanian dan Perkebunan Kelapa Sawit

sudah *mature*. Selain itu, peningkatan permintaan untuk hasil olahan CPO dan program biodiesel pemerintah yang terus berlanjut hingga saat ini juga berandil besar dalam penyerapan produksi sawit di dalam negeri. Lebih lanjut pada komoditas karet, produksi getah karet mulai meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas penyadapan getah karet yang didorong oleh perbaikan harga karet di tingkat petani. Sesuai pola historisnya akselerasi juga terjadi pada sub sektor tanaman hortikultura disebabkan oleh panen beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah. Panen beberapa komoditas pada *Food Estate* Humbang Hasundutan diperkirakan turut mendorong kinerja sektor ini.

Pertumbuhan positif sektor pertanian dikonfirmasi oleh sisi pembiayaan. Kredit pertanian mencatatkan peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi dari 3,9% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 9,5% (yoy). Selain itu, kredit perkebunan kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan positif 4,5% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan IV-2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,6% (yoy).

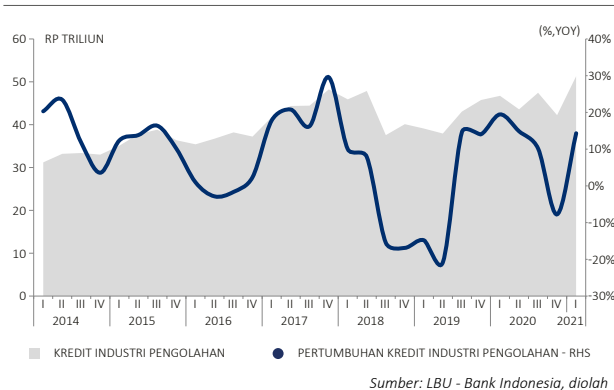


**Grafik 1.17** Nilai Ekspor ke Tiongkok

LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh menguat menjadi sebesar 1,01% (yoy), melanjutkan perbaikan dari triwulan sebelumnya yang sebesar -1,34% (yoy) sejalan dengan peningkatan ketersediaan bahan baku pasca musim trek kelapa sawit dan periode gugur daun karet.

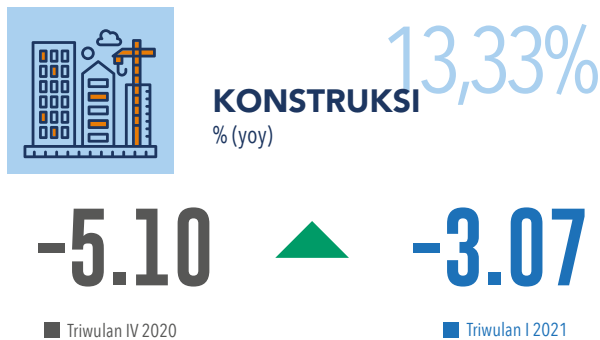
Akselerasi khususnya terjadi pada sub sektor dengan pangsa utama yakni industri makanan dan minuman. Hal ini sejalan dengan masih tingginya kebutuhan sabun dan *hand sanitizer* sebagai salah satu produk utama yang mendukung protokol kesehatan pada era adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, permintaan CPO ke Tiongkok meningkat seiring dengan perayaan Imlek terkonfirmasi oleh peningkatan kinerja ekspor ke Tiongkok pada triwulan I-2021.

Selain itu, perbaikan pada LU Industri Pengolahan turut didorong oleh masih tingginya harga komoditas utama dan stabilnya permintaan minyak goreng selama pandemi, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat. Dewasa ini diprediksi terdapat kecenderungan perubahan preferensi konsumen minyak goreng, dari semula minyak goreng curah, menjadi minyak goreng bermerk dengan alasan kesehatan. Selain itu, kestabilan volume penjualan domestik juga turut dipengaruhi berlanjutnya program biodiesel oleh pemerintah, sehingga menjaga serapan CPO domestik tetap stabil.

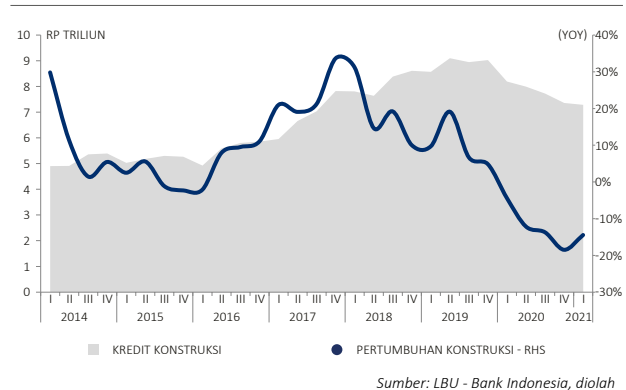


Grafik 1.18 Kredit Industri Pengolahan

Lebih lanjut, sub sektor lainnya yang mencatatkan peningkatan adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Hal ini diduga sejalan dengan distribusi vaksin yang berjalan cukup lancar pada triwulan I-2021. Arah akselerasi ini juga terkonfirmasi oleh kredit industri pengolahan yang tumbuh signifikan pada triwulan laporan. Secara tahunan pertumbuhan kredit industri pengolahan tercatat 14,3% pada triwulan I-2021 berbalik arah dibandingkan triwulan IV-2020 yang mencatatkan kontraksi sebesar -7,7% (yoy).



Pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan I-2021 tercatat -3,07% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -5,10% (yoy). Pertumbuhan LU Konstruksi membaik didorong oleh pembangunan proyek kelistrikan dan jalan tol yang terus berlanjut. Hal ini diperkuat oleh pergerakan kembali proyek-proyek yang sempat tertunda pada tahun 2020. Dimana pembangunan sudah mulai dilakukan dalam proyek strategis nasional, persiapan PON tahun 2024 dengan Sumatera Utara sebagai salah satu tuan rumah,

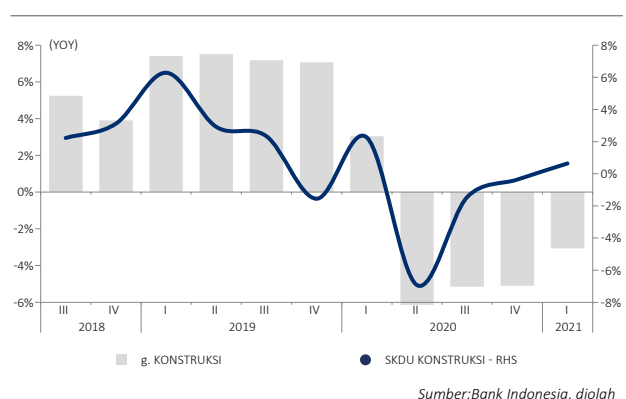


Grafik 1.19 Kredit Konstruksi

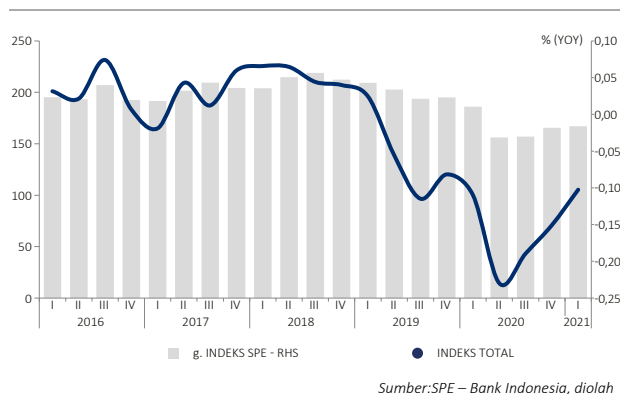
pembangunan jalur kereta api lintas Stasiun Araskabu – Stasiun Siantar yang direncanakan selesai 2021, dan pembangunan duplikasi Jembatan Peureulak dan Jembatan Idi Rayeuk untuk mendukung konektivitas antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Selain itu, iklim konstruksi yang kondusif juga terkonfirmasi oleh penyaluran kredit sektor konstruksi yang terakselerasi.

Lebih lanjut, pertumbuhan pada sektor properti diperkirakan turut berkontribusi terhadap akselerasi kinerja sektor konstruksi. Peningkatan pembelian rumah berkenaan dengan relaksasi kebijakan makroprudensial berupa LTV/FTV dan fiskal berupa pembebasan PPN pembelian, telah mendorong pelaku usaha sektor properti terus melakukan pembangunan rumah.

Perbaikan kinerja LU Konstruksi turut diafirmasi oleh perbaikan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha sektor konstruksi.



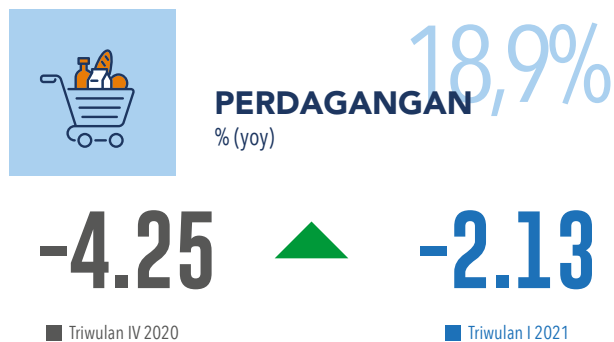
Grafik 1.20 SKDU Konstruksi



Grafik 1.21 Survei Penjualan Eceran



Gambar 1.1 Beli Kreatif Danau Toba

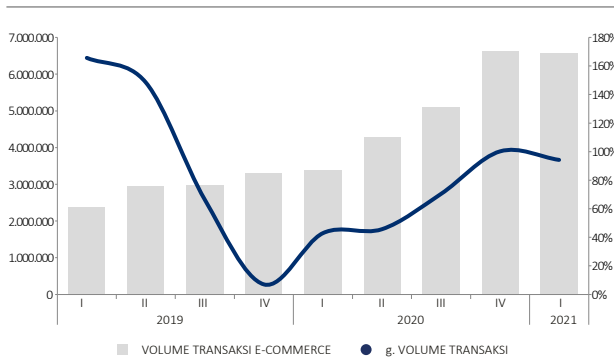


LU Perdagangan pada triwulan I-2021 tercatat tumbuh -2,13% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar -4,25% (yoy). Menurut komponennya, kedua sub sektor LU perdagangan mencatatkan perbaikan. Kontraksi pada sub sektor perdagangan mobil diduga ditahan oleh kebijakan pemerintah pusat yakni relaksasi PPnBM. Sub sektor bukan mobil juga turut mencatatkan perbaikan. Realisasi ini sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekspor dari sisi permintaan. Perbaikan yang terjadi pada mitra dagang utama menjadi faktor pendorong pertumbuhan LU Perdagangan. Dari sisi pelaku usaha eceran, Indeks Penjualan Riil (IPR) mengonfirmasi perbaikan tersebut.

Namun demikian, pemulihan kinerja LU Perdagangan belum disertai perbaikan penyaluran kredit kepada debitur usaha perdagangan. Hal ini terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur usaha perdagangan yang masih berkontraksi hingga akhir triwulan I-2021. Kehati-hatian perbankan dinilai sebagai dampak masih adanya penambahan kasus harian COVID-19 yang

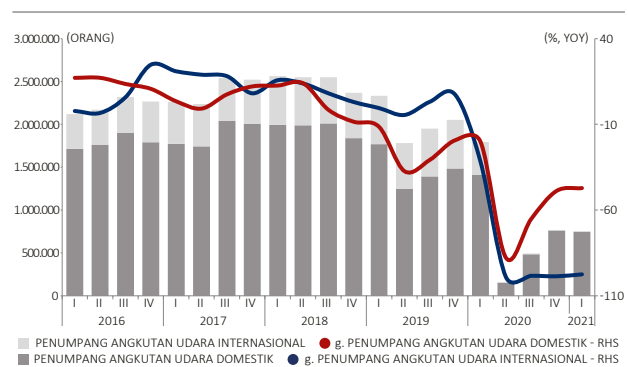
cukup tinggi di beberapa daerah. Hal ini juga dibayangi oleh pemulihan rasio kemampuan bayar korporasi perdagangan yang diperkirakan akan berjalan lambat pada triwulan I-2021. Dengan demikian, ketahanan kualitas kredit LU Perdagangan relatif rentan terhadap risiko yang menyebabkan tertahannya intermediasi.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah di Sumatera Utara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Kampanye Beli Kreatif Danau Toba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada Februari 2021 lalu. Bank Indonesia Sumatera Utara menyiapkan beberapa strategi khusus untuk mendukung kampanye Beli Kreatif Danau Toba (BKDT). Dua diantaranya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta ekonomi syariah dan digitalisasi sistem pembayaran melalui *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) di 8 kabupaten yang ada di Kawasan Danau Toba. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dicanangkan pemerintah pusat dalam rangka program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Selain itu, pada Maret 2021, dalam rangka mendorong perdagangan internasional, telah dilakukan *one-on-one meeting* antara Aloya dan Ardina Batik dengan BRI sebagai rangkaian KKI Seri 1 Tahun 2021.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 1.22** Volume Transaksi E-commerce berdasarkan Provinsi Penjual



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 1.23** Penumpang Angkutan Udara Domestik dan Internasional



■ Triwulan IV 2020

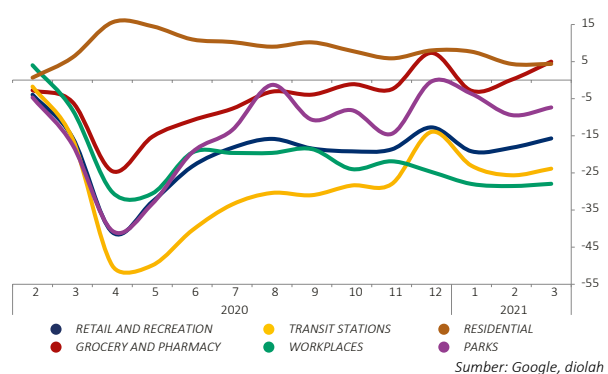
■ Triwulan I 2021

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I-2021 tumbuh -18,30% (yoy), berkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -16,93% (yoy). Kontraksi utamanya terjadi pada sub sektor pergudangan. Pertumbuhan terbatas pada penjualan *e-commerce* sebagai bentuk moderasi dari peningkatan belanja masyarakat pada akhir tahun. Hal ini terindikasi dari penurunan volume transaksi *e-commerce* dari beberapa *marketplace* terbesar di Indonesia.

Sub sektor angkutan udara juga turut berkontribusi terhadap kontraksi yang terjadi pada sektor transportasi & pergudangan. Hal ini merupakan moderasi dari aktivitas berpergian yang meningkat pada triwulan IV-2020 dengan adanya momen libur panjang di bulan Oktober, HBKN Natal, dan libur tahun baru. Kendati demikian, dari grafik dapat terlihat bahwa level penumpang angkutan udara domestik tidak lagi turun

terlalu dalam. Terbatasnya perjalanan dari negara lain merupakan kondisi yang masih harus dicari jalan keluarnya.

Di sisi lain, sub sektor angkutan rel, angkutan darat, dan angkutan laut mencatatkan perbaikan kinerja pada triwulan laporan. Akselerasi pada angkutan rel dan angkutan laut terjadi seiring dengan mulai pulihnya transaksi pada dunia usaha. Sementara perbaikan pada angkutan darat didorong oleh pergeseran preferensi liburan pada masyarakat. Saat ini masyarakat lebih memilih untuk melakukan *staycation* dan/atau liburan lokal dibandingkan berpergian dengan menggunakan angkutan udara. Data dari *Google Mobility Index* juga mengkonfirmasi adanya peningkatan aktivitas di luar rumah, khususnya pada pertengahan triwulan I-2021.



Sumber: Google, diolah

**Grafik 1.24** Google Mobility Index



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



▶ BOKS 1

## **Perbaikan Indikator Survei Liaison Triwulan I-2021 Sejalan Dengan Akselerasi Perekonomian Sumut**

---



---

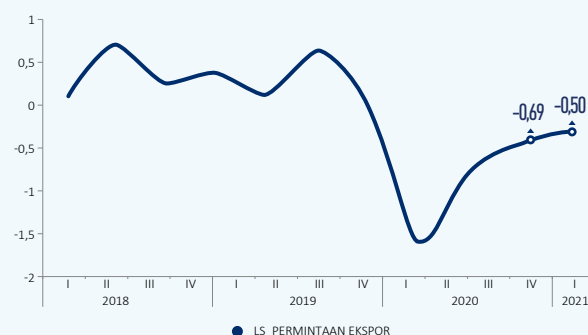
Tanda-tanda pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat dari perbaikan kinerja penjualan domestik dunia usaha, meski terbatas. Hal ini tercermin dari *Likert Scale* (LS) permintaan domestik pada triwulan I-2021, yang meskipun masih menunjukkan capaian negatif (-0,04), tetapi lebih baik dibanding triwulan sebelumnya sebesar -0,08. Sektor pertanian tetap menjadi penopang ekonomi. Perbaikan harga CPO dan tetap tingginya permintaan pertanian selama pandemi menahan kontraksi penjualan domestik lebih dalam. Sementara akumasi masih menjadi sektor yang terdampak seiring berkurangnya aktivitas di luar rumah selama pandemi.



Grafik B1.1 Likert Scale Permintaan Domestik

Sejalan dengan permintaan domestik, volume penjualan ekspor juga lebih baik dari triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut tercermin dari angka Likert Scale (LS) ekspor yang tercatat -0,50 atau relatif membaik dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat -0,69. Angka LS pada triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat -0,15. Perbaikan kinerja ekspor ditopang permintaan produk CPO dan turunannya yang tetap tinggi, diikuti dengan perbaikan harga karet dunia. Kendati demikian, kunjungan wisman masih minim, sehingga aktivitas pemulihan aktivitas pariwisata berjalan stagnan.

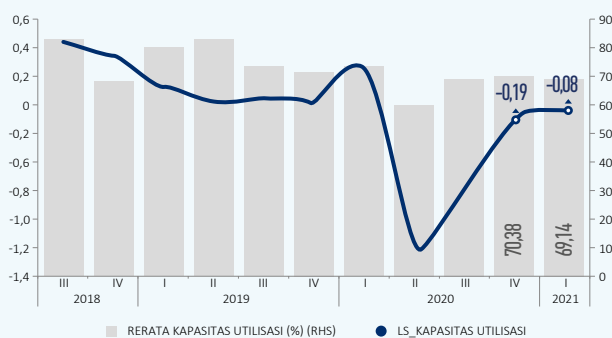
Peningkatan permintaan berdampak pada kenaikan kapasitas utilisasi. Meskipun indikator LS kapasitas utilisasi masih berada dalam teritori negatif, yakni sebesar -0,08, tetapi angkanya lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang mencatat -0,19. Dengan kata lain, pelaku usaha cenderung meningkatkan produktivitasnya demi memenuhi permintaan yang



Grafik B1.2 Likert Scale Permintaan Ekspor

mulai memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Perbaikan kinerja sektor pertanian turut meningkatkan aktivitas produksi, kendati kapasitas utilisasi industri karet masih minim menyusul kelangkaan bahan baku karet yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Di sektor akmamin, tingkat okupansi berangsur meningkat meski belum mencapai titik pra-pandemi akibat masih terbatasnya minat berwisata dan aktivitas di luar rumah.

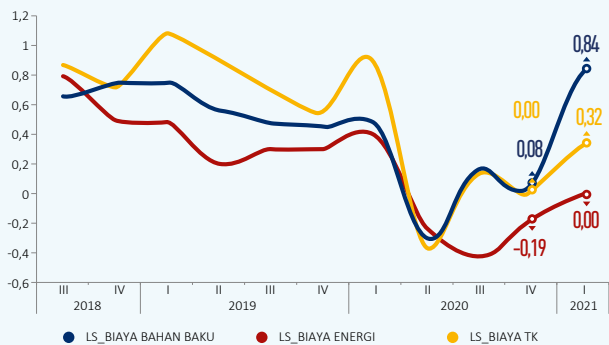
Secara keseluruhan, investasi tumbuh terbatas seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi. Mayoritas pelaku usaha cenderung *wait and see* dan fokus pada pemulihan usaha. Sementara investasi dalam jumlah besar hanya dilakukan oleh industri CPO berupa perluasan lahan tanam, dan PBE menyusul pembukaan gerai pada Februari 2021. Ke depan, investasi diperkirakan tumbuh lebih kuat. Kondisi ini terindikasi dari Likert Scale perkiraan investasi pelaku usaha yang menunjukkan arah positif dengan skala 0,56 sedikit lebih baik dibandingkan triwulan lalu



Grafik B1.3 Likert Scale Kapasitas Utilisasi



Grafik B1.4 Likert Scale Perkiraan Investasi

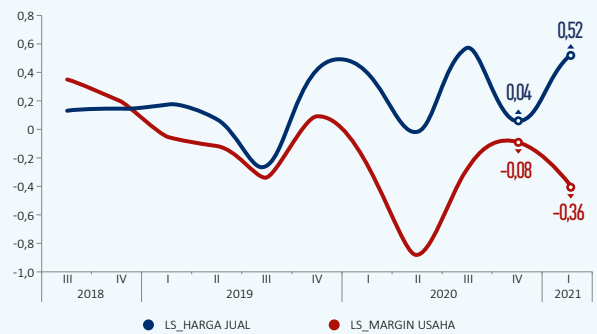


Grafik B1.5 Likert Scale Permintaan Domestik

yang tercatat 0,50. Secara umum, investasi ditujukan untuk penambahan kapasitas produksi (penambahan mesin pendukung produksi), *replanting* untuk mempertahankan produktivitas tanaman, pembelian lahan, serta pembelian berbagai sarana penunjang produksi lainnya (seperti pembangunan gudang dan instalasi limbah).

Dari sisi tenaga kerja, sejumlah pelaku usaha dilaporkan masih menempuh kebijakan PHK maupun menunda rekrutmen baru, sehingga menurunkan ketersediaan lapangan kerja. Meski demikian, biaya per satuan tenaga kerja meningkat terbatas seiring penyesuaian UMR. Di sisi lain, struktur biaya bahan baku dan biaya energi juga meningkat, seiring kenaikan harga besi, semen, kelapa sawit, karet, dan pupuk, serta penggunaan tenaga listrik yang lebih tinggi untuk meningkatkan kapasitas utilisasi.

Peningkatan kapasitas utilisasi pelaku usaha pada periode laporan berdampak pada peningkatan biaya-biaya. Hal ini tercermin dari LS biaya-biaya yang seluruhnya bergerak naik, mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berjalan seiring peningkatan ongkos produksi dan perbaikan volume penjualan. Kenaikan biaya-biaya memaksa pelaku usaha menaikkan harga jual agar tidak menggerus margin usaha lebih dalam. Harga jual CPO meningkat seiring tren apresiasi sejak 2020. Begitu pula dengan harga jual karet, yang mulai menunjukkan perbaikan pada awal tahun. Sebaliknya, sektor akmamin dan konstruksi terindikasi menahan kenaikan harga jual demi menjaga minat konsumen selama pandemi COVID-19.



Grafik B1.6 Likert Scale Harga Jual dan Margin Usaha

Ini menyebabkan tekanan margin usaha pada sektor akmamin lebih tinggi dibanding sektor lainnya.

Ke depan, kinerja penjualan diperkirakan akan lebih baik menyusul telah dimulainya program vaksinasi. Pelaku usaha juga menyampaikan beberapa saran perbaikan regulasi, di antaranya relaksasi aturan jam operasional pusat perbelanjaan. Dengan relaksasi tersebut, kontinuitas pelaku usaha, khususnya PBE, diharapkan bisa lebih baik.



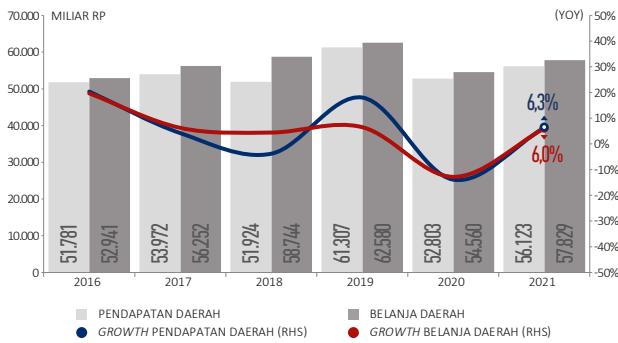
Foto : Medan, Sumatera Utara



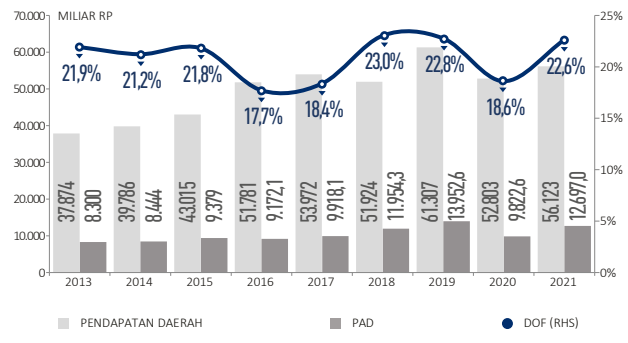
## Bab II

# Keuangan Pemerintah

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2021 meningkat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada APBD 2021 naik masing-masing sebesar 6,3% dan 6% dibandingkan dengan APBD 2020. Realisasi pendapatan APBD pada triwulan I-2021 belum optimal pada seluruh pos pendapatan sejalan dengan kebijakan insentif perpajakan yang berdampak pada menurunnya pendapatan wajib pajak sebagai dampak pandemi COVID-19 dan tertahannya penyaluran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara, realisasi belanja masih di bawah target didorong oleh penurunan pada jenis belanja operasional dan belanja modal. Di sisi lain, pagu belanja Pemerintah Pusat ke Sumatera Utara turun 5,6% dari tahun 2020, dengan optimalisasi realisasi belanja yang naik 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Optimalisasi realisasi belanja APBN di daerah didorong oleh belanja modal untuk percepatan pembangunan dan belanja bantuan sosial terutama penanganan pandemi COVID-19.



**Grafik 2.1** Perkembangan Pagu APBD Provinsi Sumatera Utara



**Grafik 2.2** Derajat Otonomi Fiskal Sumatera Utara

## 2.1 GAMBARAN UMUM APBD1 2021

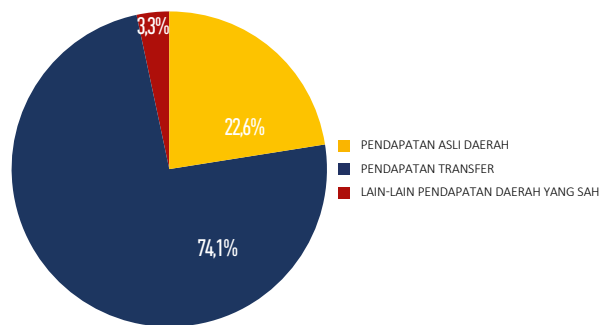
**Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 meningkat.** Pada 2021, pagu anggaran pendapatan naik 6,3% dibandingkan dengan pagu tahun 2020 yang telah direvisi akibat pandemi COVID-19. Pagu anggaran pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp56,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp52,8 triliun. Kenaikan pagu didorong oleh penerimaan pajak daerah yang semakin besar, ditopang penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) migas serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM).

**Sejalan dengan peningkatan pagu pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD 2021 Sumatera Utara turut mengalami kenaikan.** Anggaran belanja naik 6% dibandingkan dengan tahun 2020, dari Rp54,6 triliun menjadi Rp57,8 triliun. Komponen belanja modal merupakan komponen dengan pertumbuhan terbesar, yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam mencapai target pembangunan jangka menengah hingga 2024. Berdasarkan pangsanya, komponen belanja operasional tetap mendominasi struktur anggaran 2021 sebesar 71,5% dari total pagu.

### 2.1.1 Pagu Anggaran Pendapatan APBD 2021 Meningkat

**Pagu anggaran pendapatan dalam APBD 2021 meningkat didorong oleh proyeksi penerimaan yang lebih tinggi dari 2020.** Proyeksi kenaikan penerimaan APBD 2021 didorong oleh optimisme pemerintah terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat hingga 29,3% dari pagu anggaran 2020. Seiring dengan harga komoditas internasional yang meningkat dan mengindikasikan ekonomi global kembali pulih, maka PPh non-migas diyakini akan membaik. Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah meyakini bahwa optimisme masyarakat akan kembali pulih. Sehingga akan terdapat peningkatan konsumsi yang kemudian berdampak secara langsung bagi PPN dan PPnBM.

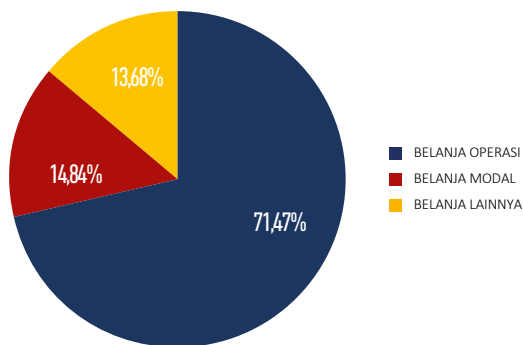
Target PAD yang semakin optimis membuat Derajat Otonomi Fiskal (DOF)<sup>2</sup> Pemerintah Daerah se-Sumatera



**Grafik 2.3** Proporsi Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

1 Merupakan APBD konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota di Sumatera Utara

2 DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiskal untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.4** Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

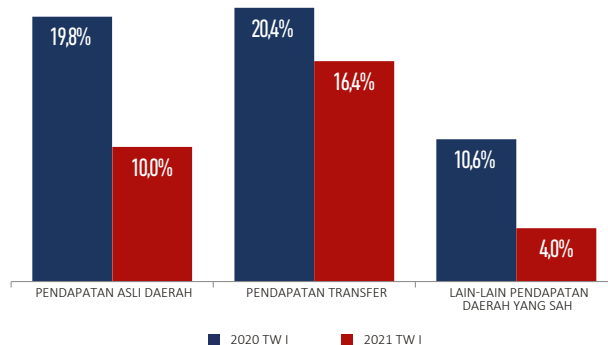
Utara meningkat, dari 18,6% pada pagu 2020 menjadi 22,6% pada pagu 2021.

### 2.1.2 Pagu Anggaran Belanja APBD 2021 Meningkat

**Pagu anggaran belanja APBD 2021 di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan 2020.**

Pagu anggaran belanja naik 6% dibandingkan dengan tahun 2020, dari Rp54,6 triliun menjadi Rp57,8 triliun. Komponen terbesar pagu anggaran belanja operasi, yakni Rp41,3 triliun atau 71,5% dari total anggaran belanja. Sementara peningkatan pertumbuhan pagu terbesar terjadi pada anggaran belanja modal sebesar 47,8%. Sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur dan optimisme perbaikan kondisi ekonomi, maka Pemerintah optimis terhadap peningkatan konsumsi pemerintah pada tahun 2021. Adapun belanja operasi dan belanja modal memberikan andil yang cukup besar untuk pagu anggaran 2021 yakni masing-masing sebesar 21%.

**Anggaran belanja lainnya, yang terdiri dari belanja tak terduga, belanja transfer, dan jenis belanja lainnya turun signifikan.** Berdasarkan kontribusinya, belanja transfer memegang fungsi dominan dalam porsi belanja lainnya. Berdasarkan diskusi terfokus dengan BPKAD, anggaran belanja tak terduga pada tahun 2020 yang semula digunakan untuk penanganan COVID-19, kemudian dialihkan sesuai dengan posnya pada tahun 2021 yaitu belanja transfer.



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.5** Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I-2020

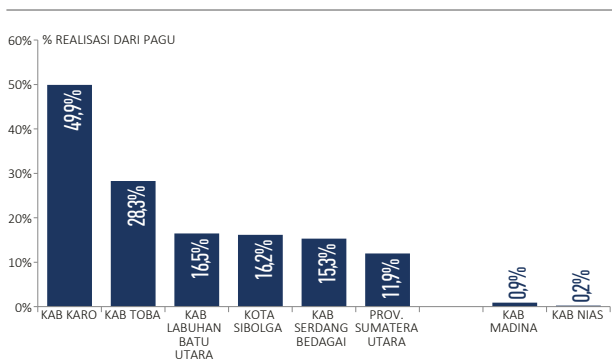
## 2.2 REALISASI APBD TRIWULAN I-2021 MELAMBAT

### 2.2.1 Seluruh Komponen Realisasi Pendapatan Melambat

**Realisasi pendapatan pada triwulan I-2021 melambat menjadi 14,6%.** Sebagaimana pola historisnya, konsumsi pemerintah triwulan I-2021 lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 93,8% , maupun dari triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,6%. Realisasi pendapatan APBD triwulan I-2021 yang kurang optimal diidentifikasi berasal dari seluruh komponen, yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Realisasi penerimaan turun paling dalam pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun 9,7% dari tahun sebelumnya.** Secara spasial, realisasi PAD berasal dari Kab. Karo sebesar 49,9% dari pagu pendapatan Pemkab Karo, sementara realisasi terkecil berasal dari Kab. Nias yang hanya sebesar 0,23%. Adapun secara umum, penurunan PAD sejalan dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah, seperti kebijakan pemerintah pusat terkait PPN 0% dan Permendagri No. 1 Tahun 2021 terkait penurunan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dari sebelumnya pada Permendagri No. 56 Tahun 2020 hingga 2%-3%.



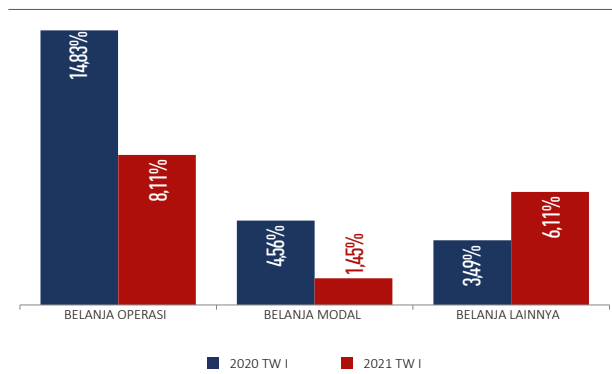


Sumber: BPKAD & DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.6** Pemda dengan Realisasi PAD Terbesar

**Pendapatan transfer merupakan kontributor tertinggi penerimaan daerah triwulan I-2021 dengan pangsa sebesar 83,5%.** Namun demikian, realisasi penerimaan transfer belum optimal dan tumbuh sebesar 16,4%, lebih rendah dibandingkan pencapaian realisasi penerimaan transfer pada APBD triwulan I-2020 sebesar 20,4%. Berdasarkan data dari Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penerimaan transfer terbesar berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dengan porsi sebesar 98,6%, sementara sisanya berasal dari Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah. Terkonfirmasi dari hasil diskusi terfokus dengan BPKAD Provinsi Sumatera Utara, penerimaan pendapatan transfer melambat dari tahun sebelumnya disebabkan oleh tertahannya penyaluran pendapatan transfer dari pusat ke daerah.

**Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat turut melambat.** Walaupun pagu pada pos pendapatan turun hingga -48,2%, realisasi pada triwulan I-2021 masih melambat dengan perubahan realisasi sebesar -6,6% dibandingkan realisasi triwulan I-2020. Meskipun demikian, pangsa lain-lain pendapatan daerah yang sah cukup kecil terhadap total realisasi pencapaian APBD triwulan I-2021 yakni sekitar 0,9%.



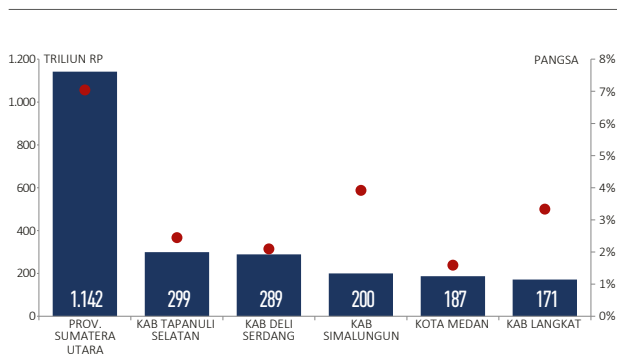
Sumber: BPKAD & DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.7** Realisasi Belanja APBD Triwulan I-2021

## 2.2.2 Realisasi Belanja APBD Triwulan I-2021 di Bawah Target

**Realisasi belanja APBD triwulan I-2021 mengalami penurunan pada seluruh pos belanja, kecuali pos belanja lainnya.** Realisasi belanja APBD triwulan I-2021 sebesar Rp3,99 triliun atau 6,9% dari pagu. Jumlah tersebut lebih rendah daripada realisasi APBD pada triwulan I-2020, yakni Rp5,58 triliun atau 10,2% dari target. Realisasi anggaran melambat didorong oleh penurunan realisasi belanja operasi dan belanja modal. Di sisi lain, adanya proses adaptasi implementasi sistem yang baru, yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), menyebabkan pencatatan belanja yang harus diadministrasikan belum optimal. Berdasarkan diskusi terfokus diperoleh informasi bahwa implementasi SIPD dinilai Pemerintah Daerah masih dapat dioptimalkan dari sisi teknis.

**Realisasi belanja operasi di bawah target dengan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,7%.** Pada triwulan I-2021, belanja pegawai terealisasi Rp3,3 triliun atau 8,11% dari pagu. Pencapaian ini lebih rendah daripada triwulan I-2020 sebesar Rp4,7 triliun atau 14,8% dari pagu. Diindikasikan perlambatan belanja terutama belanja barang dan jasa disebabkan oleh proses tender proyek yang baru dimulai di bulan Februari 2021. Selain itu, perjalanan dinas juga masih dilakukan secara terbatas. Sehingga meskipun porsi realisasi belanja pegawai sebesar 86%, terbesar diantara pos belanja operasi lainnya, bila dibandingkan dengan triwulan I-2020 yakni periode sebelum



Sumber: BPKAD & DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.8** Pemda dengan Realisasi Terbesar Belanja APBD Triwulan I-2021

pandemi COVID-19 di Sumatera Utara, maka realisasi belanja operasi melambat.

**Realisasi belanja modal melambat.** Berdasarkan pagu, belanja modal mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan persentase perubahan pagu mencapai 47,8%. Diyakini tahun 2021 pembangunan proyek dapat dimulai kembali menuju target pembangunan jangka menengah hingga 2024. Namun demikian, realisasi belanja modal pada triwulan I-2021 belum optimal dan baru terserap 1,45% dari pagu, lebih rendah dari triwulan yang sama tahun 2020 sebesar 4,56%. Hasil diskusi dengan BPKAD Provinsi Sumut menyebutkan bahwa belanja modal masih kurang optimal karena terbatasnya realisasi beberapa proyek. Di sisi lain, pemborong di Sumatera Utara cenderung tidak menggunakan sistem *Down Payment* (DP) atau pembayaran berkala, sehingga realisasi belanja modal umumnya baru terealisasi menjelang akhir tahun.

**Sementara itu, realisasi belanja lainnya pada triwulan berjalan lebih optimal.** Realisasi APBD triwulan I-2021 berada di atas target, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada triwulan berjalan, pencapaian realisasi belanja lainnya sebesar 6,11%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 pada triwulan yang sama sebesar 3,49%. Hal ini sejalan dengan perubahan pagu pada pos belanja lainnya yang turun hingga -50,3% diduga dampak pengurangan pos belanja tak terduga yang dialihkan ke pos belanja yang lain. Secara nominal, realisasi belanja lainnya pada triwulan I-2021 sebesar Rp524,3 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp603,2 miliar. Realisasi belanja lainnya secara nominal turun diduga karena penyaluran perlindungan sosial PEN dari Pemerintah Pusat tidak disalurkan melalui dana APBD, melainkan dilakukan oleh KPPN Jakarta VII langsung kepada bank penyalur untuk diterima oleh rekening penerima.

**Berdasarkan spasial, Pemda dengan realisasi belanja terbesar mayoritas berasal dari wilayah Pantai Timur.** Pemda dengan realisasi belanja APBD pada triwulan I-2021 terbesar masih diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seiring dengan jumlah proyek pembangunan yang lebih banyak dibandingkan Pemkab/Pemkot.

**Tabel 2.1** Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2020			2021		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.822,6	1.940,5	19,8%	12.697,0	1.276,0	10,0%
PENDAPATAN TRANSFER	39.395,6	8.043,8	20,4%	41.568,8	6.835,3	16,4%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.585,2	380,8	10,6%	1.857,0	74,1	4,0%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>52.803,4</b>	<b>10.365,0</b>	<b>19,6%</b>	<b>56.122,8</b>	<b>8.185,5</b>	<b>14,6%</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara



Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Utara

URAIAN	2020			2021		
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi
BELANJA OPERASI	31.936,59	4.737,15	14,83%	41.333,27	3.351,43	8,11%
BELANJA MODAL	5.355,89	244,49	4,56%	7.913,39	114,38	1,45%
BELANJA LAINNYA	17.267,94	603,23	3,49%	8.582,60	524,29	6,11%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>54.560,41</b>	<b>5.584,88</b>	<b>10,24%</b>	<b>57.829,26</b>	<b>3.990,10</b>	<b>6,90%</b>

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara

## 2.3 PAGU BELANJA APBN<sup>3</sup> UNTUK PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 LEBIH RENDAH.

Secara keseluruhan, struktur APBN di Provinsi Sumatera Utara pada 2021 melambat. Pada tahun 2021, pagu belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara turun sebesar -5,6% dengan nominal sebesar Rp21,5 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp22,8 triliun. Untuk menghindari prinsip penghitungan ganda, realisasi APBN tidak memperhitungkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai bagian penerimaan APBD.

Komponen belanja barang dan belanja modal mendorong penurunan pagu belanja. Komponen belanja barang memiliki porsi cukup besar dalam pagu belanja APBN di Sumut yakni 34%, sementara komponen belanja modal memiliki pangsa 21,9% dari total pagu. Artinya penurunan kedua komponen ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam mendorong penurunan pagu belanja.

Belanja barang turun sebesar 12% menjadi Rp7,33 triliun dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp8,33 triliun. Pada belanja modal, persentase

penurunan sebesar -9,6%, dari tahun 2020 sebesar Rp5,21 triliun menjadi Rp4,71 triliun di tahun 2021. Penurunan pagu belanja barang dan modal terkait realokasi APBN secara terpusat yang akan difokuskan untuk penanganan COVID-19.

## 2.4 REALISASI BELANJA APBN PADA TRIWULAN I-2021 LEBIH OPTIMAL

Realisasi belanja APBN di Sumatera Utara pada triwulan I-2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja APBN pada triwulan berjalan tahun 2021 sebesar 15,2% dari pagu atau lebih tinggi daripada triwulan I-2020 sebesar 13,3% dari pagu. Terdapat optimalisasi belanja pada belanja modal dan belanja bantuan sosial. Sementara belanja operasi terutama jenis belanja pegawai meningkat terbatas. Bila diamati secara bulanan, optimalisasi belanja terjadi pada bulan Maret sepanjang periode triwulan I-2021.

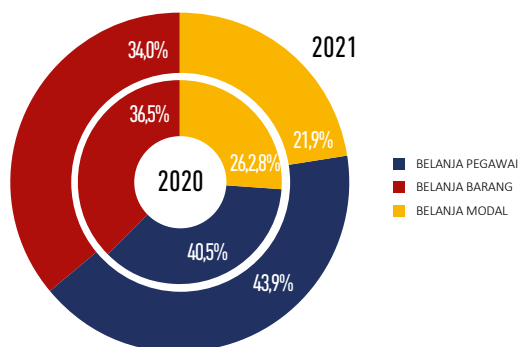
Pencapaian realisasi belanja modal meningkat signifikan. Realisasi belanja modal pada triwulan I-2021 meningkat 14,8%, lebih tinggi dari tahun

Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi Belanja APBN Berdasarkan Jenis Belanja (Tidak Termasuk TKDD)

URAIAN	2020			2021			% Growth (yoy)	
	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu (miliar Rp)	Realisasi Tw I (miliar Rp)	% Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	9.241	1.601,00	17,3%	9.460,71	1.699,76	18,0%	2,4%	6,2%
Belanja Barang	8.336	1.030,00	12,4%	7.332,35	880,37	12,0%	-12,0%	-14,5%
Belanja Modal	5.213	395,00	7,6%	4.710,75	698,25	14,8%	-9,6%	76,8%
Belanja Bantuan Sosial	30	1,00	3,3%	35,38	1,61	4,5%	16,1%	60,5%
<b>Total</b>	<b>22.820</b>	<b>3.027</b>	<b>13,3%</b>	<b>21.539</b>	<b>3.280</b>	<b>15,2%</b>	<b>-5,6%</b>	<b>8,4%</b>

Sumber : DJPb Provinsi Sumatera Utara

3 Tidak termasuk TKDD



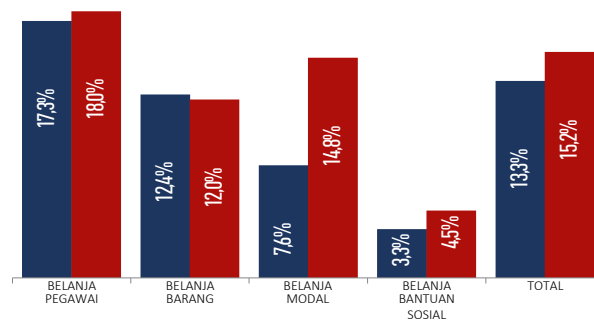
Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.9** Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara

sebelumnya sebesar 7,6%. Diindikasikan hal ini terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur padat karya antara lain dengan mendukung pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Metropolitan, dan *Food Estate*. Hal ini turut terkonfirmasi dari porsi realisasi belanja modal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 84,7% dari total belanja modal pada triwulan I-2021.

**Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan pada triwulan I-2021 mengindikasikan penyerapan yang lebih optimal.** Realisasi belanja bantuan sosial naik dari 3,3% pada triwulan I-2020 menjadi 4,5% pada triwulan berjalan atau terealisasi sebesar Rp1,61 miliar. Hal ini sebagai bukti dari fokus percepatan dan perluasan penyaluran bansos Program Sembako dan program keluarga harapan (PKH) sebagai stimulus bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dari Pemerintah Pusat. Bansos PKH yang semula dicairkan setiap 3 bulan, menjadi dicairkan per bulan selama pandemi COVID-19.

**Realisasi belanja pegawai menjadi jenis realisasi belanja operasi yang meningkat terbatas pada triwulan berjalan.** Realisasi belanja pegawai menunjukkan peningkatan menjadi 18% dari pagu atau Rp1,69 triliun, lebih tinggi dari penyerapan belanja pegawai pada triwulan I-2020 sebesar 17,3% atau Rp1,60 triliun.



Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, diolah

**Grafik 2.10** Realisasi Belanja APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Belanja

**Realisasi belanja barang melambat pada triwulan I-2021.** Realisasi belanja barang sebesar 12%, lebih rendah dari triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,4%. Adapun dari sisi kebijakan, Instruksi Gubernur No.188.54/1/INST/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan tidak melarang Pegawai Negeri untuk melakukan perjalanan dinas. Namun demikian, seiring dengan masih merebaknya pandemi COVID-19, Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah tetap membatasi pegawai untuk melakukan perjalanan dinas.





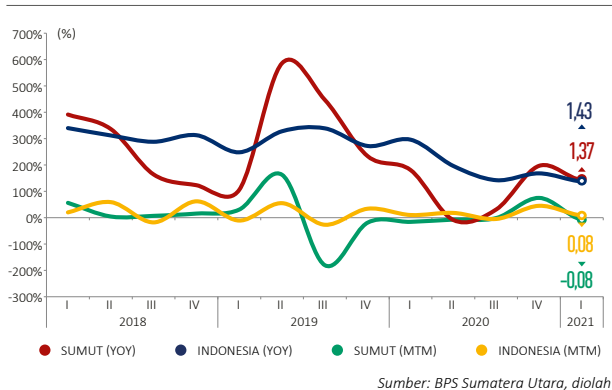


### Bab III

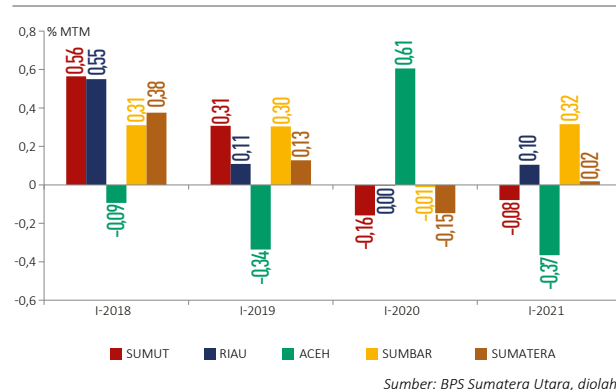
## Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 menurun, terutama didorong oleh meredanya tekanan pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini masih menjadi sumber utama tekanan inflasi meski magnitudenya menurun cukup signifikan seiring dengan normalisasi harga aneka cabai yang sempat meningkat pada akhir tahun. Selain itu deflasi aneka bawang karena melimpahnya pasokan bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah dan impor bawang putih dari Tiongkok juga turut mendorong penurunan laju inflasi pada triwulan laporan. Adapun tekanan inflasi bersumber dari minyak goreng, akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional. Sejalan dengan itu, ikan asin teri dan tomat jugat turut menyumbang inflasi akibat penurunan pasokan, imbas gangguan cuaca yang mengganggu aktivitas melaut nelayan dan erupsi Gunung Sinabung. Dampaknya, inflasi pada triwulan I-2021 tercatat sebesar 1,43% (yoy), turun cukup signifikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,96% (yoy). Dengan realisasi ini, laju inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan berada di atas inflasi Nasional sebesar 1,37% (yoy) dan di bawah inflasi Sumatera sebesar 1,60% (yoy). Pada triwulan II-2021 tekanan inflasi Sumatera Utara diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan I-2021 sebelumnya, sesuai dengan pola historisnya. Peningkatan ini terutama diperkirakan bersumber dari meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sehubungan dengan naiknya permintaan masyarakat dan industri seiring dengan perbaikan ekonomi yang turut mempengaruhi harga pangan domestik.





**Grafik 3.1** Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional



**Grafik 3.2** Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Daerah Lainnya

### 3.1 TEKanan INFLASI TRIWULAN I-2021 MENURUN

Secara bulanan pada triwulan I-2021, Sumatera Utara mengalami deflasi didorong oleh penurunan yang terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Deflasi Sumatera Utara Maret 2021 tercatat -0,08% (mtm), di bawah Nasional yang tercatat 0,02% (mtm) dan Sumatera 0,08% (mtm), berbalik arah dibandingkan triwulan IV-2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,75% (mtm). Penurunan ini sesuai dengan pola historis inflasi Sumatera Utara. Ditinjau berdasarkan kelompoknya, penurunan harga terutama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang bersumber dari turunnya harga daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras. Depresiasi harga daging ayam ras dan telur ayam ras dipengaruhi oleh peningkatan pasokan yang terjadi di tengah berlangsungnya panen raya di beberapa sentra peternakan ayam pedaging dan petelur yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Asahan. Namun, melimpahnya pasokan tersebut tidak dapat terserap secara optimal oleh pasar diperkirakan terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya faktor ketersediaan pasokan yang memadai seiring telah lewatnya efek erupsi Gunung Sinabung pada awal Maret 2021 juga menyebabkan harga cabai rawit bergerak turun.

Di sisi lain, apresiasi harga bawang merah menahan laju deflasi lebih dalam, dipicu berkurangnya aliran pasokan dari Jawa Tengah akibat

dampak banjir. Sementara itu, peningkatan harga pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran turut berperan menahan penurunan deflasi lebih dalam pada triwulan laporan. Apresiasi harga terutama terjadi pada nasi dengan lauk, diperkirakan peningkatan harga terjadi akibat naiknya harga lauk pauk.

Secara tahunan, tekanan inflasi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Sumatera Utara pada triwulan laporan tercatat 1,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2020 sebesar 1,96% (yoy). Penurunan laju inflasi terutama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan I-2021, turun cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat memberikan andil inflasi hingga 1,50% (yoy). Depresiasi harga terjadi pada komoditas aneka bawang sejalan melimpahnya pasokan bawang merah dari Brebes, Jawa Tengah, dan impor bawang putih dari Tiongkok. Adapun inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga minyak goreng, ikan asin teri, dan tomat. Apresiasi harga minyak goreng masih terus berlanjut dipicu tren kenaikan harga CPO di pasar internasional. Faktor cuaca yang cukup ekstrim menjelang akhir tahun menjadi salah satu penyebab gangguan produktivitas di negara produsen CPO, termasuk Sumatera Utara sehingga terjadi keterbatasan pasokan secara global. Sejalan dengan itu, kenaikan harga ikan asin teri terjadi disebabkan penurunan pasokan



**Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan Triwulan I-2021**

INFLASI					
Januari		Februari		Maret	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
Emas Perhiasan	0,163	Emas Perhiasan	0,152	Minyak Goreng	0,155
Ikan Dencis	0,151	Ikan Dencis	0,134	Ikan Asin Teri	0,112
Cabai Merah	0,146	Daging Ayam Ras	0,134	Tomat	0,111
Ikan Asin Teri	0,116	Cabai Rawit	0,109	Ikan Dencis	0,106
Cabai Rawit	0,111	Ikan Asin Teri	0,092	Emas Perhiasan	0,096

DEFLASI					
Januari		Februari		Maret	
Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)	Komoditas	Andil (%yoy)
Air Kemasan	-0,048	Biaya Pulsa Ponsel	-0,084	Air Kemasan	-0,051
Bawang Putih	-0,050	Bawang Merah	-0,088	Angkutan Udara	-0,069
Biaya Pulsa Ponsel	-0,084	Angkutan Udara	-0,096	Bawang Merah	-0,073
Bawang Merah	-0,097	Bawang Putih	-0,126	Biaya Pulsa Ponsel	-0,084
Angkutan Udara	-0,159	Cabai Merah	-0,156	Bawang Putih	-0,107

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

seiring aktivitas melaut nelayan yang masih terbatas karena faktor kekhawatiran musim hujan yang belum sepenuhnya berakhir. Sedangkan apresiasi harga tomat dipengaruhi belum pulihnya hasil tanam sayuran terutama dari Kabupaten Karo, akibat dampak erupsi Gunung Sinabung.

**Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan serta Transportasi masih menjadi penahan laju inflasi utama pada triwulan I-2021**, dengan sumbangan deflasi masing-masing sebesar -0,09% (yoy) dan -0,02% (yoy). Sumber deflasi pada kelompok ini terutama berasal dari penurunan biaya pulsa ponsel dan jasa angkutan udara. Situasi pandemi COVID-19 berdampak pada persaingan para operator seluler untuk menghadirkan paket data dengan harga yang terjangkau. Hal ini diperkirakan memicu penurunan harga biaya pulsa ponsel. Sejalan dengan itu, tarif angkutan udara juga masih menunjukkan penurunan harga diperkirakan karena masih terbatasnya permintaan atas jasa angkutan udara seiring dengan pembatasan mobilitas antar daerah selama masa pandemi COVID-19. Hal ini mendorong

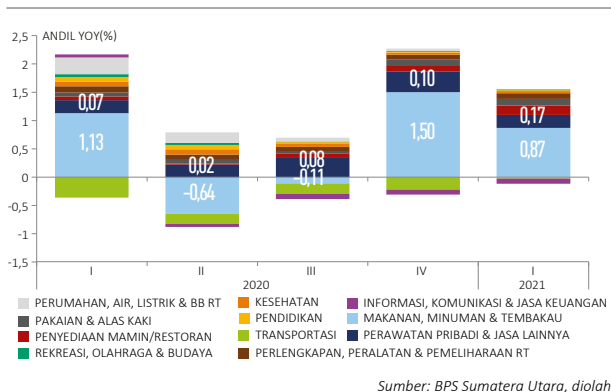
maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Jika dilihat secara spasial, **penurunan tekanan inflasi terjadi di seluruh kota IHK di Sumatera Utara**, mencerminkan disparitas antara wilayah relatif minim. Penurunan tekanan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Gunungsitoli, dari inflasi sebesar 5,32% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 3,22% (yoy) pada triwulan I-2021. Sementara penurunan tekanan inflasi paling rendah terjadi di Pematangsiantar, dari inflasi sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 2,61% (yoy) pada triwulan I-2021.

### 3.2 KELOMPOK MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU PENYUMBANG INFLASI UTAMA

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi tertinggi pada triwulan I-2021.** Ditinjau berdasarkan kelompoknya penyumbang utama inflasi tahunan pada triwulan





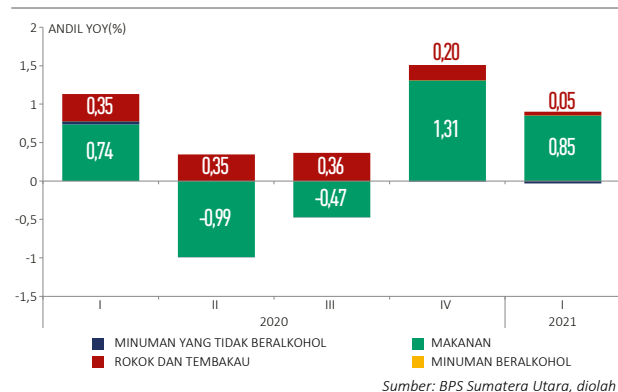
**Grafik 3.3** Distribusi Andil Inflasi per Kelompok

I-2021 dicatatkan oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 0,87% (yoy), diikuti oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,23% (yoy), kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,17% (yoy), kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,11%, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,10% (yoy), kelompok Kesehatan 0,04% (yoy), kelompok Pendidikan 0,02% (yoy), dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0,01% (yoy).

Di sisi lain kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, kelompok Transportasi, dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami penurunan dan menahan laju inflasi lebih lanjut. Pada triwulan I-2021 ketiga kelompok ini memberikan andil deflasi masing-masing sebesar -0,09% (yoy), -0,02% (yoy), dan -0,01% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV-2020 tercatat ketiganya memberikan sumbangan -0,09% (yoy), -0,22% (yoy), dan 0,05% (yoy).

### 3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau Memberikan Andil Inflasi Terbesar

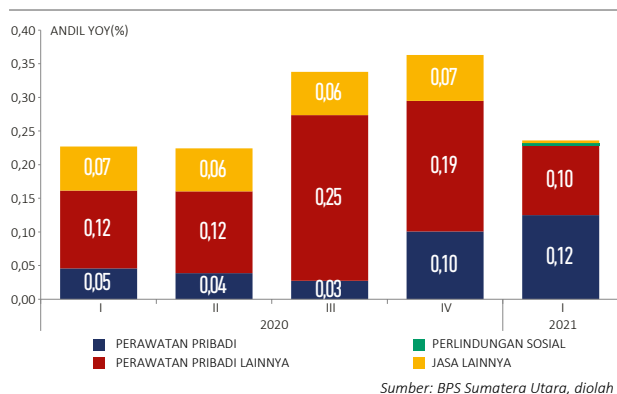
**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi terbesar pada triwulan I-2021 sebesar 0,87% (yoy), turun dari triwulan IV-2020 yang tercatat menyumbang sebesar**



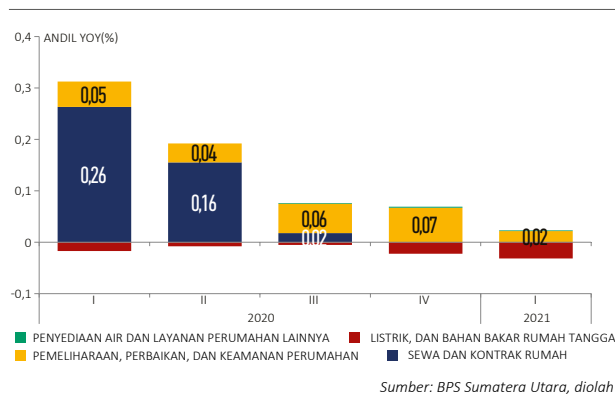
**Grafik 3.4** Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

**1,50% (yoy).** Tekanan inflasi terutama bersumber dari subkelompok makanan antara lain minyak goreng, ikan asin teri, dan tomat. Tren kenaikan harga CPO yang masih terus berlanjut akibat keterbatasan pasokan secara global menjadi pemicu kenaikan harga minyak goreng. Sejalan dengan itu kenaikan harga ikan asin teri disebabkan penurunan pasokan seiring aktivitas melaut nelayan yang masih terbatas karena faktor kekhawatiran musim hujan yang belum sepenuhnya berakhir. Sedangkan apresiasi harga tomat dipengaruhi belum pulihnya hasil tanam sayuran terutama dari Kabupaten Karo, akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Selanjutnya subkelompok Rokok dan Tembakau juga turut mendorong tekanan inflasi lebih tinggi pada kelompok ini, terutama disumbang oleh rokok putih dan rokok kretek filter yang pada triwulan laporan masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03% (yoy) dan 0,02% (yoy). Kenaikan ini merupakan dampak dari kenaikan cukai rokok yang diberlakukan mulai awal Februari 2021.

Di sisi lain subkelompok Minuman yang Tidak Beralkohol mengalami deflasi dan menahan laju inflasi pada kelompok ini. Penurunan terutama disebabkan oleh air kemasan yang memberikan andil deflasi -0,05% (yoy). Depresiasi ini diperkirakan didorong oleh turunnya konsumsi air minum dalam kemasan selama masa pandemi COVID-19 imbas penurunan ekonomi yang signifikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.



**Grafik 3.5** Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



**Grafik 3.6** Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air & Gas

### 3.2.2 Tekanan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Menurun

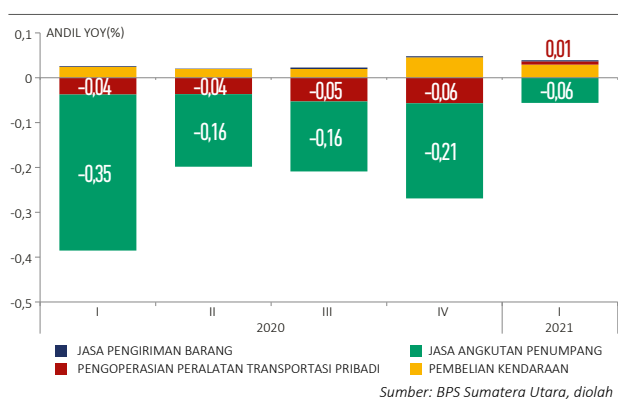
Pada triwulan I-2021 andil inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar **0,23% (yoy)**, menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar **0,36% (yoy)**. Pada triwulan I-2021 subkelompok Perawatan Pribadi dan Perawatan Pribadi Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok ini dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,13% (yoy) dan 0,10% (yoy). Adapun emas perhiasan merupakan sumber utama tekanan inflasi pada kelompok ini. Meningkatnya permintaan emas secara global khususnya pada masa pandemi COVID-19 diperkirakan mendorong kenaikan harga emas perhiasan, meski berdasarkan pantauan andil inflasinya menurun dari 0,19% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 0,10% (yoy) pada triwulan I-2021 seiring perekonomian yang berangsur membaik dan para investor mulai mengalihkan kembali investasinya ke saham. Selanjutnya *shampoo* dan sabun mandi juga turut mendorong inflasi pada kelompok ini dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (yoy) dan 0,02% (yoy). Tuntutan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 diperkirakan menjadi sebab kenaikan harga pada komoditas tersebut.

### 3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Deflasi

**Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** tercatat mengalami deflasi. Pada triwulan I-2021 kelompok ini memberikan andil deflasi -0,01% (yoy), turun secara signifikan dari triwulan IV-2020 yang tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,05% (yoy). Tren penurunan pada kelompok ini terus berlanjut. Sumber utama deflasi berasal dari subkelompok Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang pada triwulan laporan menyumbang deflasi sebesar -0,03% (yoy), sedikit lebih dalam dari triwulan IV-2020 yang memberikan andil deflasi -0,02% (yoy). Penurunan Tarif Listrik sejalan dengan program PLN yang memberikan stimulus listrik bagi pelanggan dengan daya 450 VA berupa diskon 100% dan daya 900 VA berupa diskon 50% untuk periode Januari sampai dengan Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Adapun penurunan Bahan Bakar Rumah Tangga diperkirakan dampak insentif penurunan harga gas rumah tangga melalui program PGN Sayang Ibu.

Di sisi lain subkelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/ Perumahan memberikan andil inflasi 0,02% (yoy) dan menahan penurunan deflasi lebih dalam pada kelompok ini. Sumber inflasi terutama berasal dari tukang bukan mandor sebesar





Grafik 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi

0,02% (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan upah nominal harian buruh tani nasional mulai Januari 2021.

### 3.2.4 Kelompok Transportasi Memberikan Andil Deflasi

Kelompok transportasi memberikan andil deflasi pada triwulan I-2021 sebesar -0,02% (yoy). Kelompok Transportasi menyumbang deflasi -0,02% (yoy) pada triwulan laporan, meningkat dari triwulan IV-2020 yang tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,22% (yoy). Subkelompok Jasa Angkutan Penumpang merupakan sumber utama deflasi pada kelompok ini dengan andil -0,06% (yoy), disebabkan oleh penurunan angkutan udara. Kebijakan Pemerintah dalam pembatasan mobilitas masyarakat khususnya pergerakan antar kota selama masa pandemi COVID-19 berdampak pada turunnya aktivitas penerbangan sehingga diperkirakan mendorong maskapai untuk melakukan penurunan

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kota IHK Sumatera Utara, Sumatera, dan Nasional

Kota	2019				2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	4
<b>Inflasi IHK, % mtm</b>										
Medan	0,32	1,68	-1,92	-0,28	-0,19	-0,09	-0,05	0,65	-0,03	0,04
Pematangsiantar	0,27	0,91	-1,18	0,34	-0,12	-0,13	0,29	1,47	-0,23	0,05
Padangsidempuan	0,25	1,79	-0,95	-0,13	0,53	-0,02	0,29	1,00	-0,57	0,61
Sibolga	0,24	2,25	-1,94	0,51	-0,79	0,13	0,29	1,32	-0,29	0,35
Gunung Sitoli					0,43	0,22	1,00	1,87	-0,54	0,59
Sumatera	2,04	2,94	2,86	1,86	2,25	0,69	0,66	1,90	1,60	1,94
Nasional	0,11	0,55	-0,27	0,34	0,10	0,18	-0,05	0,45	0,08	0,13
<b>Inflasi IHK, % ytd</b>										
Medan	0,24	4,61	3,86	2,43	0,53	0,58	0,35	1,76	0,03	0,07
Pematangsiantar	-0,02	2,60	1,28	1,54	0,61	0,46	0,19	2,78	0,45	0,50
Padangsidempuan	0,26	2,69	1,98	2,15	0,84	1,63	1,32	3,27	-0,47	0,14
Sibolga	-0,48	3,62	2,93	2,58	0,10	-0,27	-0,30	2,42	-0,24	0,11
Gunung Sitoli					1,00	0,88	2,50	5,32	-1,02	-0,44
Sumatera	0,16	1,81	1,67	1,86	0,55	0,65	0,48	1,90	0,25	0,34
Nasional	0,35	2,05	2,20	2,72	0,76	1,09	0,89	1,68	0,44	0,58
<b>Inflasi IHK, % yoy</b>										
Medan	0,87	6,19	4,81	2,43	1,66	-0,15	-0,18	1,76	1,25	1,58
Pematangsiantar	2,00	3,99	2,47	1,54	2,43	0,01	0,65	2,78	2,61	3,07
Padangsidempuan	2,46	4,33	3,01	2,15	2,92	1,38	1,94	3,27	1,93	2,51
Sibolga	0,78	5,39	4,02	2,58	2,52	-0,45	0,03	2,42	2,08	3,12
Gunung Sitoli					3,31	-1,74	1,91	5,32	3,22	4,57
Sumatera	0,05	0,57	-0,42	0,32	-0,15	0,05	-0,05	0,72	0,02	0,09
Nasional	2,48	3,28	3,39	2,72	2,96	1,96	1,42	1,68	1,37	1,42

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah



**Tabel 3.3** Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran

Kelompok	% Andil yoy				
	2020				2021
	I	II	III	IV	I
<b>Umum</b>	<b>1,81</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,31</b>	<b>1,96</b>	<b>1,43</b>
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,13	-0,64	-0,11	1,50	0,87
Pakaian dan Alas Kaki	0,07	0,07	0,02	0,11	0,11
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,30	0,18	0,07	0,05	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan RT	0,11	0,09	0,09	0,08	0,10
Kesehatan	0,09	0,09	0,06	0,04	0,04
Transportasi	-0,36	-0,18	-0,19	-0,22	-0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,05	-0,06	-0,09	-0,09	-0,09
Rekreasi, Olah Raga, dan Budaya	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01
Pendidikan	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	0,07	0,02	0,08	0,10	0,17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,23	0,22	0,34	0,36	0,23

Sumber : BPS Sumatera Utara, diolah

tarif tiket pesawat terbang. Di sisi lain, tarif kendaraan *online* roda dua memberikan andil inflasi 0,02% (yoy) pada subkelompok ini dan menahan deflasi lebih lanjut.

Sementara itu, subkelompok Pembelian Kendaraan dan subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi mengalami inflasi dengan andil masing-masing sebesar 0,03% (yoy) dan 0,01% (yoy) dan menahan deflasi lebih dalam pada kelompok ini. Pada awal 2021 hampir semua produk otomotif mengalami kenaikan harga diketahui dipicu oleh kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Berdasarkan pantauan, perkembangan inflasi pada kelompok Transportasi di triwulan laporan terus menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, mengindikasikan aktivitas pada sektor transportasi seperti otomotif dan maskapai penerbangan berangsur menuju perbaikan. Kenaikan tekanan inflasi sektor transportasi juga dipengaruhi oleh adanya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mendorong penjualan kendaraan bermotor.

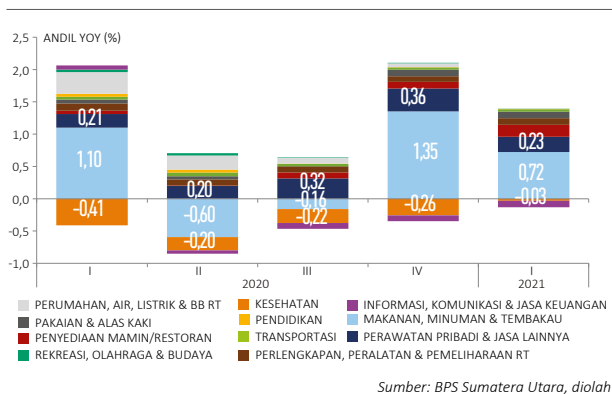
### 3.3 SECARA SPASIAL, TEKANAN INFLASI MENURUN DI SELURUH KOTA IHK

Seluruh kota IHK di Sumatera Utara mencatatkan penurunan inflasi pada triwulan I-2021. Pada triwulan laporan tekanan inflasi di seluruh kota IHK mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2020, mencerminkan disparitas antar wilayah relatif minim. Tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli tercatat sebesar 3,22% (yoy), diikuti oleh Sibolga 2,08% (yoy), Pematangsiantar 2,61%, Padangsidimpuan 1,93% (yoy), dan inflasi terendah terjadi di Medan 1,25% (yoy).

Selain mengalami tekanan paling tinggi, inflasi di Gunungsitoli mencatatkan fluktuasi yang paling besar, yakni dari inflasi 5,32% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 3,22% (yoy) pada triwulan laporan. Daerah Gunungsitoli yang berbentuk kepulauan serta sumber pangannya sebagian besar berasal dari luar daerah disinyalir menjadi penyebab tingginya fluktuasi harga di kota ini. Meski demikian karena bobotnya yang kecil dari keseluruhan nilai konsumsi Sumatera Utara yaitu hanya sekitar 1,4% sehingga tidak berdampak secara signifikan pada perhitungan inflasi Sumatera Utara secara keseluruhan. Sebaliknya Medan merupakan kota sampel IHK Sumatera Utara dengan bobot tertinggi mencapai 85% sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi di kota ini untuk turut menjaga stabilitas inflasi Sumatera Utara secara keseluruhan. Berdasarkan rilis BPS, inflasi di Medan pada triwulan I-2021 tercatat sebesar 1,25% (yoy) dan merupakan terendah di antara 5 kota sampel IHK Sumatera Utara lainnya, tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2020.

Pada triwulan I-2021, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, kelompok Transportasi, serta kelompok Perumahan Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar mengalami deflasi dan menahan laju inflasi lebih lanjut. Sumbangan deflasi yang diberikan oleh ketiga kelompok tersebut masing-masing sebesar -0,09% (yoy), -0,02% (yoy), dan -0,01% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang turut mereda juga menjadi penyebab penurunan





Grafik 3.8 Disagregasi Inflasi Kota Medan

tekanan inflasi pada triwulan laporan. Pada triwulan IV-2020 sebelumnya, kelompok ini memberikan andil inflasi mencapai 1,50% (yoy), yang pada triwulan laporan hanya menyumbang sebesar 0,87% (yoy). Adapun andil inflasi terbesar dari kelompok ini terjadi di Gunungsitoli dengan andil 2,20% (yoy), diikuti oleh Pematangsiantar 1,91% (yoy), Padangsidimpuan 1,34% (yoy), Sibolga 0,87% (yoy), dan Medan 0,72% (yoy).

### 3.3.1 Tingkat Inflasi Kota Medan Paling Rendah

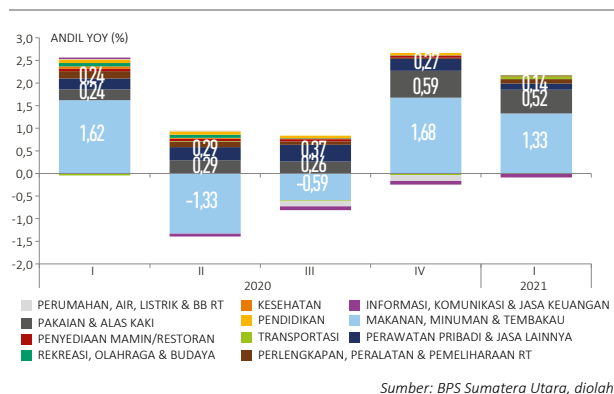
**Pada triwulan I-2021, Kota Medan mencatat inflasi 1,25% (yoy), turun dari triwulan IV-2020 yang tercatat 1,76% (yoy).** Deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan serta kelompok Transportasi menahan laju inflasi Kota Medan dengan andil masing-masing sebesar -0,10% (yoy) dan -0,03% (yoy) pada triwulan laporan, dimana pada triwulan IV-2020 tercatat sebesar -0,09% (yoy) dan -0,26% (yoy). Sumber utama deflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh penurunan biaya pulsa ponsel dan angkutan udara. Kebutuhan paket kuota internet pada masa pandemi COVID-19 yang meningkat seiring dengan tuntutan aktivitas yang dilakukan secara virtual diperkirakan mendorong operator seluler untuk menghadirkan paket kuota yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu perbaikan ekonomi yang berangsur membaik seiring dengan program vaksinasi yang mulai berjalan telah

menunjukkan indikasi positif pada industri penerbangan terlihat dari andil deflasi yang ditunjukkan semakin landai. Pada triwulan I-2021 tercatat andil deflasi angkutan udara sebesar -0,09% (yoy) meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya yang memberikan andil deflasi cukup dalam mencapai -0,22% (yoy).

Disisi lain, tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,72% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini yaitu minyak goreng dan tomat. Kenaikan minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar internasional seiring kekhawatiran atas tingkat persediaan yang rendah di negara-negara pengekspor utama akibat rendahnya produktivitas. Sementara itu, apresiasi harga tomat merupakan dampak dari erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang mempengaruhi produktivitas hasil tanam sayuran. Selanjutnya kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga turut berperan menyumbang inflasi sebesar 0,23% (yoy), dengan komoditas utama emas perhiasan. Kenaikan komoditi ini dipicu oleh kenaikan harga emas global dampak meningkatnya permintaan emas sebagai komoditi investasi di tengah kondisi pandemi COVID-19.

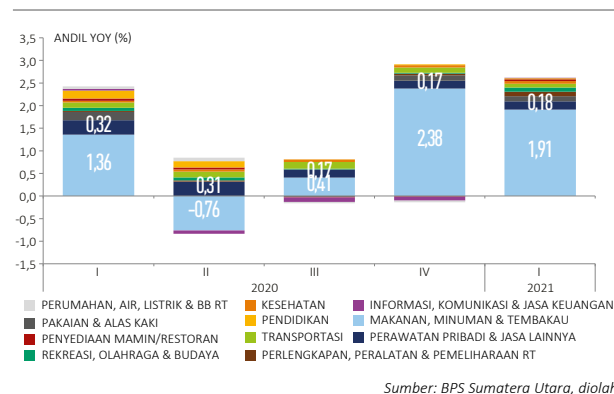
### 3.3.2 Tekanan Inflasi Kota Sibolga Mereda

**Tekanan inflasi Kota Sibolga pada triwulan I-2021 mereda.** Pada triwulan I-2021 Kota Sibolga mengalami inflasi sebesar 2,08% (yoy), menurun dari triwulan IV-2020 yang tercatat 2,42% (yoy). Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Lainnya menjadi penahan inflasi utama Kota Sibolga pada triwulan laporan dengan andil masing-masing sebesar -0,08% (yoy) dan -0,01% (yoy), yang mana pada triwulan IV-2020 menyumbang deflasi masing-masing sebesar -0,08% (yoy) dan -0,13% (yoy). Adapun sumber deflasi pada kelompok ini terutama berasal dari biaya pulsa ponsel. Penurunan biaya pulsa ponsel oleh berbagai operator diduga dalam rangka penyediaan paket kuota yang terjangkau seiring peningkatan permintaan selama masa pandemi COVID-19.



Grafik 3.9 Disagregasi Inflasi Kota Sibolga

Sementara itu, tekanan inflasi di Kota Sibolga terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil mencapai 1,33% (yoy) pada triwulan laporan, menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat memberikan andil 1,68% (yoy). Kelompok lainnya yang turut menyumbang inflasi yaitu kelompok Pakaian dan Alas Kaki serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,52% (yoy) dan 0,14% (yoy). Beberapa komoditas utama sumber inflasi di Sibolga yaitu cabai merah, minyak goreng, dan ikan asin teri. Kenaikan harga cabai merah hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia diduga sebagai akibat cuaca ekstrem yang mengganggu produktivitas di daerah sentra bahkan terjadi gagal panen di beberapa daerah sehingga pasokan dari petani kepada pedagang tidak optimal. Di Sumatera Utara sendiri, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Langkat sebagai daerah sentra cabai merah mengalami curah hujan di atas normal pada periode triwulan I-2021. Sejalan dengan kondisi tersebut, kenaikan minyak goreng terjadi sebagai akibat kenaikan CPO global yang masih terus berlangsung. Sementara apresiasi harga ikan asin teri merupakan dampak terbatasnya produktivitas nelayan akibat kekhawatiran terjadinya cuaca ekstrem yang masih belum sepenuhnya berakhir sehingga mengganggu aktivitas melaut nelayan. Di tengah kenaikan harga yang terjadi, depresiasi sejumlah harga komoditas menahan laju inflasi lebih tinggi, terutama bawang merah dan bawang putih masing-masing memberikan andil deflasi -0,18% (yoy) dan -0,09% (yoy).



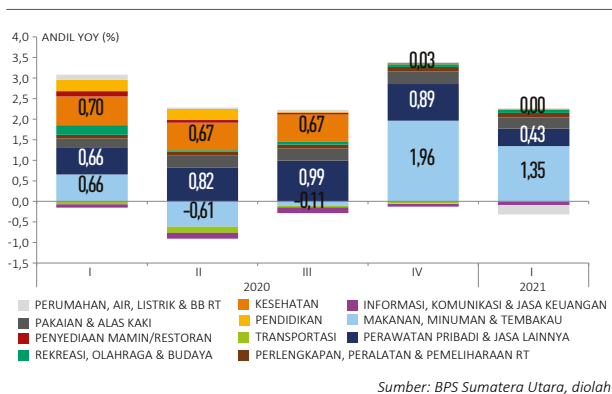
Grafik 3.10 Disagregasi Inflasi Kota Pematangsiantar

### 3.3.3 Inflasi Kota Pematangsiantar Mengalami Penurunan

**Inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kontributor utama penyumbang inflasi Kota Pematangsiantar pada triwulan I-2021, meskipun cenderung mengalami penurunan.** Pada triwulan I-2021, Kota Pematangsiantar mengalami inflasi 2,61% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan IV-2020 sebesar 2,78% (yoy). Inflasi pada triwulan laporan terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi mencapai 1,91% (yoy), turun dari triwulan IV-2020 yang memberikan kontribusi inflasi mencapai 2,38% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari daging babi, ikan asin teri, dan cabai merah. Apresiasi harga daging babi diduga terjadi karena kelangkaan imbas mewabahnya *African Swine Fever* (ASF). Akibatnya, populasi ternak babi di daerah sentra Sumatera menurun dan berpengaruh pada penyediaan daging babi di Sumatera termasuk Sumatera Utara. Sementara itu kenaikan harga pada ikan asin teri dan cabai merah merupakan dampak dari cuaca ekstrem yang terjadi pada triwulan I-2021, dampaknya produktivitas cabai merah dan aktivitas melaut nelayan terganggu, sehingga terjadi keterbatasan pasokan di pasar.

**Di sisi lain bawang putih mengalami penurunan harga seiring pasokan yang mulai terpenuhi dampak impor bawang putih dari China yang telah**





Grafik 3.11 Disagregasi Inflasi Kota Padangsidempuan

memenuhi pasar-pasar Indonesia sejak Maret 2021. Hal ini turut menahan kenaikan inflasi lebih lanjut di Kota Pematangsiantar. Adapun dari kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Lainnya juga masih dalam tren penurunan memberikan andil deflasi sebesar -0,08% (yoy), dengan komoditas utama biaya pulsa ponsel. Meningkatnya permintaan paket kuota internet dengan harga terjangkau mendorong terjadinya persaingan harga antar operator seluler diduga mendorong depresiasi harga.

### 3.3.4 Penurunan Tekanan Inflasi Juga Terjadi di Kota Padangsidempuan

**Kota Padangsidempuan juga mengalami penurunan tekanan inflasi.** Pada triwulan I-2021, Padangsidempuan mengalami inflasi sebesar 1,93% (yoy), turun dari triwulan IV-2020 yang tercatat sebesar 3,27% (yoy). Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami deflasi dan menjadi faktor penahan inflasi. Pada triwulan I-2021 kelompok ini tercatat memberikan andil deflasi sebesar -0,23% (yoy), menurun tajam dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi dengan andil sebesar 0,03% (yoy). Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil -0,23% (yoy). Depresiasi harga ini diperkirakan berasal dari insentif penurunan yang diberikan oleh PGN kepada konsumen rumah tangga.

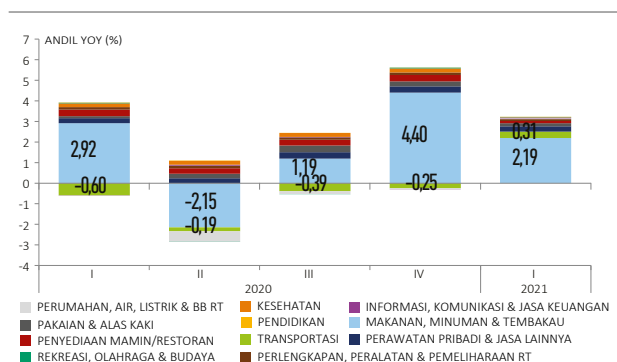
Seperti kota IHK lainnya di Sumatera Utara, **sumber tekanan inflasi di Padangsidempuan juga terutama didorong oleh kelompok Makanan,**

**Minuman, dan Tembakau** dengan andil pada triwulan laporan sebesar 1,35% (yoy), menurun dari triwulan IV-2020 yang tercatat sebesar 1,96% (yoy). Selanjutnya kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Pakaian dan Alas Kaki juga turut memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,43% (yoy) dan 0,27% (yoy). Adapun komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, aneka ikan, dan minyak goreng. Kenaikan emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya permintaan emas global untuk komoditi investasi pada masa pandemi COVID-19 memicu kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu apresiasi harga aneka ikan disebabkan oleh gangguan cuaca ekstrem yang masih belum berakhir hingga triwulan I-2021, akibatnya produktivitas menjadi terbatas karena aktivitas nelayan untuk melaut terganggu. Di tengah apresiasi harga komoditas tersebut, harga minyak goreng juga masih melanjutkan tren peningkatan didorong oleh keterbatasan pasokan CPO secara global akibat minimnya produktivitas dampak cuaca ekstrem yang terjadi pada tahun 2020.

### 3.3.5 Inflasi Tertinggi di Kota Gunungsitoli

**Tekanan inflasi di kota Gunungsitoli tertinggi di Sumatera Utara.** Sejak ditetapkannya kota IHK baru ini pada awal 2020 lalu, Gunungsitoli sering memperoleh predikat sebagai kota dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara. Pada triwulan I-2021, Gunungsitoli mengalami inflasi tahunan sebesar 3,22% (yoy), menurun tajam dari triwulan IV-2020 yang tercatat inflasi hingga 5,32% (yoy). Meski demikian karena bobot kotanya yang kecil yaitu hanya sekitar 1,4% dari nilai konsumsi sehingga tingginya tekanan inflasi di kota ini tidak berdampak secara signifikan dalam menentukan arah inflasi Sumatera Utara secara keseluruhan.

Sumber inflasi di Gunungsitoli didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 2,19% (yoy) pada triwulan laporan, turun dari triwulan IV-2020 yang tercatat memberikan andil inflasi hingga 4,40% (yoy). Kelompok lainnya yang juga turut memberikan



Grafik 3.12 Disagregasi Inflasi Kota Gunungsitoli

kontribusi inflasi antara lain kelompok Transportasi serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil masing-masing sebesar 0,31% (yoy) dan 0,26% (yoy).

Sumbangan inflasi di Gunungsitoli terutama dipicu oleh kenaikan harga daging babi, kelapa, dan angkutan udara. Setelah setahun wabah demam babi afrika (*african swine fever/ASF*) melanda, Sumatera Utara mengalami krisis pasokan. Populasi daging babi anjlok dari mulanya sekitar 1,2 juta ekor menjadi kurang dari 200.000 ekor. Akibatnya harga daging babi meroket cukup tajam, tercatat pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 86,66% atau dengan andil 1,15% (yoy). Sementara apresiasi harga kelapa dipicu oleh tingginya permintaan di tengah keterbatasan pasokan dari petani akibat sebagian besar petani memanen kelapanya untuk dijadikan kelapa muda. Selanjutnya sejalan dengan perbaikan perekonomian seiring dengan telah dimulainya

program vaksinasi, sektor transportasi telah berangsur membaik diindikasikan dari angkutan udara yang telah memberikan andil inflasi sebesar 0,27% pada triwulan laporan, yang mana pada triwulan IV-2020 sebelumnya masih tercatat deflasi dengan andil -0,31%. Adapun transportasi udara merupakan salah satu akses utama untuk mencapai Kota Gunungsitoli yang merupakan daerah Kepulauan.

### 3.4 TRACKING INFLASI

#### 3.4.1 April 2021 Sumatera Utara Mengalami Inflasi

Pada April 2021 Sumatera Utara tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm) dan 1,80% (yoy), berbalik arah naik dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi -0,08% (mtm). Secara spasial, seluruh Kota IHK mengalami peningkatan tekanan inflasi secara bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Padangsidempuan mencapai 0,60% (mtm) diikuti oleh Gunungsitoli 0,59% (mtm), Sibolga 0,35% (mtm), Pematangsiantar 0,05% (mtm), dan inflasi terendah terjadi di Medan tercatat sebesar 0,03% (mtm). Sumber utama inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga bensin, cabai merah, dan emas perhiasan. Apresiasi harga bensin sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk menaikkan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang berlaku mulai 1 April 2021, berdampak pada naiknya harga jual BBM. Selanjutnya komoditas cabai merah dan emas perhiasan juga turut memberikan andil inflasi akibat meningkatnya permintaan konsumen khususnya jelang Ramadhan. Di sisi lain tomat, daging

Tabel 3.4 Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel

Kota	Andil Inflasi (Yoy)	Mtm	Ytd	Yoy
Medan	84,60	-0,03	0,03	1,25
Pematangsiantar	6,99	-0,23	0,45	2,61
Sibolga	2,10	-0,29	-0,24	2,08
Padangsidempuan	4,91	-0,57	-0,47	1,93
Gunungsitoli	1,41	-0,54	-1,02	3,22

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Tabel 3.4 Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Sampel

No.	Medan	Sibolga	Pematangsiantar	Padangsidempuan	Gunungsitoli					
<b>Andil Inflasi Triwulan I-2021 (yoy%)</b>										
1	Minyak Goreng	0,15	Cabai Merah	0,28	Daging Babi	0,55	Emas Perhiasan	0,34	Daging Babi	1,15
2	Tomat	0,11	Minyak Goreng	0,24	Ikan Asin Teri	0,33	Ikan Asin Teri	0,25	Kelapa	0,27
3	Ikan Dencis	0,11	Ikan Asin Teri	0,21	Cabai Merah	0,22	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	0,21	Angkutan Udara	0,27
4	Emas Perhiasan	0,09	Tomat	0,20	Tomat	0,17	Ikan Dencis	0,19	Cabai Merah	0,25
5	Ikan Asin Teri	0,08	Kelapa	0,15	Sekolah Dasar	0,17	Minyak Goreng	0,18	Ikan Asin Teri	0,19
6	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	0,07	Daging Ayam Ras	0,10	Minyak Goreng	0,15	Cabai Merah	0,14	Ayam Hidup	0,18
7	Nasi Dengan Lauk	0,05	Ikan Kembang/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	0,09	Mie	0,12	Daging Ayam Ras	0,12	Minyak Goreng	0,17
8	Cabai Rawit	0,05	Semangka	0,08	Laptop/Notebook	0,09	Rokok Kretek Filter	0,12	Minyak Goreng	0,16
9	Daging Babi	0,04	Daging Babi	0,07	Rekreasi	0,09	Tempe	0,09	Tempe	0,15
10	Shampo	0,03	Emas Perhiasan	0,07	Ikan Lele	0,07	Pir	0,08	Daging Ayam Ras	0,15
No.	Medan	Sibolga	Pematangsiantar	Padangsidempuan	Gunungsitoli					
<b>Andil Deflasi Triwulan I-2021 (yoy%)</b>										
1	Bawang Putih	-0,11	Bawang Merah	-0,18	Bawang Putih	-0,11	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,23	Ikan Kembang/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	-0,19
2	Biaya Pulsa Ponsel	-0,09	Bawang Putih	-0,09	Gula Pasir	-0,11	Bawang Merah	-0,10	Gula Pasir	-0,15
3	Angkutan Udara	-0,09	Ikan Cakalang/ Ikan Sisik	-0,09	Udang Basah	-0,08	Beras	-0,09	Beras	-0,14
4	Bawang Merah	-0,07	Gula Pasir	-0,08	Biaya Pulsa Ponsel	-0,08	Kentang	-0,07	Bawang Putih	-0,13
5	Air Kemasan	-0,06	Biaya Pulsa Ponsel	-0,08	Jeruk	-0,06	Anggur	-0,06	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,12
6	Kentang	-0,04	Beras	-0,05	Bawang Merah	-0,05	Biaya Pulsa Ponsel	-0,06	Bawang Putih	-0,11
7	Kelapa	-0,04	Telur Ayam Ras	-0,05	Buah Naga	-0,05	Bawang Putih	-0,06	Biaya Pulsa Ponsel	-0,08
8	Daging Ayam Ras	-0,02	Sawi Hijau	-0,02	Kentang	-0,04	Telur Ayam Ras	-0,04	Seragam Sekolah Anak	-0,08
9	Gula Pasir	-0,02	Kentang	-0,02	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,04	Gula Pasir	-0,04	Ikan Dencis	-0,08
10	Apel	-0,02	Ikan Kape-Kape	-0,02	Ikan Kembang/Ikan Gembung/ Ikan Banyar/Ikan Gembolo/ Ikan Aso-Aso	-0,03	Air Kemasan	-0,03	Bawang Merah	-0,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah

ayam ras, dan ikan asin teri menahan laju inflasi lebih lanjut. Penurunan harga tomat diperkirakan karena rendahnya tingkat konsumsi dan permintaan masyarakat ditopang oleh melimpahnya pasokan seiring cuaca yang cukup baik selama periode April.

Sementara secara tahunan, inflasi tahunan Sumatera Utara pada April 2021 sebesar 1,80% (yoy), sedikit meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,43% (yoy) namun masih lebih rendah dari rerata 3 tahun terakhir sebesar 2,49% (yoy). Laju inflasi

pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sedikit meningkat terutama didorong oleh kenaikan cabai merah, minyak goreng, dan ikan dencis. Naiknya harga cabai merah dan ikan dencis dipicu peningkatan permintaan konsumen, khususnya ketika menjelang dan memasuki hari-hari pertama bulan Ramadhan, sesuai pola musimannya. Sementara tren kenaikan minyak goreng masih berlanjut seiring kenaikan harga CPO global dampak keterbatasan pasokan dari negara-negara pengekspor utama.

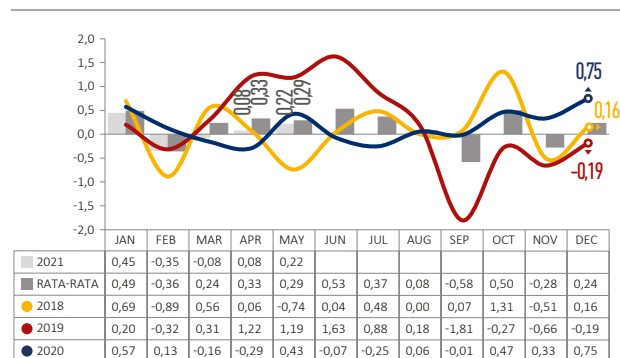


**Sementara pada Mei 2021, Sumatera Utara mengalami inflasi 0,22% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,08% (mtm).** Peningkatan ini sejalan dengan pola historisnya selama 3 tahun terakhir, meski lebih rendah dari rata-rata 0,29% (mtm). Sumber inflasi berasal dari kelompok Pakaian dan Alas Kaki terutama didorong oleh kenaikan harga baju anak, setelan, baju muslim wanita diperkirakan seiring persiapan menjelang lebaran. Di sisi lain deflasi yang terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menahan laju inflasi lebih tinggi, dipicu oleh depresiasi harga cabai merah, cabai rawit, dan sawi hijau. Melimpahnya pasokan aneka cabai menyusul cuaca yang baik di tengah penurunan permintaan konsumen usai Lebaran menjadi penyebab utama penurunan harga aneka cabai. Hal serupa terjadi pada sawi hijau yang harganya turun seiring terjaganya pasokan dan penurunan permintaan konsumen paska Idul Fitri.

### 3.4.2 Inflasi Triwulan II-2021 Diperkirakan Meningkat

**Tekanan inflasi Sumatera Utara pada triwulan II-2021 diperkirakan meningkat dari triwulan sebelumnya.** Perkiraan ini juga melihat pola historis inflasi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir. Terlihat bahwa rata-rata tekanan inflasi pada triwulan II berada pada level yang cukup tinggi di dibandingkan triwulan I. Sumber tekanan inflasi diperkirakan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi. Harga komoditas mamin dunia diperkirakan meningkat sehingga mempengaruhi perkembangan harga pangan domestik. Permintaan dari masyarakat dan industri (termasuk horeka) juga diprediksi mulai meningkat, sehingga turut mendorong kenaikan harga pangan. Namun di sisi lain melimpahnya pasokan aneka cabai memasuki masa panen raya dan didukung oleh cuaca yang baik juga diperkirakan mendorong deflasi dan berpotensi menahan laju inflasi lebih lanjut.

Selanjutnya kelompok transportasi yang selama ini mengalami deflasi dan menjadi faktor penahan inflasi juga telah menunjukkan perbaikan dengan semakin kecilnya andil deflasi yang diberikan. Angkutan



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Grafik 3.13 Historis Inflasi Sumatera Utara

udara yang telah mulai beroperasi didukung oleh pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat dan program vaksinasi disinyalir berdampak pada perbaikan jasa angkutan udara yang selama masa pandemi COVID-19 mengalami kontraksi cukup dalam dan menjadi penyumbang rendahnya tingkat inflasi. Berbagai kebijakan Pemerintah lainnya seperti pelonggaran kredit kendaraan bermotor dan kebijakan PPNBM juga diproyeksi dapat menjadi stimulus perekonomian yang turut mendorong inflasi pada triwulan II-2021.

Perbaikan perekonomian juga ditunjukkan oleh hasil Survei Konsumen (SK) yang mana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2021 berada pada level optimis (>100) yakni 105,45. Perbaikan keyakinan konsumen terutama ditopang peningkatan penghasilan menyusul pembayaran THR dan peningkatan aktivitas usaha pada Idulfitri, kendati peningkatannya terbatas dengan larangan mudik. Ekspektasi konsumen dalam 6 bulan ke depan juga lebih optimis menyusul berlanjutnya program vaksinasi dan PEN. Hasil serupa juga ditunjukkan dari Survei Penjualan Eceran (SPE) April 2021 yang mengalami penguatan dibandingkan bulan sebelumnya dari 167,54 menjadi 174,89 mencerminkan penguatan kinerja pelaku usaha ritel, menyusul peningkatan belanja masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri. Namun, pelaku usaha memprakirakan penjualan eceran akan mengalami penurunan pada Jun'21, menyusul normalisasi permintaan pasca Lebaran dan fokus prioritas konsumen pada biaya pendidikan.



Tanda-tanda pemulihan ekonomi pada triwulan II-2021 juga sudah mulai terlihat dari perbaikan kinerja kontak liaison. Permintaan domestik menguat, seiring perbaikan kinerja permintaan ekspor. Sejalan dengan itu, kapasitas utilisasi juga meningkat, meskipun pelaku usaha masih bersikap *wait and see* terhadap keputusan berinvestasi. Jumlah tenaga kerja meningkat seiring perbaikan permintaan dan harga jual, sehingga margin usaha membaik. Ke depan, pelaku usaha memprakirakan penjualan akan tetap tumbuh positif.

Berdasarkan perkembangan indikator-indikator tersebut secara keseluruhan pada triwulan II-2021 laju inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan I-2021.

### 3.5 PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

**Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID Sumatera Utara senantiasa berkoordinasi untuk menjaga stabilitas inflasi daerah.** Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui empat pilar 4K mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pada era pandemi, implementasi strategi difokuskan untuk menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu, dan kelancaran distribusi antardaerah, antara lain melalui optimalisasi digitalisasi dan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD).

Beberapa bentuk dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehubungan dengan upaya mendukung pengendalian inflasi di Sumatera Utara tersebut yaitu diterbitkannya Pergub No.9 Tahun 2020 tentang Penugasan BUMD PD. Aneka Industri dan Jasa untuk Perdagangan dan Distribusi Cabai dan Bawang. Selanjutnya persetujuan Gubernur untuk BUMD PT. Dhirga Surya untuk beras Sumut Bermartabat dan pengelolaan 2 resi gudang dari Bappebti.

Dalam kaitannya penguatan 4K, pada aspek keterjangkauan harga beberapa upaya yang dilakukan antara lain (1) Optimalisasi penyaluran bansos secara



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

**Gambar 3.1** Kegiatan Sidak Pasar Menjelang HBKN oleh TPID Sumatera Utara

tepat guna untuk menjaga daya beli masyarakat; Percepatan realisasi APBN dan APBD untuk mendorong percepatan PEN; Sidak pasar dipimpin oleh Gubernur bersama Disperindag dan TPID menjelang HBKN; Pelaksanaan pasar murah menjelang HBKN; dan Pelaksanaan operasi pasar bersama satgas pangan Kab/Kota lainnya seperti di Padangsidempuan, Batubara, Simalungun, dan Binjai menjelang HBKN.

Selanjutnya untuk aspek ketersediaan pasokan berbagai upaya TPID yang telah dilakukan antara lain menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog. Upaya penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) juga terus diupayakan. Hingga saat ini berbagai dasar hukum yang telah dimiliki untuk mendorong implementasi KAD oleh BUMD yaitu (1) Kesepakatan Bersama 10 Gubernur se-Sumatera; (2) PKS KAD antara BUMD Sumut PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dengan BUMD Riau PT. Sarana Pembangunan Riau dan Riau PT. Sarana Pembangunan Riau Trada tanggal 29 Desember 2020; (3) Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumut dengan Pemko Tanjungpinang; (4) PKS KAD antara BUMD Sumut PD. Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dengan BUMD Tanjungpinang PT. Tanjungpinang Makmur Bersama tanggal 4 April 2021; dan (5) Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumut dengan Pemko Batam; Untuk mendukung ketersediaan pasokan, Pemerintah Sumatera Utara juga telah melakukan pengembangan *Food Estate* di Humbang Hasundutan untuk komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Pengembangan kawasan hortikultura strategis (Pekan Horas Tani) juga



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

**Gambar 3.2** Kegiatan *Talkshow* Radio Belanja Bijak

dilakukan dengan membuat lahan pertanian baru dan/atau meningkatkan produksi komoditi pangan strategis di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut melalui kegiatan yang terencana dan fokus, serta didukung oleh kelompok tani yang telah ada.

Masih dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga memiliki klaster pangan yang turut menyumbang produksi komoditas pangan strategis Sumatera Utara, antara lain yaitu (1) Klaster integrasi padi-sapi, Kota Binjai; (2) Klaster integrasi padi-sapi, Kab. Langkat; (3) Klaster cabai merah, Kab. Deli Serdang; (4) Klaster cabai merah, Kab. Pakpak Bharat; (5) Klaster bawang merah, Kota Medan; dan (6) Klaster bawang merah, Kab. Toba.

Dari sisi kelancaran distribusi berbagai upaya yang telah ditempuh TPID yaitu (1) mendorong penggunaan *e-commerce* dan digitalisasi oleh UMKM untuk perluasan pemasaran; (2) Menggiatkan peran BUMD pangan untuk optimalisasi penyerapan hasil panen raya; dan (3) Memperluas kerjasama BUMD dengan koperasi, Bumdes, serta BUMD daerah lainnya baik dalam maupun luar Sumatera Utara.

Terakhir dari aspek komunikasi efektif telah dilakukan upaya antara lain (1) Sosialisasi belanja bijak menjelang HBKN Idul Fitri, berupa penayangan iklan di TVRI dan *jingle* radio belanja bijak, serta *talkshow* radio mulai dari awal Ramadhan hingga akhir Ramadhan. Komunikasi melalui media sosial dan WAG untuk senantiasa berbelanja bijak juga terus dilakukan; (2)



Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

**Gambar 3.3** *High Level Marketing* TPD se- Sumatera Utara

Optimalisasi tugas dan peran satgas pangan untuk monitoring harga dan pasokan secara intensif dan berkala; (3) Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID se-Sumatera Utara dipimpin oleh Gubernur bersama Kepala Daerah 33 Kab/Kota dalam rangka persiapan menjelang HBKN; dan Pemanfaatan aplikasi PIHPS dan Siharapanku untuk monitoring harga pangan terkini.

Dalam proses yang telah berjalan, berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Namun demikian segenap TPID dan *stakeholder* terkait terus melakukan koordinasi secara intensif agar upaya yang dilakukan dapat diimplementasikan sesuai dengan ekspektasi. Beberapa hal tersebut antara lain pengadaan *Controlled Atmospheres Storage* (CAS) oleh BUMD masih dalam proses *review* kembali untuk dapat direalisasikan dalam waktu dekat meskipun biaya untuk pengadaan CAS tersebut telah masuk dalam anggaran. Selanjutnya terkait implementasi KAD, agar dapat segera terjadinya transaksi juga masih membutuhkan perhatian lebih mempertimbangkan BUMD yang terlibat memiliki keterbatasan pengalaman untuk melaksanakan bisnis di bidang perdagangan hortikultura. Hal ini berdampak pada proses tindaklanjut PKS KAD yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak masih belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah terus berkoordinasi untuk dapat memfasilitasi BUMD terkait hingga segera terjadi transaksi di antara keduanya.






Foto : Danau Toba

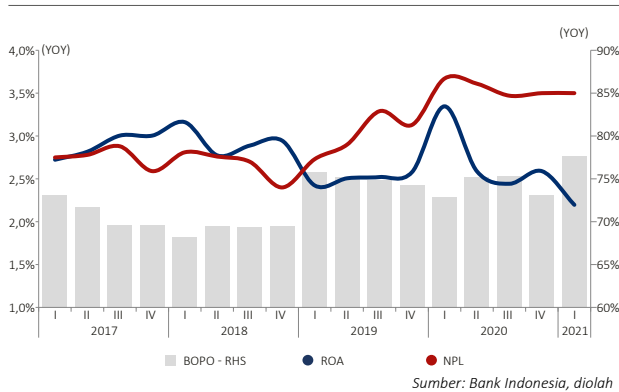


## Bab IV

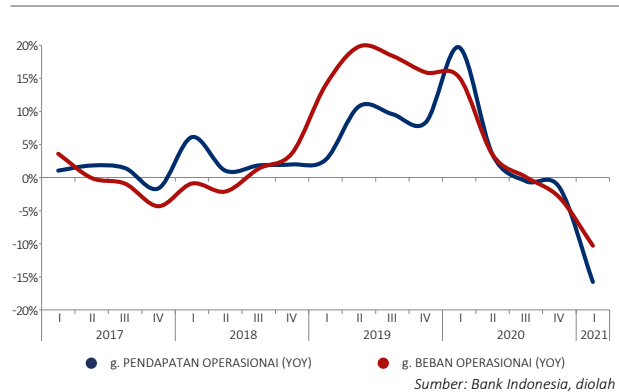
# Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Tekanan Stabilitas sistem keuangan Sumatera Utara pada triwulan I-2021 meningkat, tercermin dari tingkat profitabilitas bank yang melambat serta rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang meningkat. Meskipun demikian, risiko kredit terjaga pada level 3,5%. Penyaluran pembiayaan tercatat meningkat didorong oleh perbaikan kinerja kredit modal kerja. Hal ini merepresentasikan optimisme pelaku usaha yang mulai meningkat. Perbaikan kredit korporasi turut mengonfirmasi hal ini. Sementara itu, daya beli masyarakat yang belum kuat diindikasikan menjadi penyebab perlambatan kredit rumah tangga terutama terjadi pada kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor di tengah perbaikan KPR. Di sisi lain, DPK juga menunjukkan perlambatan pada jenis tabungan dan deposito, diindikasikan terkait dengan penurunan suku bunga perbankan dan mencerminkan masih adanya precautionary motive serta pembatasan konsumsi seiring belum usainya wabah COVID-19.





Grafik 4.1 Perkembangan Kinerja Perbankan



Grafik 4.2 Rasio BOPO Perbankan

## 4.1 KINERJA PERBANKAN TRIWULAN I-2021 KEMBALI MENCATAT KONTRAKSI

Kinerja perbankan pada triwulan I-2021 kembali kontraksi setelah sebelumnya pada triwulan IV-2020 mengalami kenaikan. *Return on Assets (ROA)* perbankan di Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tercatat 2,2% (yoy) lebih rendah daripada triwulan IV-2020 sebesar 2,6% (yoy). Rasio profitabilitas atau ROA ini merepresentasikan kemampuan perbankan untuk mencetak laba. Penurunan ROA di tengah kembali melonggarnya program restrukturisasi sejalan dengan jumlah kredit yang direstrukturisasi berangsur meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

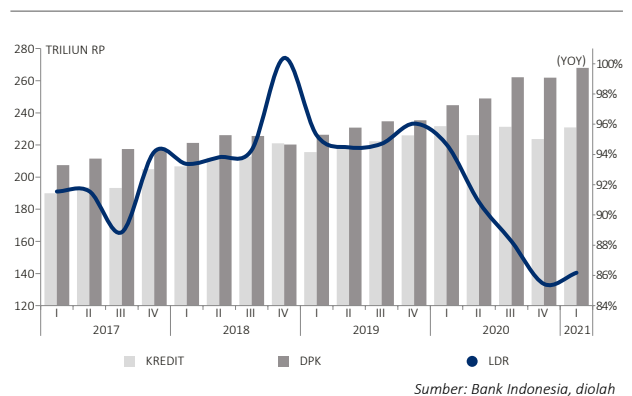
Perlambatan kinerja perbankan diikuti peningkatan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Rasio BOPO mengalami peningkatan dari 73,2% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi 77,6% (yoy) pada triwulan I-2021 mencerminkan pendapatan operasional turun lebih dalam dibandingkan biaya operasional yang diduga berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan pada kredit konsumsi. Di sisi lain, jumlah kredit restrukturisasi kembali meningkat menunjukkan bahwa program restrukturisasi kredit masih menjadi fokus preferensi bank daripada program penyaluran kredit pada triwulan I-2021.

Fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR<sup>1</sup>

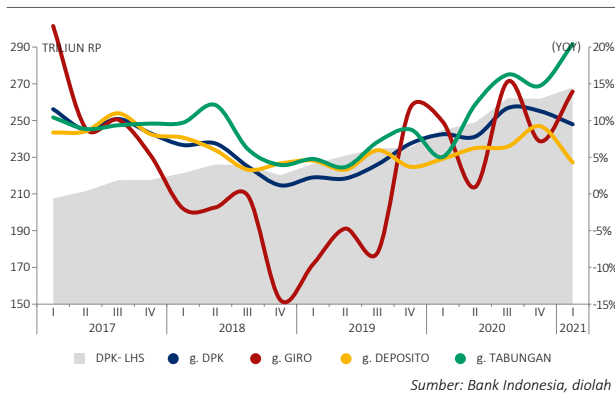
<sup>1</sup> LDR merupakan rasio intermediasi yaitu rasio antara Kredit Lokasi Proyek dibagi dengan DPK per lokasi KC di Sumatera Utara

meningkat dan berada pada kisaran 86,2%. Rasio simpanan terhadap pinjaman (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang melambat diiringi dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Meningkatnya LDR masih disertai dengan risiko yang terjaga, tercermin dari rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang tetap terjaga di level 3,5% (yoy) sejak triwulan III-2020 didukung oleh program restrukturisasi kredit.

Aset perbankan di Sumatera Utara pada triwulan I-2021 tumbuh 3,64% (yoy) sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2020 yang sebesar 3,75% (yoy). Aset perbankan di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp331 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp319 triliun. Berdasarkan kelompok bank, proporsi kepemilikan aset di Sumatera Utara cenderung stabil, yakni 51% dimiliki bank swasta nasional dan 46% dimiliki bank persero, sementara persentase aset



Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan



**Grafik 4.4** Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

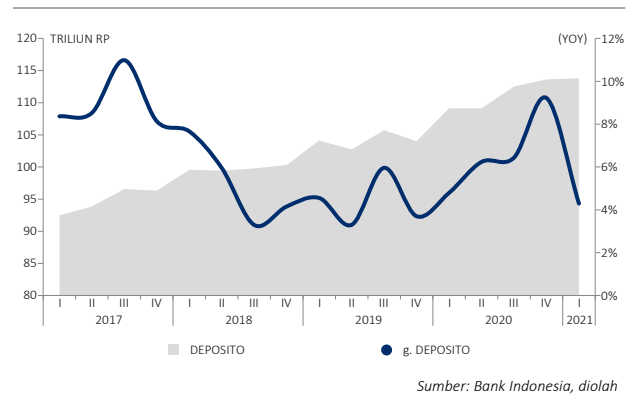
lainnya dimiliki oleh bank asing dan campuran (3%), dan bank Pemerintah Daerah (0,1%).

**Pada triwulan I-2021, penyaluran kredit lebih banyak didanai bank dari luar Sumatera Utara daripada bank di Sumatera Utara.** Kredit yang disalurkan untuk berbagai proyek di Sumatera Utara dari bank di luar Sumatera Utara pada triwulan I-2021 sebesar Rp230,9 triliun. Adapun kredit yang disalurkan bank di Sumatera Utara sebesar Rp215,6 triliun. Nilai ini menunjukkan intermediasi lebih optimal dari luar Sumatera Utara. Hal ini juga terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek yang lebih tinggi, mencapai -0,3% (yoy) dibandingkan kredit berdasarkan lokasi bank yang turun lebih dalam sebesar -4,9% (yoy).

## 4.2 INTERMEDIASI PERBANKAN MENGALAMI KONTRAKSI, NAMUN BERADA PADA RENTANG OPTIMAL

### 4.2.1 Pendanaan Perbankan Tumbuh Melambat Dibandingkan Triwulan Sebelumnya

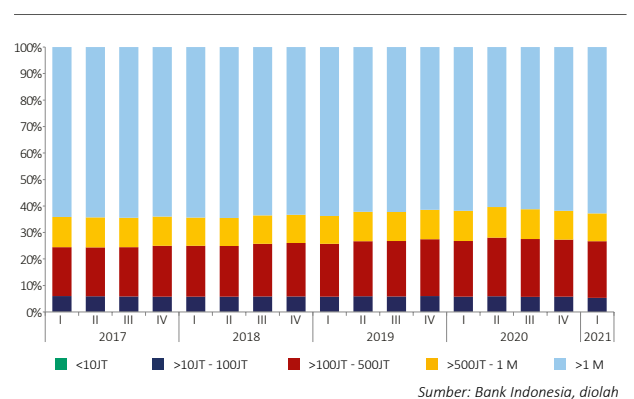
**Dana Pihak Ketiga melambat didorong perlambatan jenis deposito (pangsa 42%).** DPK mencatat pertumbuhan sebesar 9,5% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 11,3% (yoy). Penurunan tersebut terutama terjadi pada komponen deposito yang memiliki pangsa cukup besar pada DPK. Sementara, deposito dan giro meningkat



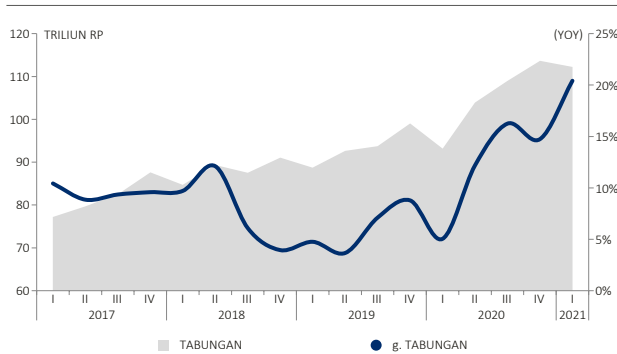
**Grafik 4.5** Pertumbuhan DPK Jenis Deposito

dibandingkan tahun sebelumnya, terutama terjadi pada giro dan tabungan milik Pemerintah disinyalir terkait dengan dana program pemulihan ekonomi nasional yang masih terus ditambah untuk disalurkan pada tahun berjalan.

**Deposito perbankan terpantau melambat menjadi 4,3% (yoy) dari 9,1% (yoy) pada triwulan sebelumnya.** Pertumbuhan deposito yang melambat diiringi dengan penurunan Suku Bunga Tertimbang sebesar 3,64%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,13%, disinyalir berkaitan dengan keinginan Pemerintah untuk mendorong masyarakat belanja. Adapun berdasarkan nilai, komponen deposito didominasi oleh depositan dengan nilai deposito >Rp 1 M (pangsa 62%) dan depositan dengan nilai deposito >Rp100 juta - Rp500 juta (pangsa 22%). Perlambatan deposito perbankan terjadi di seluruh kelompok depositan, dengan penurunan terdalam pada



**Grafik 4.6** Pangsa Deposito Berdasarkan Nilai



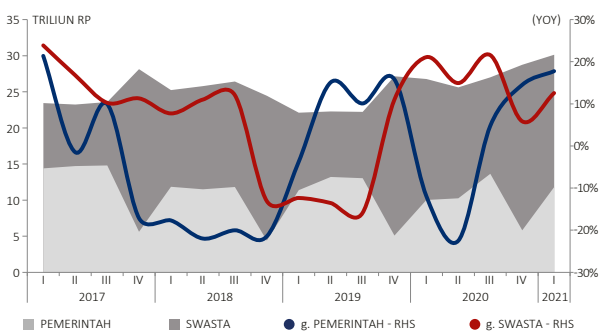
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Jenis Tabungan

kelompok depositan dengan nilai deposito < Rp 10 juta mencerminkan simpanan jenis deposito terutama dengan nominal yang kecil belum menjadi instrumen simpanan yang menarik dalam masa ketidakpastian ekonomi.

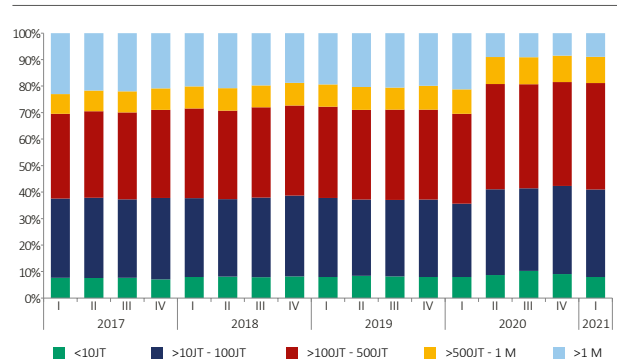
**Di sisi lain, DPK jenis tabungan tumbuh 20,4% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 14,7% (yoy).** Kenaikan terutama bersumber dari pemilik tabungan dengan simpanan Rp100 juta-Rp500 juta (pangsa 40%) sebagai dominasi pangsa tabungan. Hal ini disinyalir karena kondisi ekonomi yang tidak pasti akibat pandemi COVID-19, sehingga masyarakat menyimpan dana berupa tabungan untuk berjaga-jaga. Penurunan suku bunga DPK jenis tabungan yang tidak sedalam deposito menghasilkan respon pertumbuhan yang berbeda.

**Giro pada perbankan di Sumatera Utara juga meningkat dari 7,2% (yoy) pada triwulan IV-**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan Giro Penduduk

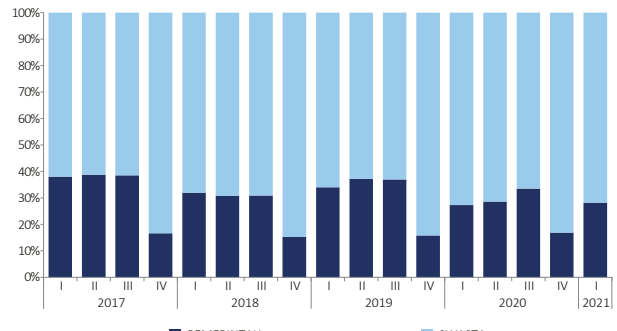


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Pangsa Tabungan Berdasarkan Nilai

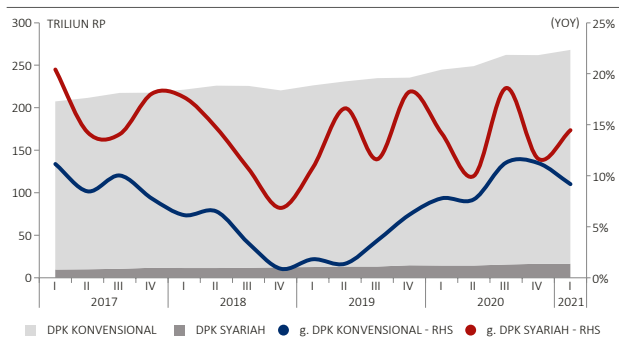
**2020 menjadi 13,9% (yoy) pada triwulan I-2021.** Pertumbuhan giro terjadi pada giro milik pemerintah (pangsa 28%) terutama Pemda dan BUMN disinyalir terkait dengan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah di awal tahun 2021. Adapun giro milik swasta (pangsa 72%) turut menunjukkan kenaikan pada seluruh segmen swasta dengan pangsa kepemilikan giro swasta terbesar berasal dari bukan Lembaga Keuangan, menunjukkan preferensi pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi bisnisnya karena konsumsi masyarakat yang lebih terbatas. Hal ini terkonfirmasi pada indikator konsumsi rumah tangga dalam PDRB yang melambat mengindikasikan preferensi masyarakat untuk menahan konsumsinya.

**Berdasarkan kegiatan bank, penghimpunan DPK di Sumatera Utara masih didominasi oleh perbankan konvensional.** DPK bank umum konvensional mendominasi struktur DPK secara keseluruhan, mencapai 94%. Sementara berdasarkan pertumbuhannya, DPK perbankan syariah meningkat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Pangsa Kepemilikan Giro



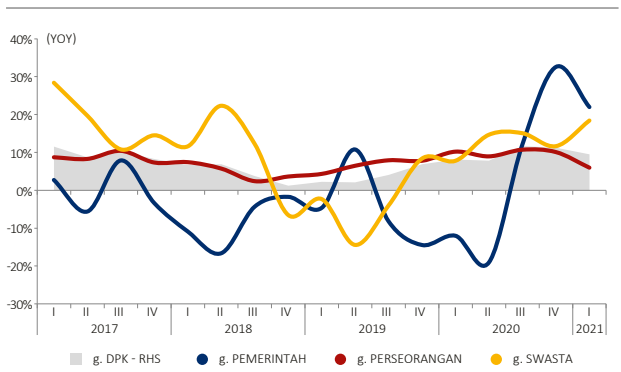
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.11** DPK Konvensional dan Syariah

dari triwulan sebelumnya sebesar 14,5% (yoy) dengan tingkat bagi hasil tidak mengalami perubahan pada posisi 12,1%. Di sisi lain, DPK perbankan konvensional melambat menjadi 9,2% (yoy) sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga menjadi 8,6%.

**Dari sisi kepemilikan, perlambatan bersumber dari penurunan penghimpunan dana milik pemerintah dan perseorangan.** DPK yang bersumber dari pemerintah tumbuh sebesar 21,9% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp 16,9 triliun lebih rendah dari triwulan IV-2020 sebesar 32,5% (yoy). Perlambatan DPK pemerintah ditengarai terkait dengan pencairan dana pemerintah yang tertahan di awal tahun. Lebih lanjut, pertumbuhan DPK perseorangan turut melambat sebesar 6%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 10,1%. Penurunan ini diduga terjadi karena peningkatan konsumsi masyarakat pada tahun ajaran baru 2021 yang tercermin dari adanya kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 76,4% dari triwulan IV-2020 sebesar 72,3%.

Di arah yang berbeda, penghimpunan dana dari pihak swasta meningkat, diperkirakan terkait dengan perilaku dunia usaha yang cenderung masih *wait and see* untuk melakukan ekspansi bisnis. Hal ini terkonfirmasi dari pertumbuhan *Likert Scale* Investasi yang melambat pada triwulan I-2021. *Likert Scale* Investasi merupakan nilai peluang investasi pada korporasi berpengaruh di Sumatera Utara yang telah disurvei oleh Bank Indonesia.



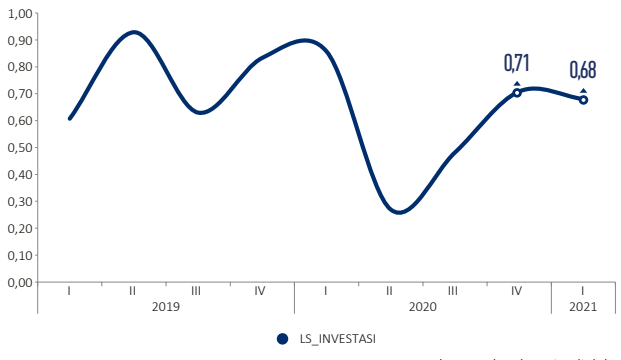
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.12** Pertumbuhan DPK Berdasarkan Jenis Nasabah

Berdasarkan golongan nasabah, mayoritas DPK di Sumatera Utara masih didominasi oleh DPK perseorangan (pangsa 71%). Sementara dana milik swasta berjumlah Rp60 triliun (23%) dan pemerintah Rp17 triliun (6%). Besarnya dana milik perseorangan mencerminkan relatif kuatnya kinerja likuiditas rumah tangga di Sumatera Utara.

**Ketertagungan perbankan Sumatera Utara terhadap deposit besar pada triwulan I-2021 cukup tinggi.** Kendati jumlah rekening nasabah dengan nilai simpanan kurang dari Rp10 juta dominan, namun simpanan terbesar berasal dari nasabah dengan simpanan di atas Rp1 miliar. Data ini merepresentasikan likuiditas perbankan tergantung pada deposit besar.

**4.2.2 Kredit Tumbuh Lebih Tinggi**  
**Penyaluran kredit perbankan di Sumatera Utara meningkat.** Kredit yang disalurkan perbankan di Sumut sampai dengan triwulan I-2021 sebesar



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.13** Likert Scale Investasi

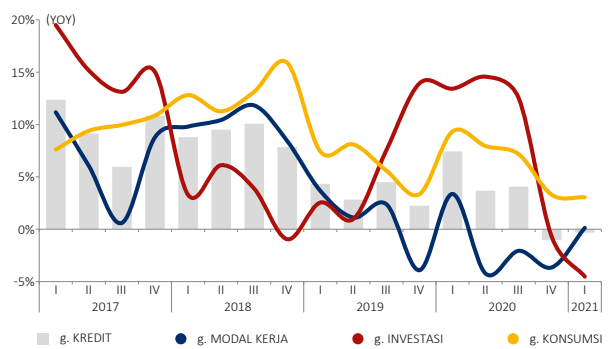
**Tabel 4.1 Pengelompokan DPK Berdasarkan Nilai**

DPK	Tw I 2021			
	Nominal (Rp Triliun)	Pangsa Nominal	Jumlah Rekening	Pangsa Jumlah Rekening
<10 JT	7,79	3%	17.974,72	91%
>10 JT - 100 JT	38,26	14%	1.398,82	7%
>100JT- 500JT	65,94	25%	283,34	1%
>500JT- 1 M	23,05	9%	31,27	0%
>1 M	132,91	50%	29,51	0%
<b>Jumlah</b>	<b>267,95</b>	<b>100%</b>	<b>19.717,65</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bank Indonesia, diolah

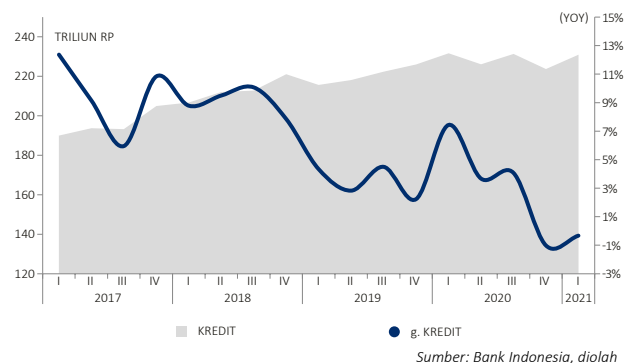
Rp230,9 triliun atau tumbuh -0,33% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar -1% (yoy) meskipun masih dalam teritori negatif. Secara struktur, kredit mayoritas disalurkan untuk kredit modal kerja (48%), disusul kredit konsumsi (27%), dan kredit investasi (25%).

**Pertumbuhan penyaluran kredit ditopang kenaikan Kredit Modal Kerja (KMK) terutama pada LU Industri Pengolahan.** Hal ini turut terkonfirmasi dari hasil diskusi terfokus dengan perbankan bahwa subsektor industri makanan dan minuman serta industri tekstil dan sandang termasuk ke dalam sepuluh sektor dengan proporsi pembiayaan terbesar pada triwulan I-2021. Hal ini disinyalir karena kedua industri tersebut merupakan industri dasar yang dibutuhkan masyarakat terutama HBKN Imlek dan menjelang bulan Ramadhan. LU Konstruksi mengalami pertumbuhan ditengarai adanya sinyal pemulihan properti, dimana Laporan Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) menyebutkan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.15 Perkembangan Kredit Berdasarkan Penggunaan**

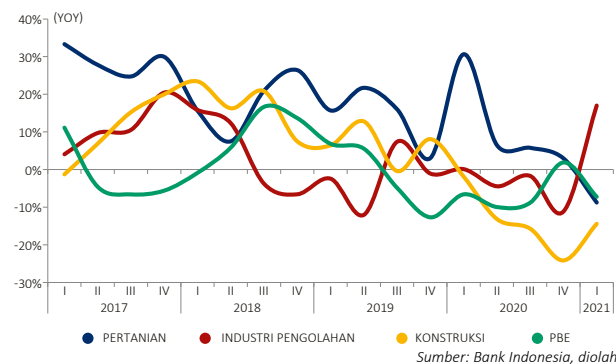


Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.14 Perkembangan Kredit**

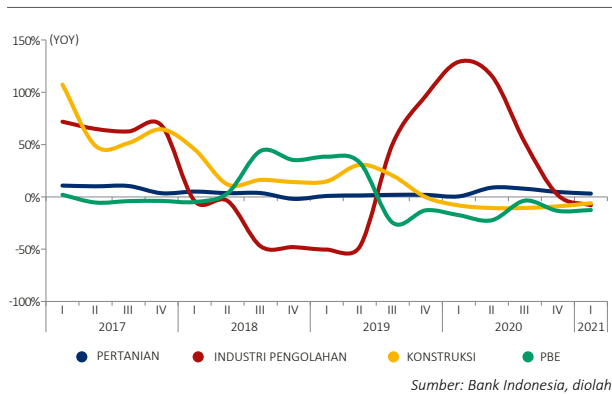
bahwa indeks suplai properti pada triwulan I-2021 tumbuh 8,4% dari triwulan sebelumnya. Sementara, penyaluran KMK untuk LU Pertanian dan PBE justru mengalami kontraksi. Permintaan kredit oleh pelaku usaha subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan diperkirakan berkurang karena harga yang sedang turun dan terjadinya deflasi berturut-turut di Sumut pada bulan Februari dan Maret 2021. Adapun kredit PBE menurun diindikasikan terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan tersier, seperti kendaraan pribadi. Secara umum, peningkatan penyaluran KMK sejalan dengan pertumbuhan kredit korporasi, mengindikasikan optimisme pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi kembali pulih.

**Penyaluran Kredit Investasi Kontraksi Lebih Dalam.** Pertumbuhan kredit investasi turun lebih dalam dari -0,7% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi -4,5% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.16 Perkembangan KMK Berdasarkan Sektoral**

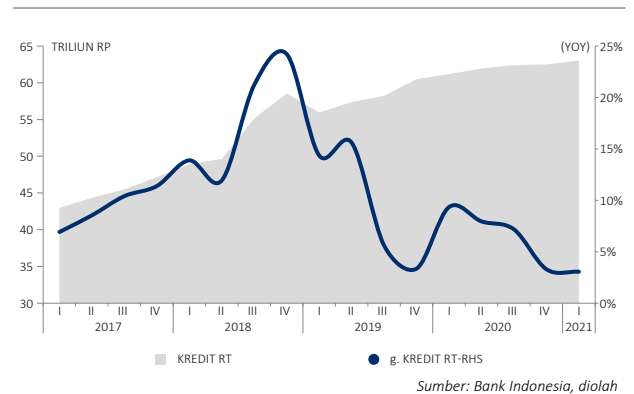


**Grafik 4.17** Perkembangan KI Berdasarkan Sektoral

pada seluruh sektor utama Sumut. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei *liaison*, dimana *likert scale* investasi pada triwulan I-2021 diproyeksi melambat, disebabkan investasi masih belum menjadi prioritas usaha dan dalam waktu dekat masih akan melakukan investasi untuk *maintenance* rutin.

**Tren penurunan kredit konsumsi masih berlanjut sejak triwulan I-2020.** Per triwulan I-2021, realisasi kredit konsumsi Rp63,1 triliun atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Kredit konsumsi melambat didorong oleh perlambatan realisasi kredit multiguna (pangsa 53%) dan kredit kendaraan bermotor (pangsa 6%). Di sisi lain, KPR (pangsa 30%) mulai menunjukkan pemulihan di setiap segmen, mencerminkan minat beli masyarakat terhadap properti.

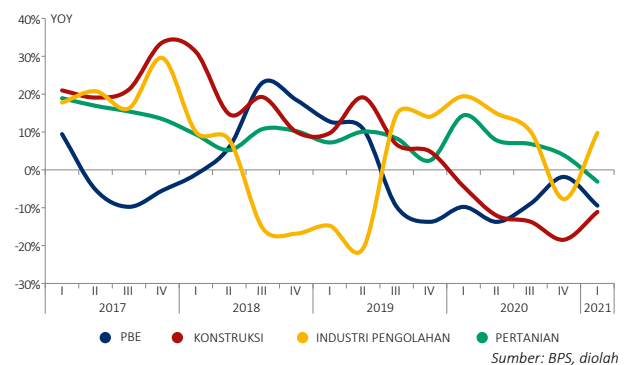
**Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh signifikan di antara kinerja LU utama lainnya.** Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi pada LU Industri Pengolahan dan Konstruksi, dengan peningkatan pada kinerja penyaluran kredit LU Industri Pengolahan meningkat tajam dari triwulan sebelumnya. Adapun kinerja LU Pertanian dan PBE mengalami kontraksi sejalan dengan perlambatan kinerja sektoral pada PDRB. Secara struktur, porsi kredit yang disalurkan ke LU pertanian, LU industri pengolahan, dan LU perdagangan besar dan eceran nyaris seimbang, masing-masing 20%, 22% dan 18%, sementara, porsi kredit LU konstruksi 3%.



**Grafik 4.18** Pertumbuhan Kredit Konsumsi

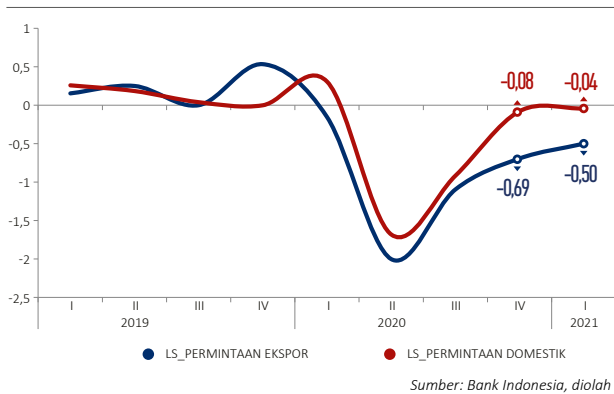
**Kinerja LU Industri Pengolahan terpantau meningkat tajam.** Pertumbuhan kredit LU Industri Pengolahan pada triwulan I-2021 menjadi 9,8% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -7,7% (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan hasil *liaison* Bank Indonesia yang mengonfirmasi bahwa permintaan domestik dan ekspor tumbuh karena kondisi ekonomi global yang kembali pulih dan harga komoditas internasional yang kembali meningkat.

**Kinerja kredit LU konstruksi tumbuh meskipun masih dalam teritori negatif.** Meskipun hasil diskusi terfokus dengan perbankan menyebutkan bahwa LU Konstruksi termasuk ke dalam sektor dengan risiko tinggi untuk dilakukan pembiayaan, penyaluran kredit LU Konstruksi pada triwulan I-2021 mampu tumbuh sebesar -11,1% (yoy). Kenaikan terutama didorong oleh kredit jenis modal kerja. Pemulihan di sektor properti turut didukung oleh minat konsumen yang membaik, diindikasikan dari jumlah pencarian properti di

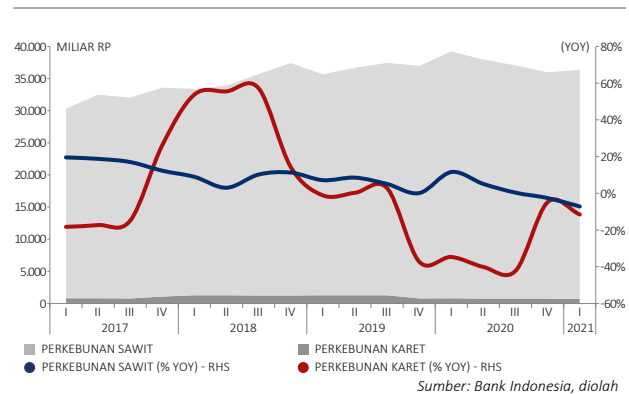


**Grafik 4.19** Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi





**Grafik 4.20** Likert Scale Permintaan Ekspor dan Domestik



**Grafik 4.21** Pertumbuhan Jumlah Rekening Kredit

situs Rumah.com pada triwulan I-2021 yang tumbuh 26% dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, penyedia properti turut melakukan koreksi harga jual untuk mengimbangi penurunan daya beli konsumen. Hal ini dilakukan dengan menyediakan unit perumahan yang berukuran kecil siap huni sehingga mendorong pembangunan di sektor properti dan meningkatkan kinerja LU Konstruksi.

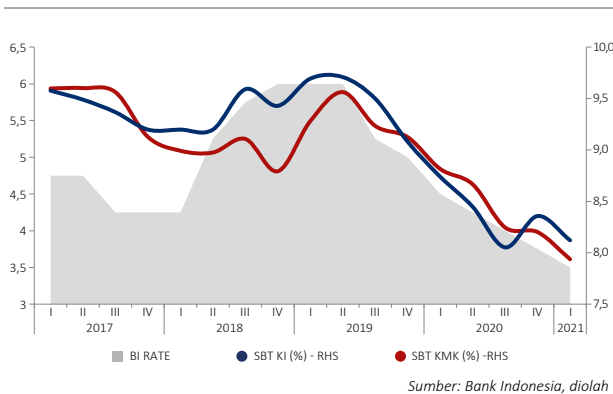
**Sementara kredit LU pertanian melambat akibat pertumbuhan kredit subsektor perkebunan kelapa sawit yang kurang optimal.** Penurunan kredit perkebunan kelapa sawit masih berlanjut sejak triwulan I-2020, dan mencapai titik terendah pada triwulan I-2021 sebesar -7,2% (yoy). Adapun penyaluran kredit pada perkebunan karet juga melambat dengan pertumbuhan sebesar -11,5% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya -4,8% (yoy). Meskipun demikian, harga komoditas CPO dan karet mengalami pertumbuhan pada triwulan I-2021 karena adanya permintaan pasar global yang tinggi pada kedua jenis produk. Sehingga diduga pemilik usaha mampu mengembangkan usahanya menggunakan modal perusahaan pribadi dan berdampak pada perlambatan kredit kelapa sawit dan karet. Di sisi lain, perlambatan kredit LU Pertanian juga disinyalir dipengaruhi oleh penurunan harga pada subsektor tanaman pangan dan peternakan pada triwulan I-2021.

**Kinerja kredit LU PBE terpantau mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.** Hal ini sejalan dengan

perlambatan PDRB sektoral PBE dan konsumsi rumah tangga. Kredit PBE berkontraksi -9,5% (yoy) lebih rendah dari triwulan sebelumnya -1,9% (yoy). Kinerja LU PBE yang melemah diduga masih belum sepenuhnya pelaku usaha percaya terhadap peningkatan kondisi ekonomi sehingga mengembangkan usahanya pada triwulan berjalan menggunakan modal sendiri. Selain itu, ketatnya daya beli masyarakat diindikasikan masih berlangsung yang ditunjukkan dari melambatnya kredit konsumsi terutama pada kredit kendaraan bermotor. Dari sisi pelaku usaha, kerugian akibat pandemi COVID-19 yang telah dirasakan pelaku usaha sejak April hingga Juni 2020 ditengarai tidak sebanding dengan besaran bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga kemampuan membayar kredit perbankan masih rendah dan berdampak pada permintaan kredit secara keseluruhan.

**Sejalan dengan penurunan BI7DRR, suku bunga kredit perbankan juga menurun.** Rerata tertimbang suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja menurun menjadi 8,1% dan 7,9% pada triwulan I-2021. Penurunan suku bunga ini sejalan dengan transmisi penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi 3,5% per Februari 2021. Penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan permintaan kredit masyarakat dan pelaku usaha.

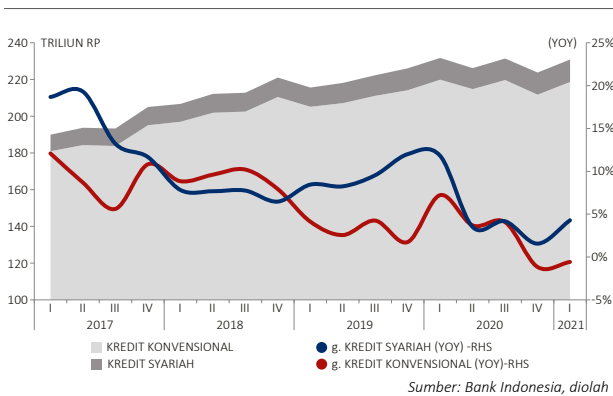
**Secara keseluruhan memasuki tahun 2021, jumlah debitur mulai stabil pada angka 1,96 juta debitur.** Lonjakan awal jumlah rekening kredit pada masa pandemi telah terlihat pada bulan ke-5



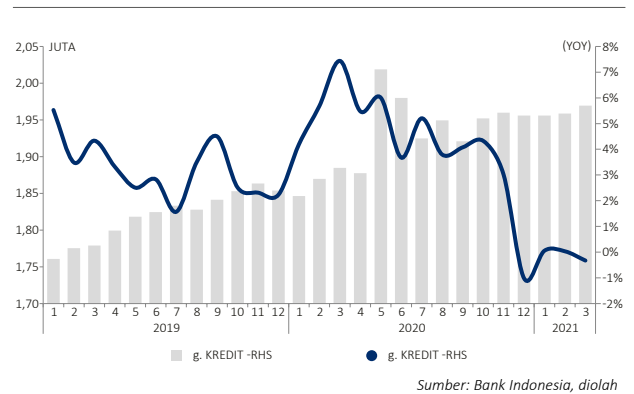
**Grafik 4.22** Suku Bunga Kredit

tahun 2020, yang kemudian mulai bergerak pada jumlah yang stabil pada triwulan IV-2020 hingga triwulan I-2021. Hal ini mengindikasikan keberhasilan Pemerintah dalam menjaga peningkatan debitur yang semakin besar dan berisiko gagal bayar, serta keberhasilan perbankan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Stimulus dari pemerintah berupa bantuan hibah modal kerja dan restrukturisasi kredit yang meningkat disyalir menjadi faktor keberhasilan jumlah debitur berada di level yang kembali stabil.

**Penyaluran kredit didominasi bank umum konvensional.** Sekitar 95% kredit perbankan di Sumut disalurkan bank konvensional. Pertumbuhan penyaluran kredit bank konvensional dan bank syariah kembali meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama pada kredit syariah. Risiko gagal bayar pada bank konvensional dan syariah turut membaik pada triwulan I-2021 dengan nilai masing-masing sebesar 3,2% (yoy) dan 8,5% (yoy).



**Grafik 4.24** Perkembangan Kredit Konvensional dan Syariah

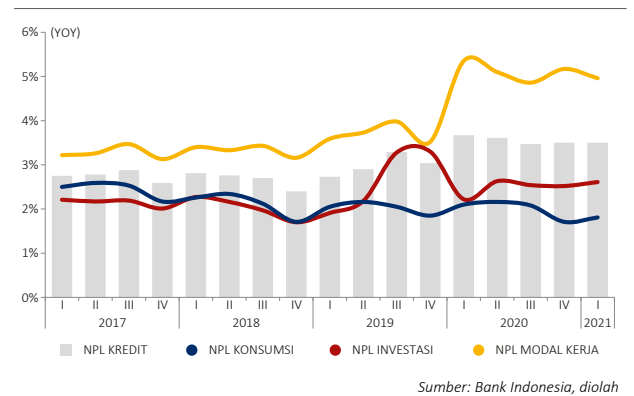


**Grafik 4.23** Pertumbuhan Jumlah Rekening Kredit

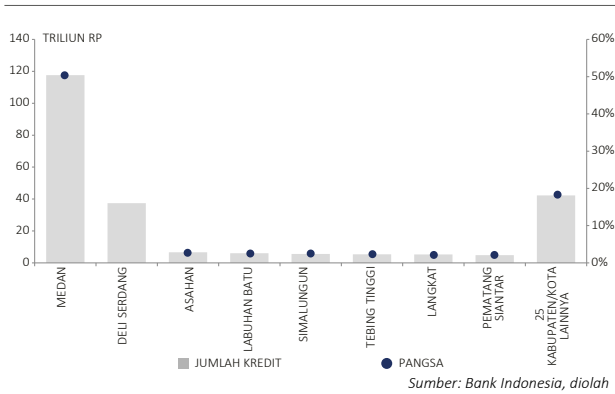
**Kualitas kredit masih terjaga di tengah penurunan pertumbuhan penyaluran kredit.** Rasio kredit bermasalah (NPL) pada triwulan I-2021 stabil pada level 3,5% didorong oleh kenaikan NPL KI dan KK, sementara risiko kredit KMK membaik. Adapun NPL masih di level yang sama sejak triwulan IV-2020 didorong oleh kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Berlanjutnya program restrukturisasi kredit hingga tahun 2022 juga diyakini menjadi faktor pendukung terjaganya risiko kredit perbankan.

### 4.2.3 Penyaluran Kredit Masih Terkonsentrasi di Kota Medan

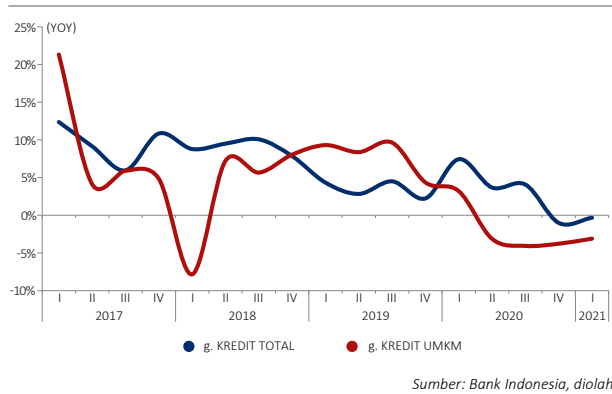
**Secara spasial penyaluran kredit lokasi proyek terkonsentrasi di 8 kabupaten/kota, dengan pangsa 82% dari total kredit.** Penyaluran kredit di Sumut masih terkonsentrasi di Kota Medan dengan pangsa sebesar 51% dan kabupaten/kota di pantai timur. Hal ini ditengarai akibat pertumbuhan ekonomi



**Grafik 4.25** Perkembangan NPL Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



**Grafik 4.26** Penyaluran Kredit Berdasarkan Kab/Kota



**Grafik 4.27** Pertumbuhan Kredit UMKM

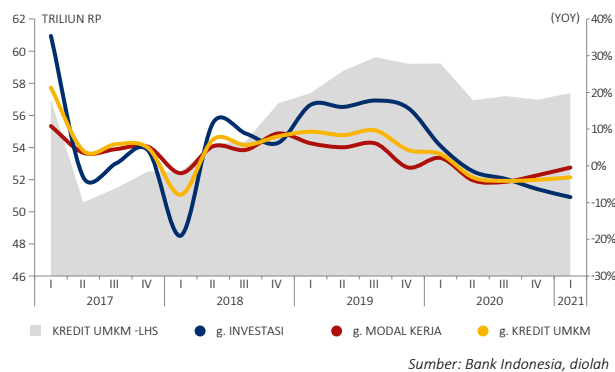
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai timur lebih baik dibandingkan dengan wilayah pantai barat. Kondisi ini terkonfirmasi dari pangsa PDRB (ADHB) di wilayah pantai timur pada tahun 2020 yang tercatat 74% dari total Sumut.

#### 4.2.4 Pertumbuhan Kredit UMKM Menunjukkan Perbaikan

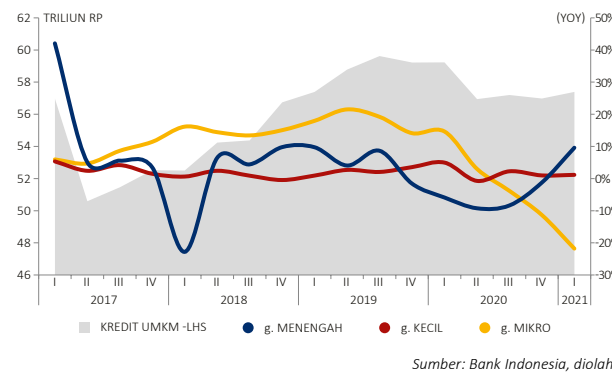
Di tengah kondisi perekonomian yang kontraksi semakin dalam, penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah menunjukkan perbaikan. Kredit yang disalurkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada triwulan I-2021 sebesar Rp57,4 triliun, dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar -3,1% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar -3,8% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari kredit modal kerja UMKM. Kondisi ini mencerminkan optimisme pelaku UMKM kembali pulih terutama pada HBKN Imlek dan menjelang bulan Ramadhan.

**Perbaikan pertumbuhan kredit UMKM terutama dipicu segmen kecil dan menengah, sementara kredit pada segmen mikro kontraksi lebih dalam.** Pada kelompok menengah, realisasi kredit mencapai 9,6% (yoy), lebih baik dari triwulan IV-2020 sebesar -1,3%(yoy). Begitupula kredit kelompok kecil yang tumbuh 1,2% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1% (yoy). Diperkirakan geliat segmen menengah dan kecil lebih kuat dalam merespon ketidakstabilan perekonomian. Adapun struktur kredit UMKM segmen menengah sekitar 44%, segmen kecil 30%, dan segmen mikro 26%.

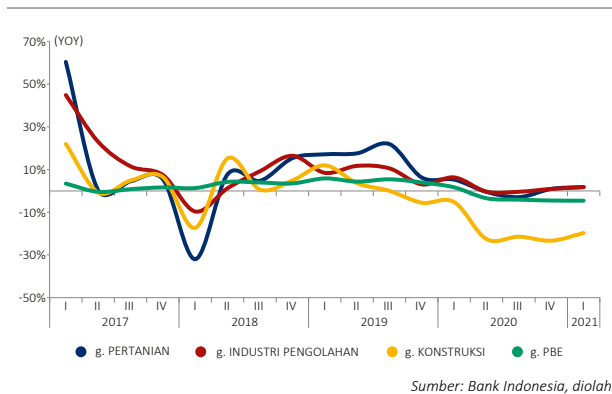
**Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan perbankan di Sumatera Utara mencapai 25%.** Berdasarkan lapangan usahanya, LU Pertanian, Konstruksi, dan Industri Pengolahan mengalami peningkatan penyaluran kredit pada triwulan I-2021, dengan pangsa penyaluran kredit UMKM masing-masing sektor sebesar 22%, 10%, dan 4%. Namun demikian, pembiayaan terhadap LU PBE



**Grafik 4.28** Penyaluran Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Kredit



**Grafik 4.29** Penyaluran kredit UMKM Berdasarkan Segment UMKM

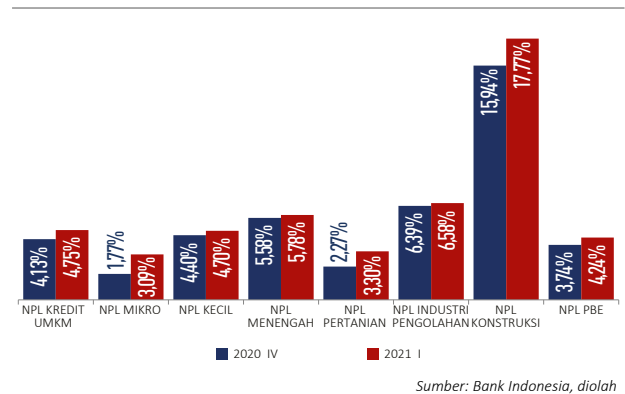


**Grafik 4.30** Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

dengan pangsa sebesar 48% masih belum mengalami peningkatan yang diduga karena LU PBE masih sensitif terhadap pembatasan akibat pandemi.

**Rasio kredit bermasalah meningkat dibandingkan triwulan IV-2020.** Dari sisi risiko, keseluruhan LU utama dan semua segmen UMKM mengalami penurunan kualitas kredit. LU Konstruksi memiliki risiko kredit macet yang lebih tinggi dibandingkan sektor utama lainnya. Kondisi ini sejalan dengan hasil diskusi terarah pada 5 bank konvensional utama di Medan yang menyatakan bahwa LU Konstruksi merupakan sektor dengan risiko tinggi, namun memiliki dampak ekonomi yang besar sehingga termasuk ke dalam sektor prioritas pembiayaan. Meskipun demikian, restrukturisasi kredit yang diperpanjang hingga tahun 2022 diprediksi mampu menjaga rasio NPL di level normal.

**Melihat dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM cukup signifikan, Bank Indonesia mendorong optimalisasi realisasi kredit UMKM.** Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/12/PBI/2012 mengatur target porsi kredit UMKM terhadap total kredit, yang harus dipenuhi perbankan. BI juga berupaya meningkatkan kinerja kredit UMKM melalui kebijakan memperlonggar batasan rasio pinjaman terhadap pendanaan (*Loan to Funding Ratio/LFR*) yang diatur dalam PBI Nomor 17/11/PBI/2015. Selain itu, BI turut meminta perbankan menurunkan suku bunga kredit, terutama kredit UMKM yang penurunannya telah mencapai 100 bps pada triwulan berjalan sejak



**Grafik 4.31** Perkembangan NPL Kredit UMKM

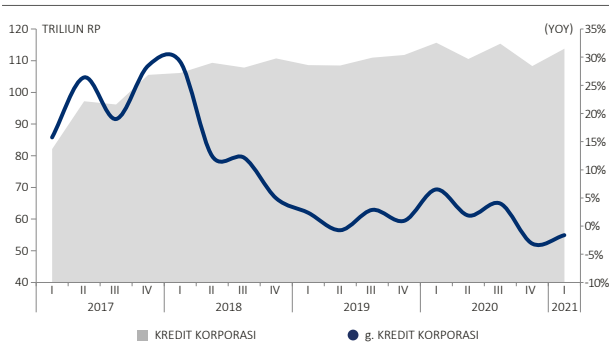
triwulan I-2020. Di tingkat regional, Kantor Perwakilan BI juga mendorong pengembangan UMKM di masing-masing daerah melalui pembinaan, pendampingan, dan kluster UMKM.

### 4.3 KINERJA KORPORASI MENINGKAT, SEMENTARA KREDIT RUMAH TANGGA BELUM MENUNJUKKAN PERBAIKAN

#### 4.3.1 Kinerja Kredit Korporasi Tumbuh Dampak Optimisme Pelaku Usaha

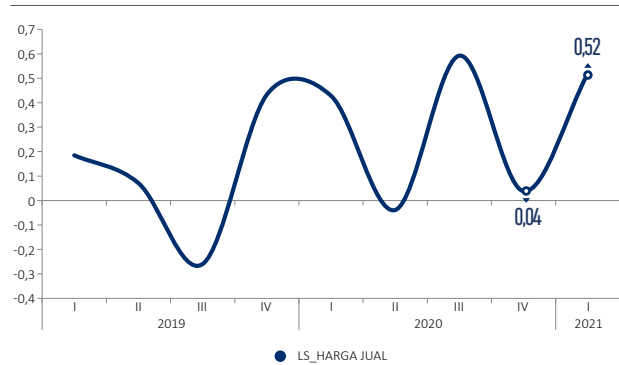
**Penyaluran kredit korporasi menunjukkan peningkatan mengindikasikan optimisme pelaku usaha yang mulai membaik pada tahun 2021.** Penyaluran kredit korporasi meningkat -1,6%, (yoy) naik dari triwulan sebelumnya -3,1% (yoy) meskipun masih dalam teritori negatif. Berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia, *likert scale* permintaan domestik dan ekspor menunjukkan peningkatan seiring dengan aktivitas ekonomi global yang kembali pulih karena implementasi vaksinasi COVID-19 di berbagai negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, *likert scale* harga jual pada triwulan I-2021 meningkat merepresentasikan kenaikan harga bahan baku karena meningkatnya harga komoditas, serta permintaan produk/jasa yang kembali pulih.





Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.32** Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.33** Likert Scale Harga Jual

### 4.3.2 Kredit Modal Kerja Mendorong Pertumbuhan Kredit Korporasi

**Penyaluran kredit korporasi menunjukkan peningkatan, didorong oleh perbaikan KMK.** Penyaluran KMK korporasi pada triwulan I-2021 sebesar Rp70,8 triliun atau sebesar 62% dari total kredit korporasi. KMK korporasi tumbuh -1,2% dalam setahun, lebih besar dari triwulan sebelumnya sebesar -5,7% (yoy). Sementara kinerja kredit investasi korporasi melambat hingga -2,3% (yoy) pada triwulan berjalan, lebih rendah dari triwulan IV-2020 sebesar 0,9%. Hasil survei *liaison* Bank Indonesia turut mencatat bahwa investasi cenderung berupa pemeliharaan rutin mesin pabrik dan bangunan dengan perilaku *wait and see*.

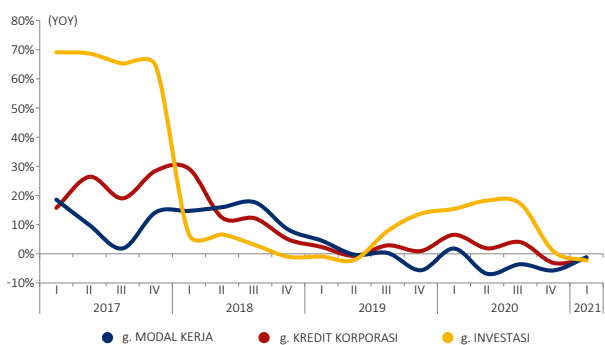
**Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi didukung perbaikan kredit pada LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi.** Hal ini

sejalan dengan minat pembiayaan perbankan yang tinggi pada sektor tersebut dan minat beli masyarakat yang mulai kembali pulih pada industri makanan dan minuman dan sektor properti. Kendati pertumbuhan kredit LU Pertanian, dan PBE melambat, perbankan tetap optimis mencapai target penyaluran kredit yang telah direvisi akibat pandemi COVID-19. Secara struktur, LU Pertanian memiliki pangsa kredit sebesar 27%, LU Industri Pengolahan 41%, LU PBE 12%, dan LU Konstruksi sebesar 5%.

## 4.4 KREDIT RUMAH TANGGA

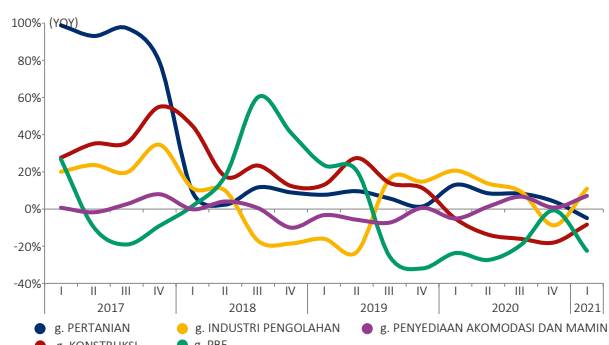
### 4.4.1 Kerentanan Rumah Tangga

**Survei konsumen Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen yang optimis terhadap kondisi ekonomi.** Survei Konsumen Maret 2021, mengonfirmasi penghasilan 58,3% rumah tangga meningkat atau tidak berubah dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya. Kondisi



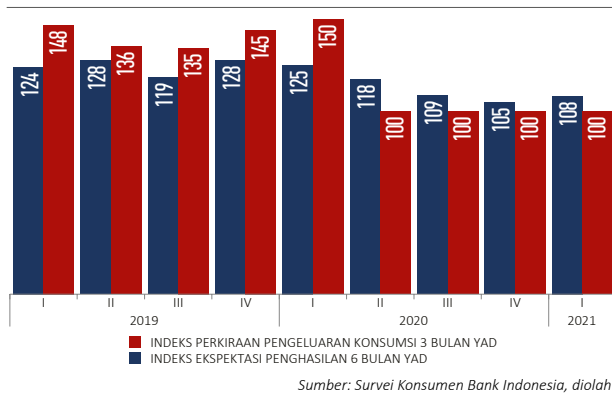
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.34** Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan



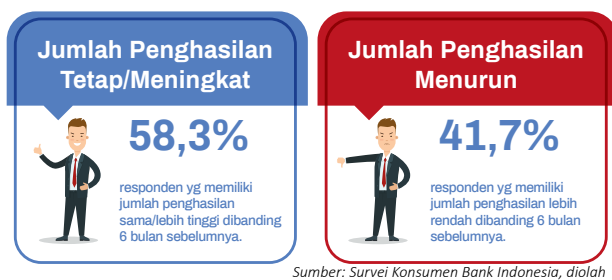
Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.35** Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan sektor Ekonomi



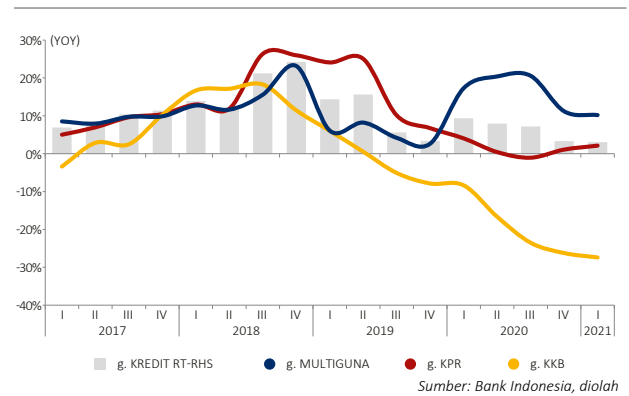
**Grafik 4.36** Indeks Ekspektasi Penghasilan

ini relatif lebih baik dibandingkan dengan survei pada Desember 2020, yang mengonfirmasi penghasilan 57,5% masyarakat meningkat atau tetap. Begitupula sebaliknya, dimana jumlah responden yang mengonfirmasi adanya penurunan penghasilan dari 6 bulan sebelumnya (41,7%), lebih kecil dibandingkan survei bulan Desember 2020 (42,5%). Ke depan, konsumsi rumah tangga diprediksi akan terus pulih didorong oleh menguatnya pendapatan seiring dengan berlanjutnya insentif program Pemulihan Ekonomi Nasional serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Namun demikian, hampir setengah dari total responden menyatakan terjadi penurunan penghasilan, sehingga menyebabkan kondisi kerentanan sistem keuangan yang bersumber dari rumah tangga masih perlu diwaspadai, terutama berkaitan dengan potensi gagal bayar debitur di bank.



**Gambar 4.1** Perbandingan Responden Dengan Penghasilan Meningkat dan Menurun

**Ekspektasi rumah tangga terhadap perekonomian mendatang menunjukkan perbaikan.** Dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme rumah tangga terhadap penghasilan pada 6 bulan



**Grafik 4.37** Perkembangan Kredit Rumah Tangga

mendatang, meningkat. Sementara optimisme terhadap konsumsi dalam 3 bulan mendatang tidak menunjukkan perubahan sejak triwulan II-2020. Diduga, hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan perekonomian sehingga rumah tangga perlu menahan konsumsi dengan motif berjaga-jaga.

#### 4.4.2 Di sisi lain, Penyaluran Kredit Rumah Tangga Melambat

**Meskipun Survei Konsumen mencatat perbaikan kondisi ekonomi, penyaluran kredit rumah tangga masih tumbuh melambat.** Realisasi kredit rumah tangga pada triwulan I-2021 sebesar Rp63,1 triliun atau tumbuh 3,05% (yoy). Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV-2020 yang sebesar 3,29% (yoy). Kredit rumah tangga lebih banyak ditujukan untuk kredit multiguna (53%), disusul KPR (30%), dan KKB (6%).

**Kinerja kredit rumah tangga tertekan, didorong oleh perlambatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Multiguna.** Pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih rendah pada triwulan I-2021 terutama disebabkan oleh kontraksi kredit kendaraan bermotor (KKB) yang semakin dalam, dari -26,3% (yoy) pada triwulan IV-2020 menjadi -27,4% (yoy) pada triwulan I-2021. Kondisi ini melanjutkan tren perlambatan pertumbuhan KKB sejak triwulan III-2018 sebesar 18,3% secara tahunan. Penurunan KKB sejalan dengan minat masyarakat untuk membeli kendaraan yang semakin surut. Pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat dan Kebijakan

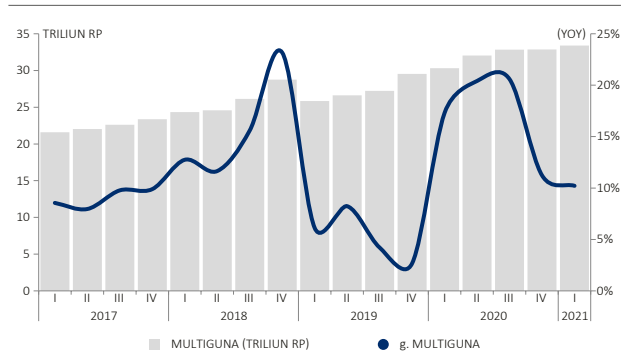
**Tabel 4.2** Pertumbuhan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor

KKB	Growth (%)		Pangsa (%)		Kontribusi		Delta
	Q4'20	Q1'21	Q4'20	Q1'21	Q4'20	Q1'21	Kontribusi
Mobil Roda Empat	-25%	-25%	76%	77%	-19,0%	-19,1%	-0,1%
Sepeda Bermotor	-32%	-36%	20%	19%	-6,3%	-7,0%	-0,7%
Truk dan Kendaraan Bermotor Roda Enam	-5%	-20%	2%	2%	-0,1%	-0,4%	-0,3%
Kendaraan Bermotor Lainnya	-34%	-40%	2%	1%	-0,6%	-0,5%	0,1%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pemerintah Daerah seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat diperkirakan menambah pertimbangan masyarakat dalam membeli kendaraan. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah terkait diskon PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan kebijakan BI terkait DP 0% per Maret 2021 diharapkan dapat mendorong peningkatan kredit KKB.

**Sementara itu, kredit kepemilikan rumah (KPR) menunjukkan pemulihan di setiap segmen.** KPR meningkat 2,1% secara tahunan pada triwulan I-2021 dari sebesar -1,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan permintaan kredit ini terjadi untuk hunian, baik rumah tinggal maupun flat/apartemen tipe 21 dan tipe di atas 70 meter persegi (m<sup>2</sup>), dan rumah kantor. Di sisi lain, perlambatan terjadi pada permintaan kredit untuk hunian dengan luas lebih dari 70 m<sup>2</sup>. Informasi anekdotal (*Rumah.com Consumer Sentiment Study H1 2021*) mengonfirmasi bahwa pandemi justru meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk memiliki hunian pribadi.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik 4.38** Perkembangan Kredit Multiguna

**Tabel 4.3** Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perumahan

KPR	Growth (%yoy)		Pangsa (%)		Kontribusi		Delta
	Q4'20	Q1'21	Q4'20	Q1'21	Q4'20	Q1'21	Kontribusi
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	-15,8%	-13,1%	3,3%	3,3%	-0,5%	-0,4%	0,1%
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	7,0%	6,9%	53,7%	53,9%	3,7%	3,7%	0,0%
Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	-1,4%	0,5%	33,9%	33,9%	-0,5%	0,2%	0,7%
Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	-16,7%	10,5%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	4,2%	2,4%	0,7%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	-5,8%	3,0%	1,2%	1,3%	-0,1%	0,0%	0,1%
Rumah Toko atau Rumah Kantor	-15,1%	-14,5%	7,1%	6,8%	-1,1%	-1,0%	0,1%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



*Halaman ini sengaja dikosongkan*





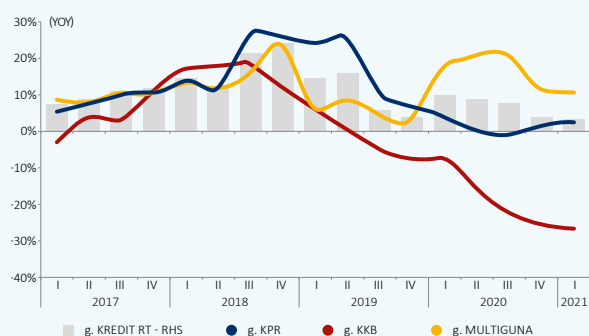
► BOKS 2

## **Kebijakan Pelonggaran LTV/FTV Dan DP 0%, Upaya Bank Indonesia Mendorong Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga**



---

Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang cukup besar pada struktur PDRB Sumatera Utara, dengan pangsa mencapai 51,5%. Sehingga apabila terjadi kontraksi sedikit saja pada konsumsi rumah tangga maka akan berpengaruh besar pada pertumbuhan PDRB. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kontraksi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan I-2021 yaitu komponen konsumsi rumah tangga sebesar -2,5% (yoy). Bila dikupas lebih dalam, andil konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga dan andil transportasi dan komunikasi terhadap PDRB masing-masing sebesar 22,5% dan 1,5%, hampir seperempat dari total PDRB. Hal ini menunjukkan pentingnya konsumsi perumahan dan transportasi dalam menunjang pemulihan ekonomi nasional.



**Grafik B2.1** Penyaluran Kredit Rumah Tangga / Konsumsi

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit konsumsi atau kredit rumah tangga tertekan, didorong oleh perlambatan pada Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Multiguna, sementara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menunjukkan pemulihan. Namun demikian, Survei Konsumen Bank Indonesia per Maret 2021 mengindikasikan keyakinan konsumen yang optimis terhadap kondisi ekonomi. Hal ini terbukti dari persentase responden yang menjawab memiliki jumlah penghasilan sama atau lebih tinggi dibandingkan 6 bulan sebelumnya sebesar 58,3%, lebih tinggi dibandingkan survei periode Desember 2020 sebesar 57,5% dari total responden.

Dalam rangka mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, perlu dilakukan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Melalui penyaluran Kredit Properti (KP) atau Pembiayaan Properti (PP) dan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) diharapkan

dapat mendorong pemulihan ekonomi. Hal ini menjadi latar belakang keluarnya keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 17-18 Februari 2021 yakni melonggarkan ketentuan uang muka KKB/PPB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif (Tabel 1). Selain itu, kebijakan baru Bank Indonesia lainnya ialah dengan melonggarkan rasio *Loan to Value / Financing to Value* (LTV/FTV) untuk KP/PP menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu (Tabel 2). Dua kebijakan baru ini telah berlaku efektif sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Adapun penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Kebijakan pelonggaran uang muka untuk KKB/ PKB dan pelonggaran rasio LTV/FTV untuk KP/PP ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/ PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Dalam perkembangannya, sebagian besar bank telah menyesuaikan atas kebijakan ini, baik secara penuh maupun selektif sebagai bentuk kehati-hatian. Pada sektor properti, dampak keberhasilan kebijakan pelonggaran rasio LTV/FTV terlihat pada pertumbuhan properti inden yang naik tajam di kisaran 60% hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, tercatat pertumbuhan kredit properti 10-75% dalam sebulan

**Tabel B2.1** Penyesuaian Uang Muka untuk KKB/PKB

Jenis Kendaraan Termasuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan	Batasan Uang Muka (Paling Sedikit)	
	Bank Yang Memenuhi Persyaratan NPL/NPF	Bank Yang Tidak Memenuhi Persyaratan NPL/NPF
RODA 2	0%	10%
RODA 3 ATAU LEBIH – NON PRODUKTIF	0%	10%
RODA 3 ATAU LEBIH – PRODUKTIF	0%	5%

Tabel B2.2 Rasio LTV/FTV untuk KP/PP

Tipe Properti (m2) Termasuk Properti Berwawasan Lingkungan	Batasan Rasio LTV/FTV (Paling Tinggi)		
	Bank Yang Memenuhi Persyaratan NPL/NPF		Bank Yang Tidak Memenuhi Persyaratan NPL/NPF
	KP/PP Fasilitas I Dst	KP/PP Fasilitas I	KP/PP Fasilitas II Dst
<b>RUMAH TAPAK</b>			
Tipe > 70	100%	95%	90%
Tipe >21 – 70	100%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	95%
<b>RUMAH SUSUN</b>			
Tipe > 70	100%	95%	90%
Tipe >21 – 70	100%	95%	95%
Tipe ≤ 21	100%	100%	95%
RUKO/RUKAN	100%	95%	90%

serta pemulihan KPR yang tumbuh sebesar 2,1% (yoy) pada triwulan I-2021 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -1,05% (yoy). Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia, kebijakan serupa juga diterapkan oleh Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan konsumsi pada sektor properti, diantaranya rencana perpanjangan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Kebijakan pemerintah ini akan berlanjut sampai tahun 2024 dan pemberian keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi rumah tapak dan rumah susun baru siap huni dengan harga paling tinggi Rp5 miliar.

Sementara itu pada sektor otomotif, kebijakan penyesuaian uang muka untuk KKB/PKB tampaknya belum mampu menggenjot konsumsi rumah tangga terutama konsumsi transportasi. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja KKB yang masih melanjutkan tren kontraksi. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 diperkirakan menambah pertimbangan masyarakat dalam membeli kendaraan. Dari sisi penawaran, berdasarkan hasil diskusi Bank Indonesia dengan beberapa *dealer* utama kendaraan bermotor di Sumatera Utara, diperoleh informasi bahwa penyesuaian uang muka bergantung dari kebijakan *leasing* setiap *dealer*. Selain itu, mayoritas peruntukannya hanya untuk *corporate consumer* dan konsumen dengan catatan kredit yang baik. Sebagai upaya meningkatkan penjualan di selama pandemi, *dealer* kendaraan bermotor tetap aktif

berinovasi menyusun strategi promosi terbaik, yakni dengan mengubah pekan expo *offline* menjadi expo virtual setiap bulan. Walaupun jumlah konsumen yang datang pada pameran virtual hanya berkisar 10% dari pameran *offline* pada umumnya, namun intensitas pameran yang cukup sering diharapkan mampu mendukung pemulihan konsumsi transportasi.



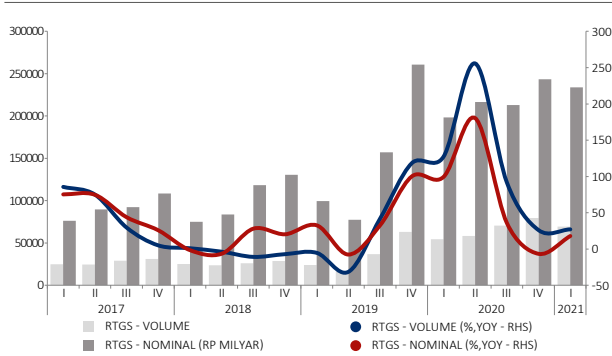
Foto: Pasar Tradisional, Medan, Sumatera Utara



## Bab V

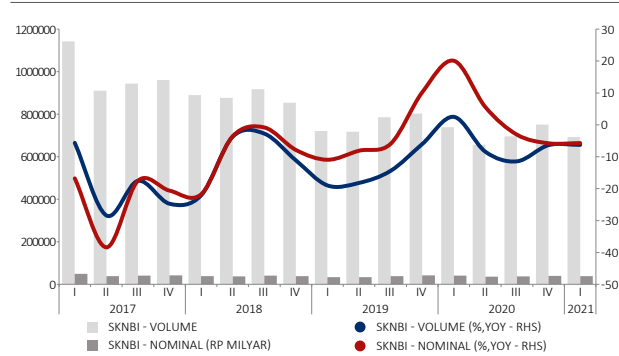
# Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan sistem pembayaran pada triwulan I-2021 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 mengalami net inflow sebesar Rp9,87 triliun, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow. Hal ini mengindikasikan aliran kas masuk (*inflow*) ke khazanah Bank Indonesia se-Provinsi Sumatera Utara lebih besar dibandingkan aliran kas keluar (*outflow*). Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berjalan dengan baik, meskipun melambat. Selain itu, nominal transaksi Kartu ATM Debet dan Kartu Kredit cukup terjaga. Di sisi lain, tren digitalisasi semakin meningkat tercermin dari pesatnya penggunaan uang elektronik dan transaksi *e-commerce*. Perkembangan sistem pembayaran sesuai dengan pola seasonal dimana pada awal tahun aktivitas ekonomi cenderung turun pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini juga terkonfirmasi dari penurunan konsumsi masyarakat dan belum terealisasinya belanja Pemerintah pada awal tahun.



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.1** Perkembangan RTGS



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.2** Perkembangan SKNBI

## 5.1 SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI BERJALAN BAIK

Nominal transaksi sistem *Real-Time Gross Settlement* (RTGS) triwulan I-2021 menurun dibandingkan triwulan IV-2020. Nilai transaksi RTGS triwulan I-2021 sebesar Rp233,7 miliar, turun -4% (qtq) dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp243 miliar. Sejalan dengan nominal transaksi, volume transaksi RTGS juga mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, volume transaksi RTGS tercatat sebesar 69 ribu transaksi, turun -13% (qtq) dari periode sebelumnya yang sebesar 79 ribu transaksi.

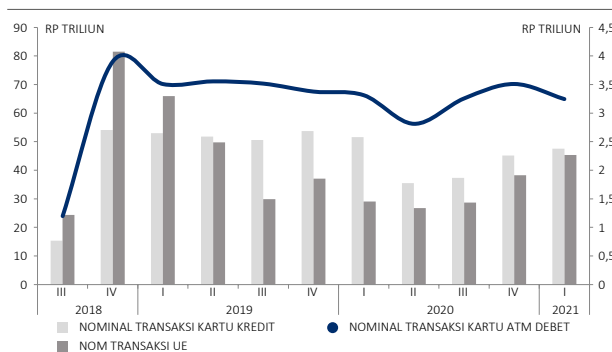
Secara tahunan, pada triwulan I-2021 nominal dan volume transaksi RTGS mengalami peningkatan. Nominal transaksi RTGS tumbuh sebesar 18% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar -7% (yoy), sementara volume transaksi triwulan I-2021 tumbuh sebesar 27% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 26% (yoy).

Penurunan transaksi RTGS sesuai dengan pola *seasonal* dimana pada awal tahun aktivitas ekonomi cenderung turun pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini juga terkonfirmasi dari penurunan konsumsi masyarakat dan belum terealisasinya belanja Pemerintah pada awal tahun.

Sejalan dengan penurunan transaksi RTGS, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, nominal transaksi SKNBI mencapai Rp38,5 miliar, turun sebesar -3% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7% (qtq). Volume transaksi juga menurun menjadi 692 ribu transaksi atau turun -8% (qtq) dari 751 ribu transaksi pada triwulan IV-2020.

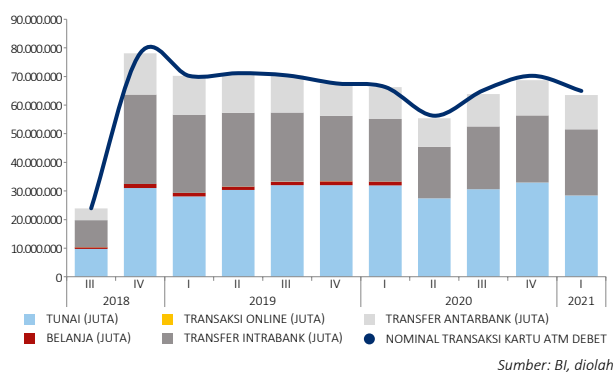
Sejalan dengan pola triwulanan, secara tahunan nominal dan volume transaksi SKNBI masih mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, nominal dan volume transaksi SKNBI berkontraksi masing-masing sebesar -6% (yoy).

Sejalan dengan penurunan transaksi RTGS, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, nominal transaksi SKNBI mencapai Rp38,5 miliar, turun sebesar -3% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7% (qtq). Volume transaksi juga menurun menjadi 692 ribu transaksi atau turun -8% (qtq) dari 751 ribu transaksi pada triwulan IV-2020.

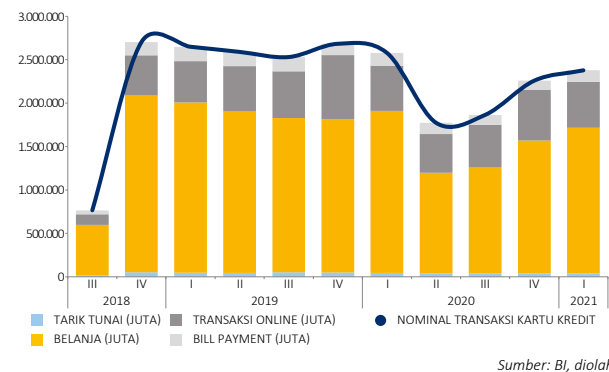


Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.3** Perkembangan Transaksi Kartu ATM Debet, Kartu Kredit, dan UE



**Grafik 5.4** Alokasi Penggunaan Kartu ATM Debit



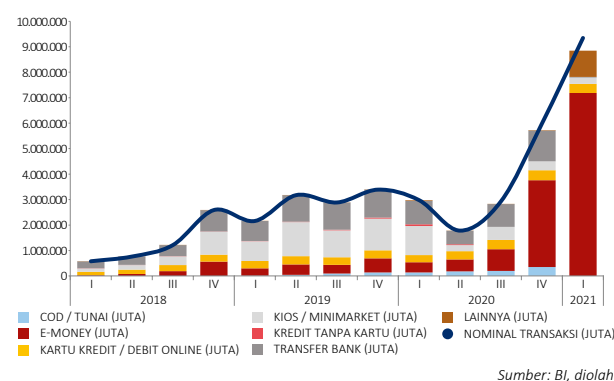
**Grafik 5.5** Alokasi Penggunaan Kartu Kredit

Sejalan dengan pola triwulanan, secara tahunan nominal dan volume transaksi SKNBI masih mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, nominal dan volume transaksi SKNBI terkontraksi masing-masing sebesar -6% (yoy).

Terbatasnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan transaksi menggunakan uang elektronik. Nilai transaksi uang elektronik pada triwulan I-2021 mencapai Rp2,26 triliun meningkat sebesar 56% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3% (yoy). Hal ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara. QRIS merupakan standarisasi pembayaran melalui metode *QR Code* atau kode baca cepat dari Bank Indonesia sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Pada triwulan I-2021, jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Utara sebanyak 254.924 *merchant* atau tumbuh sebesar 129% (yoy). Sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah

melalui kemudahan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) terus berupaya mendorong perluasan implementasi QRIS sebagai solusi transaksi pembayaran digital.

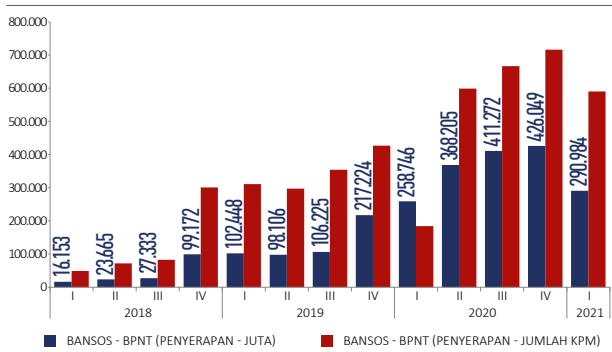
Transaksi *e-commerce* di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I-2021, nominal transaksi *e-commerce* tercatat sebesar Rp9,35 triliun meningkat 214% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 77% (yoy). Preferensi masyarakat pada pilihan metode pembayaran sebagian besar menggunakan uang elektronik terkonfirmasi dari jumlah transaksi sebesar Rp7,18 triliun atau 77% dari total transaksi *e-commerce*. Kemudahan yang ditawarkan serta berbagai keuntungan transaksi menggunakan uang elektronik menjadi dasar masyarakat dalam memilih pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.



**Grafik 5.6** Perkembangan Transaksi E-Commerce

## 5.2 ELEKTRONIFIKASI BERJALAN LANCAR

Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD) pada triwulan I-2021 mengalami peningkatan. Pada triwulan I-2021 transaksi LKD tercatat sebesar Rp397 miliar, tumbuh sebesar 183% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar Rp140 miliar. Peningkatan terjadi pada transaksi pembayaran, transfer, tarik tunai dan pengisian saldo yang masing-masing tumbuh cukup besar mencapai 283% (qtq),



Sumber: Kementerian Sosial, diolah

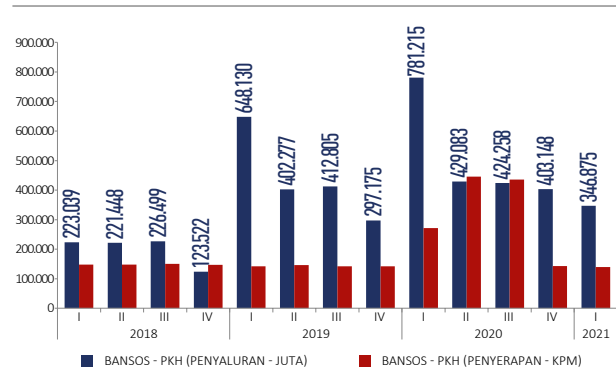
Grafik 5.7 Perkembangan BPNT

885% (qtq), 11% (qtq) dan 12% (qtq). Peningkatan transaksi didukung pula oleh kenaikan jumlah agen LKD menjadi 25 ribu pada triwulan I-2021, meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 24 ribu agen atau tumbuh sebesar 3% (qtq).

Penyaluran dan penyerapan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I-2021, penyaluran BPNT tercatat Rp374 miliar atau tumbuh sebesar 19% (yoy). Sementara penyerapan BPNT sebesar Rp290 miliar atau tumbuh sebesar 12% (yoy). Sementara jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 624 ribu, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebanyak 770 ribu.

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Penyaluran PKH pada triwulan I-2021 mencapai Rp346 miliar, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp403 miliar. Secara tahunan, penyaluran PKH berkontraksi sebesar -56% (yoy) menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang berhasil tumbuh sebesar 36% (yoy). Jumlah KPM penerima PKH pada triwulan I-2021 sebanyak 141 ribu, turun dibanding triwulan sebelumnya yang sebanyak 146 ribu. Secara tahunan, jumlah KPM penerima PKH berkontraksi sebesar -48% (yoy).

Untuk mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi, program elektronifikasi di Sumatera Utara terus diperluas. Perluasan dilakukan ke



Sumber: Kementerian Sosial, diolah

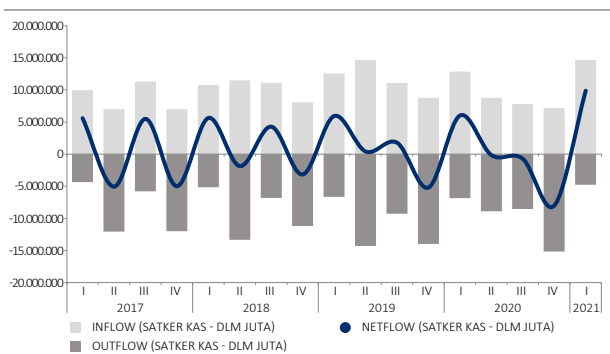
Grafik 5.8 Perkembangan PKH

beberapa sektor seperti moda transportasi, pariwisata, hingga transaksi keuangan pemerintah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah dari tunai menjadi nontunai. ETPD bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemda serta untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi di bidang sistem pembayaran. Selain itu, implementasi ETPD juga diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

### 5.3 SISTEM PEMBAYARAN TUNAI SESUAI POLA HISTORIS

Aliran uang kartal ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 mengalami *net inflow* sebesar Rp9,87 triliun. Pada triwulan I-2021, *net inflow* tersebut tumbuh sebesar 64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 54% (yoy). Aliran kas keluar (*outflow*) dari khazanah Bank Indonesia se-Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp4,78 triliun, sementara aliran kas masuk (*inflow*) sebesar Rp14,64 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, kas titipan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga mengalami *net inflow*. Pada triwulan I-2021, *net inflow* sebesar Rp593,7 miliar atau berkontraksi sebesar -252% (yoy). Kondisi ini berbeda dibandingkan



Sumber: BI, diolah

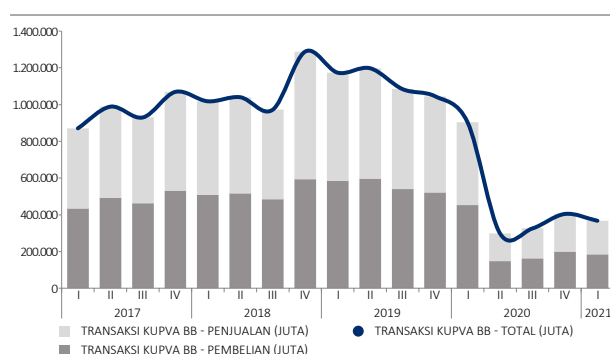
**Grafik 5.9** Perkembangan *Inflow - Outflow*

triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp2,98 triliun. Aliran *inflow* di kas titipan Bank Indonesia se-Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2021 sebesar Rp1,76 triliun, lebih besar dari aliran *outflow* yang sebesar Rp1,16 triliun.

Kondisi *net inflow* sesuai dengan pola *seasonal* dimana pada awal tahun aktivitas ekonomi masyarakat cenderung turun dibandingkan akhir tahun dimana terdapat libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pengeluaran Pemerintah juga masih terbatas pada awal tahun. Hal ini berdampak pada turunnya kebutuhan uang di masyarakat.

Temuan uang palsu di wilayah Sumatera Utara mengalami penurunan. Pada triwulan I-2021, temuan uang palsu di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebanyak 623 lembar, turun -78% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang sebanyak 833 lembar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan uang palsu di masyarakat.

Di tengah pandemi yang sedang melanda, Bank Indonesia terus berkomitmen memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran di Sumatera Utara. Bank Indonesia melaksanakan berbagai protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19 melalui uang Rupiah. Setiap setoran dari perbankan/PJPUR dikarantina selama 14 hari, serta disemprot disinfektan



Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.10** Perkembangan Transaksi KUPVA BB

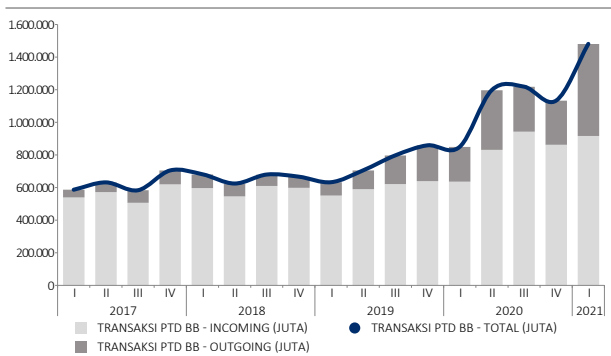
sebelum kembali didistribusikan. Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat higienitas ruangan kerja dan perangkat pengolahan uang Rupiah serta terus berkoordinasi dengan perbankan/PJPUR untuk selalu menjaga aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

## 5.4 KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING DAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA TERJAGA

Dukungan pasar keuangan, termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat, diperlukan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah dan perekonomian. Oleh karena itu, aturan transaksi valas terhadap Rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) dengan pihak lain diselaraskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Pada triwulan I-2021, terdapat 47 KUPVA BB Berizin di Sumatera Utara. Transaksi KUPVA BB mengalami penurunan dari Rp405 miliar pada triwulan IV-2020 menjadi Rp368 miliar pada triwulan I-2021 atau turun -9% (qtq). Secara tahunan, transaksi KUPVA BB juga turun sebesar -59% (yoy) sedikit membaik dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -61% (yoy). Transaksi pembelian KUPVA BB sebesar Rp183 miliar sementara transaksi penjualan sebesar Rp184 miliar.





Sumber: BI, diolah

**Grafik 5.11** Perkembangan Transaksi PTD BB

Transfer dana merupakan kegiatan pemindahbukuan sejumlah dana kepada penerima yang diawali dengan perintah pengiriman yang disebut perintah transfer dana, hingga dana diterima oleh penerima. Bank Indonesia juga mengatur proses perizinan, penyelenggaraan transfer dana, dan penyampaian laporan oleh penyelenggara. Tujuannya, menjamin keamanan dan kelancaran transfer dana. Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana wajib memperoleh izin Bank Indonesia.

Pada triwulan I-2021, terdapat 9 Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) berizin di Sumatera Utara, dengan total kegiatan transaksi dana mencapai Rp1,48 triliun. Transaksi dana yang masuk sebesar Rp915 miliar, sementara transaksi dana yang keluar sebesar Rp565 miliar. Pertumbuhan total transaksi dana mencapai 74% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 32% (yoy). Tingginya pertumbuhan total transaksi dana didorong oleh perluasan layanan PTD ke beberapa negara di Eropa seperti Belgia, Irlandia, Norwegia, dan lainnya.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



► BOKS 3

## **Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Dalam Mendorong Implementasi & Akseptasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara**



---

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah dari tunai menjadi nontunai. Program ini merupakan salah satu Program Strategis Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan Pemda serta untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi serta inovasi di bidang sistem pembayaran. Selain itu, implementasi ETPD juga diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.



Gambar B3.1 Launching Pembentukan TP2DD Sumatera Utara

Komponen dalam ekosistem ETPD terbagi menjadi dua kelompok yaitu pengguna dan penyedia layanan. Komponen pengguna sistem layanan ETPD terdiri dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, sementara yang termasuk kedalam komponen penyedia layanan adalah bank pengelola RKUD, mitra bank, agen bank, *point payment* dan *fintech*. Kedua komponen ini memiliki peranan penting dalam menciptakan ekosistem ETPD, baik dari ketersediaan layanan dan fasilitas keuangan *digital* serta optimalisasi penggunaannya.

Dalam pengembangan serta perluasannya di lapangan, implementasi ETPD nyatanya masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di daerah, tak terkecuali

di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi infrastruktur dan jaringan serta kapabilitas perbankan yang masih belum merata di masing-masing daerah menjadi tantangan utama perluasan implementasi ETPD di Sumatera Utara. Selain itu, perbedaan tingkat literasi masyarakat terhadap layanan keuangan *digital* di masing-masing daerah juga menjadi tantangan dalam mendorong penggunaan layanan ETPD. Berdasarkan survei akseptasi ETPD yang dilakukan Bank Indonesia, baru sekitar 25% responden di Sumatera Utara yang pernah membayar pajak secara nontunai dan hanya sekitar 17% responden yang pernah membayar retribusi secara nontunai. Dengan kondisi serta tantangan di daerah yang unik dan beragam, strategi



Gambar B3.2 Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)



Gambar B3.3 Strategi TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

perluasan dan peningkatan akseptasi yang perlu dilakukan pun berbeda untuk tiap daerah. Untuk itu, dibutuhkan suatu kelompok kerja yang dapat mengatasi tantangan perluasan ETPD tersebut secara lebih efektif dan efisien.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 9 April 2021 telah dilaksanakan *Launching* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara diikuti pembentukan 21 TP2DD di tingkat kabupaten/kota. TP2DD sendiri memiliki beberapa tugas yang perlu dijalankan diantaranya (1) melakukan pengumpulan data dan informasi terkait ETPD, (2) melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi perluasan ETPD di daerah, (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi ETPD, (4) menyusun langkah-langkah penyelesaian hambatan serta (5) melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada SDM Pemda dan masyarakat. Dengan terbentuknya TP2DD ini diharapkan implementasi ETPD dapat terus diperluas dan akseptasinya oleh masyarakat terus meningkat.

Pasca *launching* dan pembentukannya, beberapa strategi dapat mulai dilakukan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Sumatera Utara. TP2DD di tingkat Provinsi dapat terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota untuk mendorong

pembentukan TP2DD di tiap-tiap daerah. Pemda di tingkat kabupaten/kota dapat mulai membentuk tim yang bertugas melakukan penyusunan regulasi berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah untuk membentuk TP2DD. Nantinya, TP2DD Provinsi akan aktif berkoordinasi dengan tim penyusun tersebut untuk memonitor perkembangan penyusunan SK sampai dengan disahkan oleh Kepala Daerah.

Bagi daerah yang sudah membentuk TP2DD dapat segera melakukan pemetaan kondisi dan potensi ETPD di daerahnya serta menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh TP2DD. Rencana kerja ini terdiri dari rencana perluasan implementasi ETPD di sektor belanja maupun penerimaan, rencana kegiatan sosialisasi dan edukasi serta rencana pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi secara berkala. Setelah itu, TP2DD dapat mulai melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja sebagaimana yang telah disusun sebelumnya sembari melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatannya secara berkala. Untuk mendokumentasikan berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan, TP2DD juga perlu menyusun laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di tingkat pusat. Dengan berbagai strategi tersebut diharapkan TP2DD dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi di masing-masing daerah.






## Bab VI

# Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

**Di tengah pemulihan ekonomi yang terus berjalan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masih diliputi tantangan.**

Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja berkurang seiring meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Februari 2021 tercatat 6,01% atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,73%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 69,39% pada Februari 2021, turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 72,2%. Sementara itu, Nilai Tukar Petani mencatat apresiasi. Sedangkan di sisi kesejahteraan, ketimpangan pendapatan, baik di perkotaan maupun perdesaan, semakin berkurang, meskipun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat.



**Kondisi ketenagakerjaan melemah sejalan dengan masih terkontraksinya ekonomi Sumatera Utara pada triwulan laporan.**

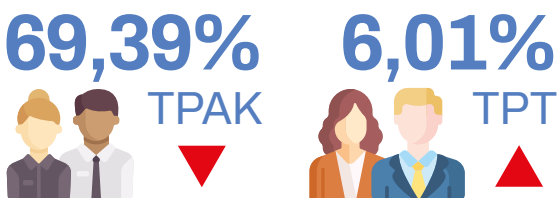
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara pada Februari 2021 tercatat 6,01% atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,73%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercatat 69,39% pada Februari 2021, turun dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 72,2%. Penurunan serapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha utama Sumatera Utara yaitu Pertanian. Lapangan usaha lain yang juga mengalami penurunan serapan tenaga kerja adalah Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, Listrik, Gas dan Air.

**Jumlah penduduk miskin bertambah, meskipun rasio kemiskinan menurun.**

Angka kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2020 sebesar 8,75% dari jumlah penduduk, turun dibandingkan dengan Maret 2019 yang sebesar 8,83%. Namun, jumlah penduduk miskin justru bertambah, dari 1,282 juta orang pada Maret 2019 menjadi 1,283 juta jiwa pada Maret 2020.

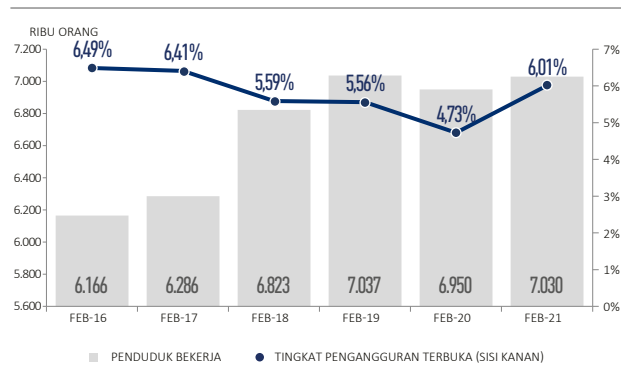
**Ketimpangan, yang tercermin melalui rasio gini, juga berkurang.**

Meski demikian, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat, menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan.



**6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN SUMATERA UTARA MELEMAH**

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Februari 2021 meningkat, tercermin dari indikator TPT yang naik 1,28 poin dibanding tahun lalu menjadi 6,01%.** Pada periode laporan, terdapat 449 ribu pengangguran di Sumatera Utara



**Grafik 6.1** Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

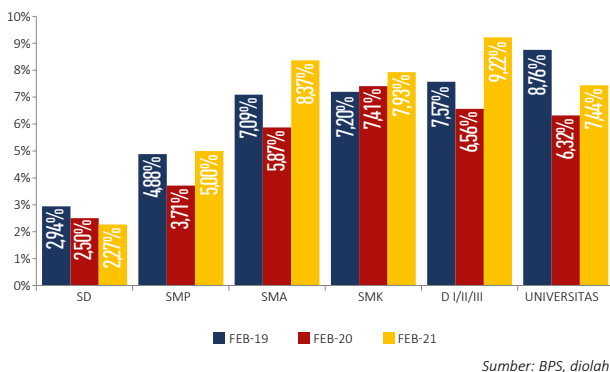
atau bertambah 88 ribu dalam satu tahun. Angka TPT sebesar 6,01% menunjukkan setidaknya 6 dari 100 orang yang merupakan angkatan kerja di Sumatera Utara, menganggur. Namun demikian, angka TPT Sumatera Utara tercatat masih lebih baik dibandingkan angka TPT Nasional yang saat ini tercatat 6,26%. Berdasarkan jumlah pengangguran, Sumatera Utara ada di posisi ke-10 dari 34 provinsi dengan presentase TPT tertinggi. Kondisi TPT pada periode laporan yang mengalami peningkatan menghentikan tren penurunan angka TPT sejak tahun 2016.

**Peningkatan tingkat pengangguran terbuka terjadi baik perkotaan maupun perdesaan.**

Pada Februari 2021, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan Sumatera Utara naik 0,72 poin menjadi 7,44%. Adapun di perdesaan naik 1,94 poin menjadi 4,28%. Tingkat pengangguran yang naik lebih tinggi di perdesaan seiring dengan banyaknya pelaku usaha kecil di perdesaan yang gulung tikar akibat terdampak pandemi dibandingkan perkotaan.

**Tingkat pengangguran terbuka dari lulusan Diploma I/II/III paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain.**

Tingkat pengangguran terbuka pada lulusan Diploma sebesar 9,22% per Februari 2021 atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebesar 6,56%. Sementara, tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMA berada di posisi tertinggi kedua, yakni 8,37% atau lebih tinggi daripada Februari 2020 yang sebesar 5,87%. Kondisi ini mencerminkan penawaran tenaga kerja Diploma

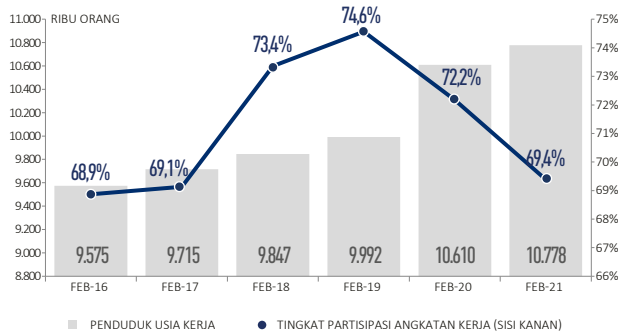


Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.2** TPT Menurut Jenjang Pendidikan

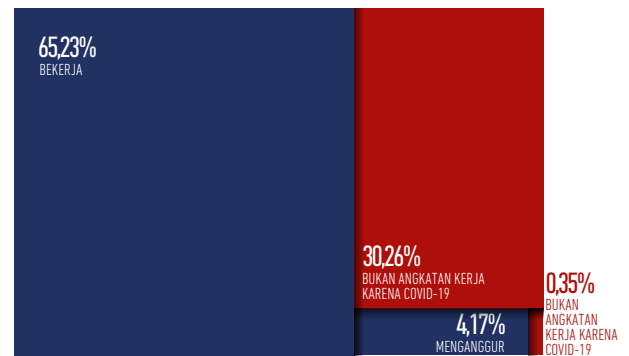
turun di tengah peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk jenjang pendidikan tinggi. Adapun untuk tenaga kerja berpendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar ke bawah, tingkat pengangguran terbuka masing-masing 5% dan 2,27%.

**Tingkat pengangguran terbuka jenjang pendidikan atas dan tinggi lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan menengah bawah.** Hal ini mengindikasikan tenaga kerja berpendidikan atas tinggi belum terserap industri. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan rendah cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Porsi pengangguran berpendidikan tinggi yang besar menunjukkan *gap* antara ketersediaan tenaga kerja berkualitas dengan permintaan tenaga kerja di Sumatera Utara. Hal ini antara lain disebabkan suplai berlebihan karena pertumbuhan industri tidak secepat pertumbuhan angkatan kerja, kualitas tenaga kerja tidak sesuai standar industri, dan semakin banyak



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.4** Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Kerja dan TPAK



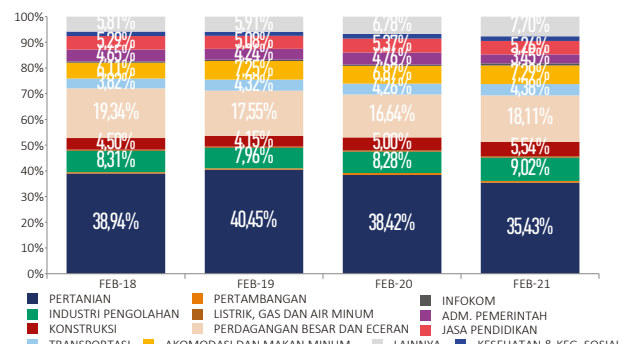
**Grafik 6.3** Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

industri yang mengarah pada otomasi produk/padat modal.

**Jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja pada Februari 2021 lebih rendah dibandingkan dengan Februari 2020.** Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara turun -2,32% (yoy), dari 7,65 juta orang per Februari 2020 menjadi 7,475 juta orang pada Februari 2021. Sama halnya dengan Angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja turun -3,65% (yoy) menjadi 7,03 juta orang pada Februari 2021.

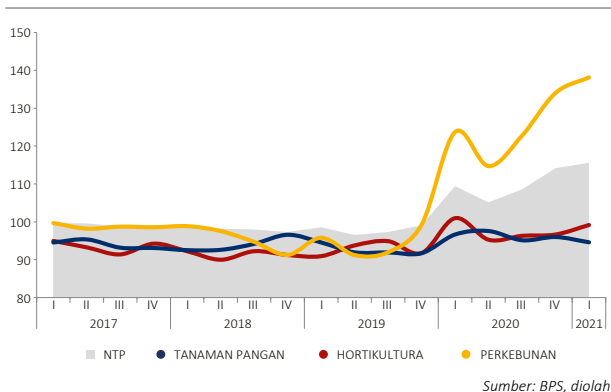
**Jumlah penduduk yang bekerja berkurang di tengah peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Hal ini menunjukkan serapan tenaga kerja di sejumlah lapangan usaha penopang ekonomi di Sumatera Utara mengalami penurunan.**

Serapan tenaga kerja pada LU Pertanian, sebagai LU utama mengalami penurunan. Per Februari 2021



Sumber: BPS, diolah

**Grafik 6.5** Pangsa Pekerja Sektoral

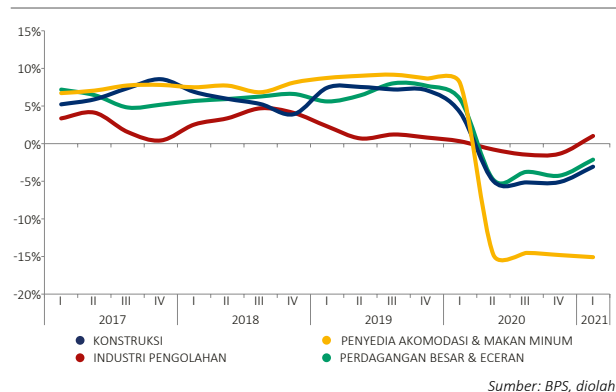


**Grafik 6.6** Perkembangan NTP

pangsanya tercatat 35,43% dari total tenaga kerja yang terserap, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Serapan tenaga kerja LU Pertanian berkurang karena kondisi cuaca yang kurang baik berpotensi menyebabkan gagal panen sehingga mempengaruhi optimisme pelaku sektor pertanian. Lebih lanjut, LU dengan pangsa cukup besar yang juga mengalami penurunan serapan tenaga kerja yaitu LU Jasa Pendidikan. Pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada LU Jasa Pendidikan seiring dengan larangan pembelajaran tatap muka.

Namun, pangsa beberapa LU utama Sumatera Utara mulai menunjukkan perbaikan di tengah pandemi. Lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan yaitu Perdagangan Besar Eceran (1,47 poin), Industri Pengolahan (0,74 poin) dan Akomodasi & Makan Minum (0,42 poin). Kenaikan ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi seiring dengan implementasi program vaksinasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah.

**Tren penurunan tenaga kerja di lapangan usaha Pertanian sejak 2015 berlanjut.** Meski indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV-2020 sebesar 114,17 lebih baik dibanding tahun lalu dan triwulan sebelumnya, seiring perbaikan harga komoditas terutama hasil perkebunan. Namun, imbal hasil tanaman pangan dan hortikultura yang belum meningkat memicu tenaga kerja di LU Pertanian beralih ke LU lain yang memberi pendapatan lebih baik. Selain itu, minat generasi muda yang cenderung



**Grafik 6.7** Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

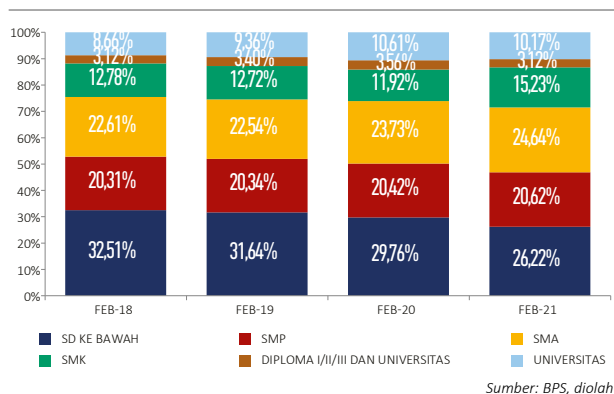
rendah untuk berkecimpung dalam usaha pertanian juga menjadi salah satu penyebab terus menurunnya serapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini.

**Jumlah tenaga kerja pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran meningkat paling tinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya.**

Penyerapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran meningkat 1,47% (yoy), dari 1,21 juta orang per Februari 2020 menjadi 1,27 juta orang per Februari 2021. Jumlah tenaga kerja yang diserap sektor ini setara dengan 18,32% penduduk bekerja di Sumatera Utara. Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor ini ditengarai merupakan imbas semakin berkembangnya pemasaran *digital* terutama di era pandemi sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih profesi atau mengembangkan usahanya.

**Serapan lapangan usaha utama industri pengolahan meningkat.**

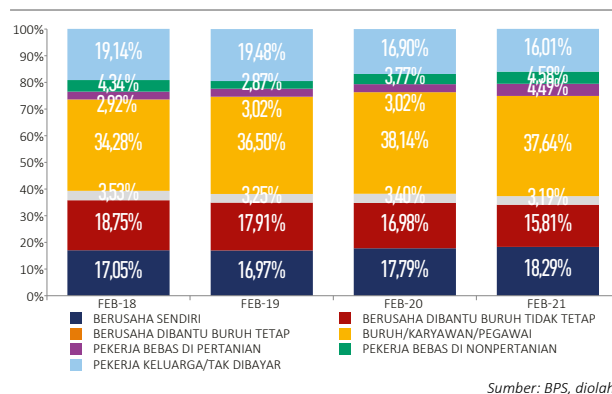
Lapangan usaha industri pengolahan menyerap 634 ribu orang atau 9,12% dari jumlah penduduk bekerja di Sumatera Utara. Jumlah ini menempatkan Industri Pengolahan pada posisi ketiga LU dengan serapan tenaga kerja terbanyak. Tenaga kerja yang diserap LU Industri Pengolahan meningkat 0,74% (yoy) dibandingkan Februari 2020. Kinerja perekonomian global yang mulai pulih serta *demand* konsumsi yang mulai tumbuh seiring dengan implementasi vaksinasi menyebabkan peningkatan serapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan.



**Grafik 6.8** Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

**Tenaga kerja pendidikan atas dan tinggi mulai mendominasi struktur tenaga kerja di Sumatera Utara.** Pangsa jumlah pekerja berpendidikan atas dan tinggi Sumatera Utara sebesar 53,16%. Namun, tenaga kerja jenjang pendidikan atas dan tinggi ini tidak seluruhnya mampu terserap di industri. Hal ini terkonfirmasi dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka untuk jenjang pendidikan tersebut.

**Jumlah penduduk bekerja berpendidikan tinggi menurun -0,44% dalam setahun.** Per Februari 2021, serapan tenaga kerja lulusan diploma dan universitas tercatat 935 ribu orang. Secara keseluruhan, tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 3,29 juta orang (46,84%), SMA sebanyak 1,73 juta orang (24,64%), SMK sebanyak 1,07 juta orang (15,22%), dan diploma ke atas sebanyak 935 ribu orang atau 13,30% dari total tenaga kerja.



**Grafik 6.9** Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama

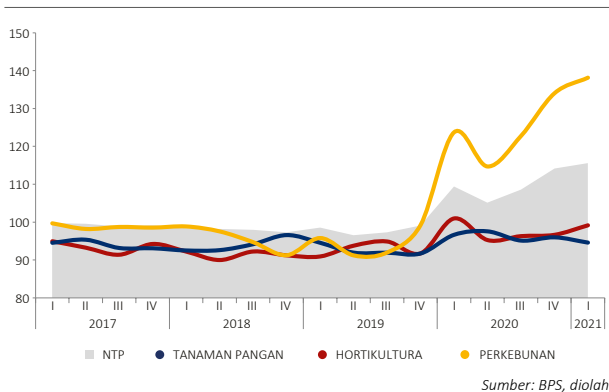
**Indikator lain kondisi ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja dengan jam kerja penuh yang berkurang.** Dalam setahun terakhir, jumlah pekerja penuh turun -5,02% menjadi 6,93 juta orang. Pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja 35 jam per minggu atau lebih, yang dikaitkan dengan produktivitas pekerja. Jumlah pekerja penuh yang berkurang diprediksi sejalan dengan perlambatan kinerja industri pengolahan. Penurunan tersebut disebabkan banyaknya perusahaan yang menerapkan mekanisme *shifting* (kerja bergilir) untuk mengurangi beban perusahaan di tengah masih lemahnya permintaan akibat pandemi.

**Dominasi pekerja penuh pada struktur angkatan kerja sejalan dengan struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama.** Lapangan kerja utama dengan pangsa terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai yakni 37,64%, diikuti kategori tenaga kerja berusaha sendiri yaitu 18,29%.

**Tabel 6.1** Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh)

Klasifikasi Pekerja	Jumlah Pekerja (Ribuan Orang)			Pertumbuhan (yoy)
	Feb-20	Feb-21	Selisih	
Pekerja Penuh (≥35 jam per minggu)	7.296	6.930	(366)	-5,02%
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam per minggu)	4.922	4.668	(254)	-5,16%
-Setengah Penganggur	2.374	2.262	(112)	-4,72%
-Pekerja Paruh Waktu	540	507	(33)	-6,11%
<b>Jumlah</b>	<b>12.218</b>	<b>11.598</b>	<b>(620)</b>	<b>-5,07%</b>

Sumber: BPS, diolah



**Grafik 6.10** Perkembangan Nilai Tukar Petani

## 6.2 KESEJAHTERAAN

### 6.2.1 Nilai Tukar Petani

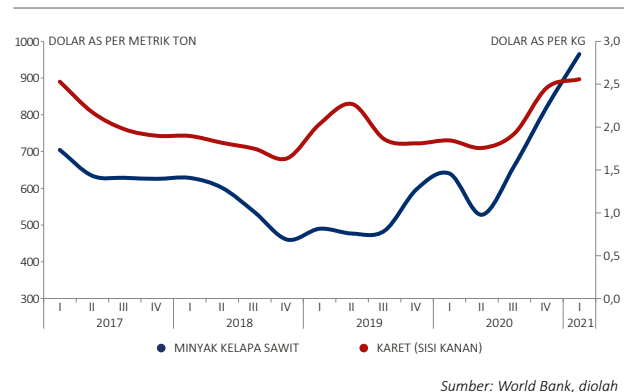
**Pada triwulan I-2021, kesejahteraan petani di Sumatera Utara membaik.** Nilai tukar petani (NTP) Sumatera Utara pada triwulan I-2021 sebesar 115,57 atau naik 5,63% dibandingkan dengan triwulan I-2020 yang sebesar 109.41. Dengan NTP di atas 100, petani mengalami surplus.

**Nilai tukar petani subsektor tanaman perkebunan rakyat tumbuh tinggi, sejalan dengan kenaikan harga CPO dan karet dunia.** Nilai tukar petani sektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) Sumatera Utara pada triwulan I-2021 naik 11,67% (yoy), sejalan dengan harga komoditas minyak sawit dan karet global yang terapresiasi hingga 50,75% (yoy) dan 38,76% (yoy).

**Tabel 6.2** Harga Gabah

Kekeringan	Harga per Kg		Pertumbuhan (yoy)
	TW I 2020	TW I 2021	
Harga GKP Petani	4.515	4.556	0,92%
Harga GKP Penggilingan	4.572	4.622	1,10%
Harga GKG Petani	5.479	5.424	-1,01%
Harga GKG Penggilingan	5.539	5.511	-0,51%
Harga Gabah Kualitas Rendah Petani	4.338	4.363	0,58%
Harga Gabah Kualitas Rendah Penggilingan	4.393	4.412	0,43%

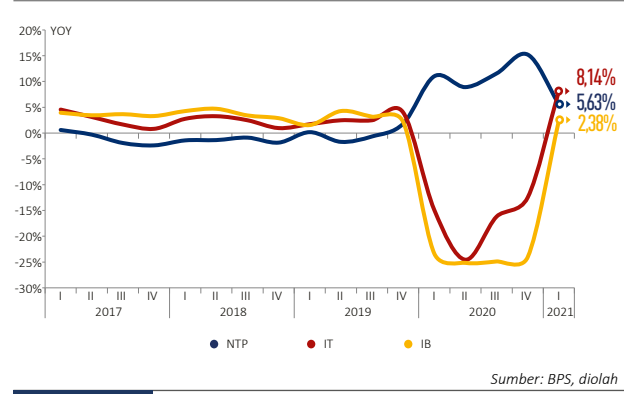
Sumber : BPS, diolah



**Grafik 6.11** Perkembangan Harga Komoditas Perkebunan

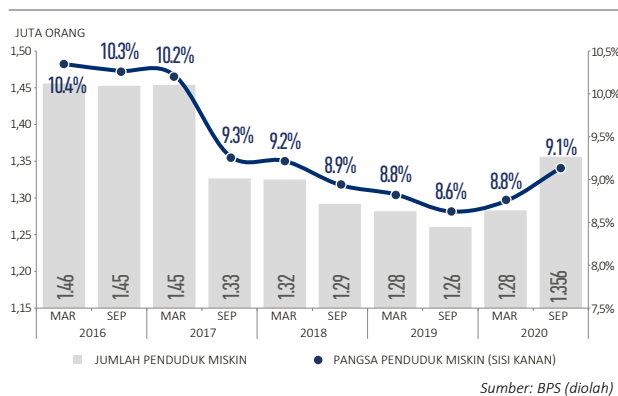
**Berbeda dengan subsektor tanaman perkebunan, nilai tukar petani subsektor tanaman pangan dan hortikultura menurun.** Nilai tukar petani (NTP) subsektor tanaman pangan pada triwulan I-2021 turun sebesar -2,12% (yoy), sementara NTP subsektor hortikultura turun -1,79% (yoy). Penurunan NTP subsektor tanaman pangan diperkirakan dampak dari turunnya harga gabah hasil produksi yaitu Gabah Kering giling (GKG) di tingkat petani dan penggilingan.

**Tingkat penerimaan petani yang lebih besar dari pengeluarannya menyebabkan petani dalam kondisi surplus.** Pada triwulan I-2021, indeks yang diterima petani (IT) sebesar 123,31 atau naik sebesar 8,14% (yoy). Sementara indeks yang dibayarkan petani sebesar 106,7 atau naik 2,38% (yoy). Meskipun kedua indeks mengalami kenaikan namun kenaikan indeks yang diterima petani lebih besar dibanding indeks yang dibayarkan petani, sehingga petani mengalami kondisi surplus.

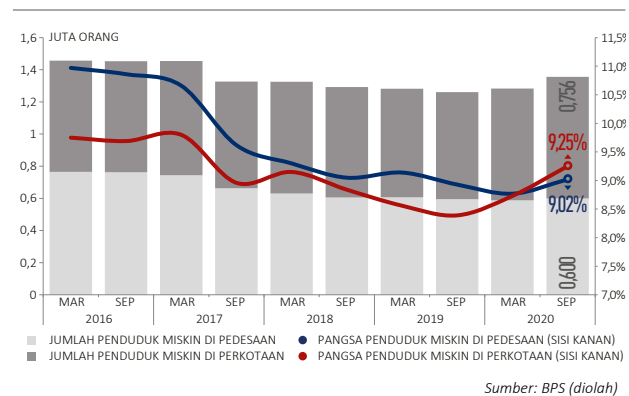


**Grafik 6.12** IT dan IB Sumatera Utara

Sumber : BPS, diolah



**Grafik 6.13** Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara



**Grafik 6.14** Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan dan Perkotaan

## 6.2.2 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Meningkat

**Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara bertambah.** Angka kemiskinan<sup>1</sup> Sumatera Utara pada September 2020 sebesar 9,14% dari jumlah penduduk, lebih tinggi dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 8,63%. Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1,26 juta orang pada September 2019 menjadi 1,36 juta jiwa pada September 2020.

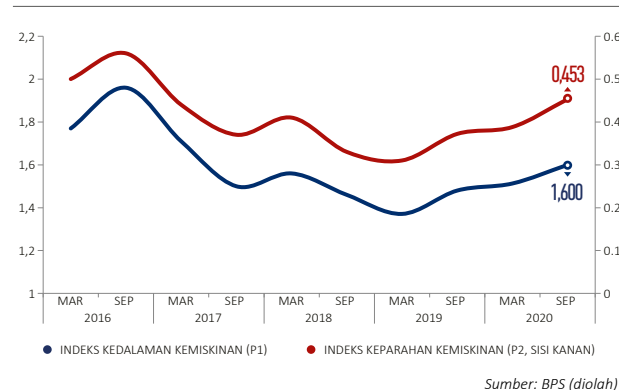
**Angka kemiskinan di Sumatera Utara lebih rendah daripada nasional.** Sumatera Utara menempati urutan ke-5 dari daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera pada September 2020. Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera adalah Aceh (15,43%), sedangkan yang terendah di Kepulauan Bangka Belitung (4,69%).

**Tingkat kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan naik.** Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada September 2020 sebanyak 600.000 orang. Jumlah ini meningkat 4.960 orang atau 0,09% dalam setahun. Lebih lanjut, jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 756.000 orang, bertambah 90.540 orang atau 0,86% secara tahunan. Tingkat kemiskinan di pedesaan yang sebesar 9,02% lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan

<sup>1</sup> Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis

di perkotaan yang sebesar 9,25%. Kenaikan jumlah penduduk miskin terutama di perkotaan sejalan dengan banyaknya perusahaan yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kinerja perekonomian Sumatera Utara tumbuh negatif.

**Komoditas makanan menjadi penyumbang utama garis kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan.** Komoditas makanan menyumbang garis kemiskinan terbesar, dengan andil 72,75% di perkotaan dan 77,79% di pedesaan. Ada 5 komoditas utama pada komponen makanan dengan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Adapun komoditas pada kelompok bukan makanan sebagai penyumbang terbesar garis kemiskinan Sumatera Utara adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.



**Grafik 6.15** Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

**Tabel 6.3 Komoditas Penyumbang Garis Kemiskinan**

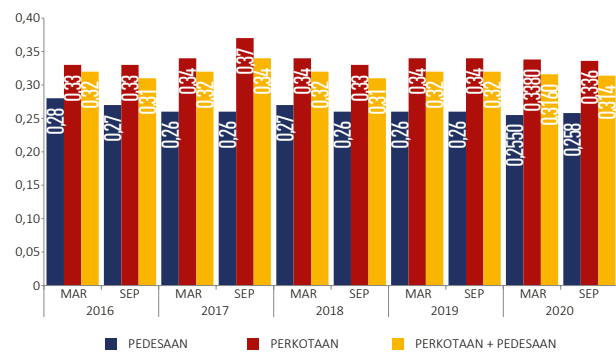
Perkotaan		Pedesaan	
Jenis Komoditas	Sumbangan	Jenis Komoditas	Sumbangan
<b>Makanan</b>	<b>72,75%</b>	<b>Makanan</b>	<b>77,79%</b>
Beras	18,13%	Beras	25,70%
Rokok kretek filter	11,07%	Rokok kretek filter	12,33%
Tongkol/tuna/cakalang	3,57%	Cabai merah	5,76%
Telur ayam ras	3,39%	Telur ayam ras	2,80%
Gula pasir	2,58%	Gula pasir	2,74%
Bawang merah	2,19%	Tongkol/tuna/cakalang	2,56%
<b>Bukan Makanan</b>	<b>27,25%</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>22,21%</b>
Perumahan	5,77%	Perumahan	5,66%
Listrik	3,22%	Bensin	2,22%
Bensin	3,16%	Pendidikan	1,88%
Pendidikan	2,66%	Listrik	1,42%
Angkutan	2,28%	Pakaian jadi anak-anak	1,06%
Pakaian jadi anak-anak	1,07%	Kesehatan	0,99%

Sumber : BPS, diolah

**Bertambahnya jumlah penduduk miskin sejalan dengan kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.** Sepanjang September 2019 hingga September 2020, indeks kedalaman kemiskinan (P1) meningkat dari 1,48 menjadi 1,59. Peningkatan P1 terjadi di pedesaan dan perkotaan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (P2) meningkat dari 0,37 menjadi 0,45. Peningkatan P2 juga terjadi di perkotaan dan pedesaan. Peningkatan P1 dan P2 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin meningkat.

### 6.2.3 Ketimpangan Pendapatan

**Jumlah penduduk miskin bertambah, namun ketimpangan pendapatan menurun.** Ketimpangan pendapatan dinyatakan melalui rasio gini dengan interval 0 - 1. Rasio gini mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin dalam. Rasio gini Sumatera Utara pada September 2020 sebesar 0,314 atau lebih rendah daripada September 2019 yang



Sumber : BPS, diolah

**Grafik 6.16 Perkembangan Koefisien Gini**

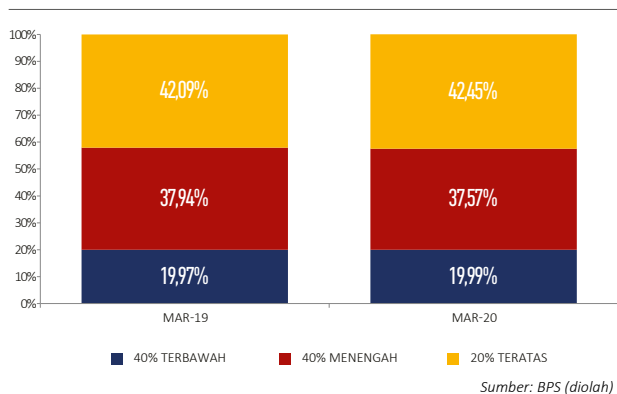
sebesar 0,320. Rasio ini menunjukkan ketimpangan di Sumatera Utara pada September 2020 lebih rendah daripada ketimpangan pada September 2019. Rasio gini Sumatera Utara yang lebih rendah daripada rasio gini nasional yang sebesar 0,385 merupakan rasio gini provinsi terendah ke-5 di Indonesia.

**Ketimpangan di perkotaan lebih dalam dari pedesaan.** Pada September 2020, rasio gini di perkotaan Sumatera Utara 0,336 atau lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan, yakni 0,258. Ketimpangan di perkotaan dan pedesaan menurun dalam setahun terakhir.

**Berdasarkan distribusi pengeluaran, ketimpangan di Sumatera Utara merupakan kategori rendah.**

Pangsa pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di Sumatera Utara yang sebesar 19,99% menunjukkan ketimpangan rendah<sup>2</sup>. Porsi ini sedikit meningkat dari Maret 2019 yang sebesar 19,97%. Ketimpangan pengeluaran penduduk dipengaruhi kenaikan distribusi pengeluaran per kapita per bulan kelompok masyarakat 20% teratas yang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kelompok lain. Adapun ketimpangan pada kelompok 40% menengah berkurang, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Untuk menekan rasio gini, pengeluaran per kapita kelompok 40% terbawah perlu dipercepat, antara lain melalui program bantuan langsung tunai, terutama pada masa pandemi COVID-19.

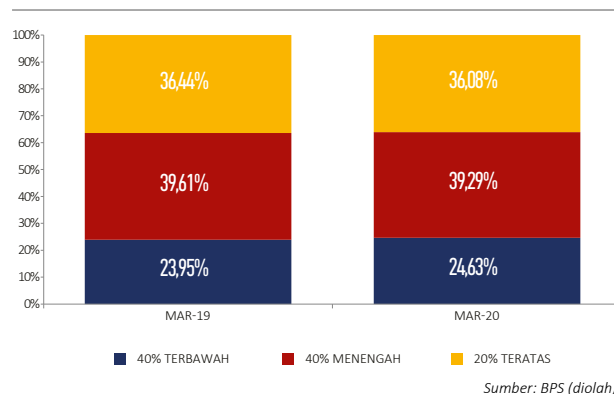
<sup>2</sup> Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, tingkat ketimpangan dalam kategori rendah apabila di atas 17%



**Grafik 6.17** Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Perkotaan

**Distribusi pendapatan masih timpang, terutama di perkotaan.** Ketimpangan itu tercermin dari distribusi pengeluaran yang tidak merata, yakni sekitar 80% dinikmati masyarakat berpendapatan menengah dan kelompok teratas atau sekitar 60% dari jumlah penduduk. Sementara, masyarakat berpendapatan rendah atau 40% dari jumlah penduduk hanya mendapat 20% pendapatan perkotaan. Hal ini mengindikasikan pemerataan masih terkendala, antara lain oleh: 1) perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, di mana perekonomian Sumatera Utara bagian timur tumbuh lebih tinggi daripada bagian barat; 2) alokasi investasi belum merata. Pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol dan bandara masih terkonsentrasi di wilayah timur. Adapun pembangunan sejumlah proyek yang masih berlangsung belum berdampak signifikan; 3) mobilitas faktor produksi yang rendah, di antaranya tenaga kerja atau modal yang belum merata, menyebabkan ketimpangan di tingkat regional; serta 4) ketersediaan infrastruktur belum mencakup seluruh daerah di Sumatera Utara.

**Pembangunan modal manusia bisa memperbaiki aspek pemerataan dalam distribusi pendapatan.** Ketimpangan bisa ditekan dengan cara memudahkan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan cara ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia, akan membaik. IPM juga merefleksikan akses penduduk terhadap hasil pembangunan.



**Grafik 6.18** Distribusi Pengeluaran Penduduk di Wilayah Pedesaan

**Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara meningkat terbatas.** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara pada 2020 sebesar 71,77 atau meningkat dari 2019 yang sebesar 71,74. Peningkatan IPM didorong perbaikan seluruh komponen. Namun, IPM Sumatera Utara selalu di bawah IPM Nasional sejak 2016.

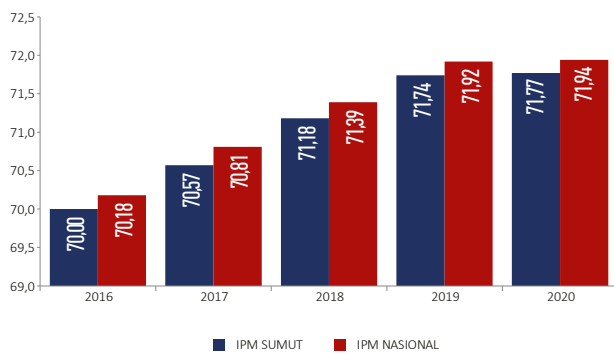
Pada 2019, IPM Sumatera Utara merupakan nomor 5 tertinggi di Sumatera, yakni di bawah Kepulauan Riau (75,48), Riau (73,00), Sumatera Barat (72,39), dan Aceh (71,90). Secara nasional, IPM Sumatera Utara ada di peringkat ke-12.

**Indeks Pembangunan Manusia di seluruh kabupaten/kota membaik. Hal ini menunjukkan distribusi pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia.** Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, kota Medan menyandang status IPM

**Tabel 6.4** IPM Sumut Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	68,33	68,37	68,61	68,95	69,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,00	13,10	13,14	13,15	13,23
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,12	9,25	9,34	9,45	9,54
Pengeluaran per Kapita	Rp Ribu	9.744	10.036	10.391	10.649	10.420
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77
Pertumbuhan IPM (yoy)	%	0,71	0,81	0,86	0,79	0,04

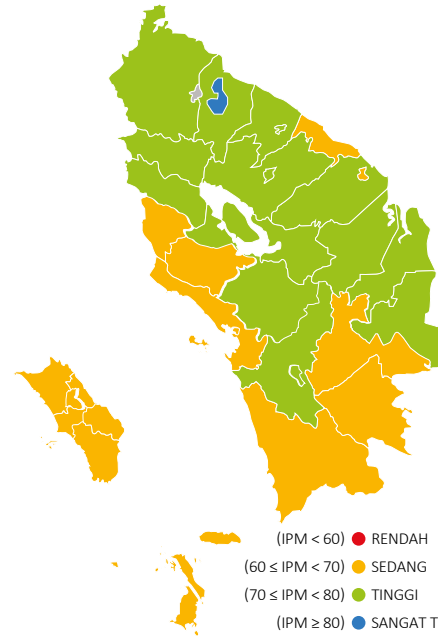
Sumber: BPS (diolah)



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 6.19** Perkembangan IPM Sumut dan Nasional

“sangat tinggi”, yakni 80 atau lebih besar. Sementara, 19 kabupaten/kota menyandang status IPM “tinggi”, dengan IPM lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80. Sementara, kabupaten/kota lainnya berstatus “sedang”. Kabupaten/kota yang mencatat kemajuan pembangunan manusia paling cepat antara lain Paluta (0,81%), Nias Utara (0,61%), dan Nias Barat (0,61%).



Sumber: BPS (diolah)

**Grafik 6.20** IPM 33 Kabupaten/Kota Sumut



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



Foto : Bandara Kualanamu

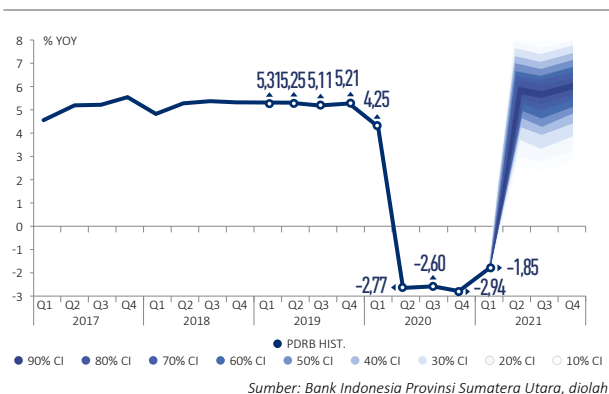


## Bab VII

# Prospek Perekonomian Daerah

Pemulihan ekonomi akan berlanjut hingga akhir 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Sumatera Utara diprediksi tumbuh pada rentang 3%-4,5%. Program vaksinasi diharapkan menjadi jawaban dari perbaikan perekonomian. Peningkatan pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, menunjukkan perbaikan. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat di HBKN Idul Fitri dan jaring pengaman sosial dari pemerintah. Program vaksinasi diharapkan menjadi jawaban dari perbaikan perekonomian. Sementara itu, secara keseluruhan tahun, tekanan inflasi diperkirakan meningkat namun masih dalam rentang sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ . Fase pemulihan yang berlangsung akan meningkatkan permintaan domestik sekaligus memperbaiki daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kenaikan harga.





Grafik 7.1 Proyeksi PDRB

## 7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI KESELURUHAN TAHUN 2021

Optimisme pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada tahun 2021. Prospek pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diperkirakan berada dalam rentang 3-4,5% secara tahunan. Percepatan ekonomi bersumber dari permintaan eksternal dan domestik yang diperkirakan tumbuh positif dan lebih tinggi dari 2020. Telah dimulainya pendistribusian vaksinasi menumbuhkan sinyal positif bagi dunia usaha dan mulai meningkatkan pertumbuhan di beberapa sektor.

### 7.1.1 Komponen Permintaan

Ke depan, konsumsi rumah tangga diprediksi akan terus pulih didorong oleh menguatnya pendapatan seiring dengan berlanjutnya insentif program Pemulihan Ekonomi Nasional serta peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 20,63% dari realisasi anggaran PEN tahun lalu sebesar Rp579,8 triliun. Optimisme terkendalinya sisi kesehatan berpeluang mendorong masyarakat untuk berbelanja.

Seiring dengan optimisme perbaikan kinerja ekonomi, konsumsi pemerintah akan mengalami akselerasi untuk keseluruhan tahun 2021. Peningkatan kinerja tersebut terutama akan didorong oleh adanya kenaikan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Prospek ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021 mendorong optimisme Pemda untuk meningkatkan target penerimaannya, seperti pajak terkait kendaraan bermotor serta pajak terkait usaha perhotelan dan restoran. Dengan naiknya pendapatan, rencana belanja diprediksi menjadi lebih ekspansif dan tumbuh meningkat setelah tercatat kontraksi pada tahun 2020. Berbagai komponen belanja akan mengalami akselerasi seperti belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bansos. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya program insentif dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), adanya peningkatan event serta MICE, dan promosi pariwisata daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, investasi juga tumbuh dan terakselerasi. Akselerasi investasi didorong oleh berlanjutnya proyek tahun jamak infrastruktur nasional dan daerah, diantaranya Tol Trans Sumatera, pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, *Sport Center*, LRT dan BRT, dan lainnya. Sejak 2018 sampai 2024, total investasi untuk Proyek Strategis Nasional diperkirakan mencapai Rp108,96 triliun. Sementara itu, total investasi untuk Proyek Strategis Daerah diperkirakan mencapai Rp84 triliun dalam jangka waktu 2020 – 2024. Selain itu, optimisme percepatan pemulihan ekonomi global turut mendorong pelaku bisnis memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Iklim investasi akan lebih kondusif didukung oleh implementasi Undang Undang Cipta Kerja.

Ekspor diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan performa negara mitra dagang utama yang kian membaik. Realisasi pertumbuhan ekspor pada triwulan I-2021 menunjukkan kinerja yang menggembirakan, secara tahunan terakselerasi hingga 8,65% mengakhiri kontraksi yang terjadi beberapa triwulan ke belakang. Ke depan, penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan uji coba vaksin berpeluang mempercepat rantai pasok dunia kembali normal. Giatnya aktivitas kegiatan industri hilir di negara - negara mitra dagang mendorong peningkatan permintaan komoditas ekspor utama seperti kelapa sawit, karet, dan kopi. Kenaikan permintaan ekspor juga turut didukung oleh cerahnya perkiraan harga



**Tabel 7.1** Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2019 (%,yoy)	2020 (%,yoy)	2021 (%,yoy)
<b>Pertumbuhan Ekonomi Dunia</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>6,0</b>
<b>Negara Maju</b>	<b>1,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>5,1</b>
Amerika Serikat	2,2	-3,5	6,4
Euro Area	1,3	-6,6	4,4
Jepang	0,3	-4,8	3,3
<b>Negara Berkembang</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,2</b>	<b>6,7</b>
Tiongkok	5,8	2,3	8,4
India	4,7	-8,0	12,5

\* Sumber: IMG WEO Outlook April 2021, diolah; \*) proyeksi;

komoditas utama di pasar internasional. Dari sisi perkembangan harga tahun 2021, harga komoditas ekspor minyak kelapa sawit di pasar internasional diprediksi tumbuh. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan seiring dengan aktivitas ekonomi yang berangsur pulih. Beberapa produk turunan kelapa sawit seperti minyak goreng dan bahan baku kesehatan juga meningkat sehingga mendorong kenaikan harga minyak kelapa sawit internasional. Harga kopi arabika diprediksi juga mengalami peningkatan didorong oleh terbatasnya pasokan akibat faktor cuaca di negara produsen. Selain itu harga karet alam dan minyak mentah diperkirakan meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Ekspor antardaerah pun diprediksi turut meningkat sejalan dengan mulai kembali normalnya aktivitas konstruksi dan industri manufaktur di Jawa. Lebih lanjut, meningkatnya ekspor serta masifnya rencana investasi diprediksi turut mendorong kebutuhan impor barang modal untuk kebutuhan pembangunan, sehingga untuk keseluruhan tahun 2021, impor juga diprakirakan akan terakselerasi.

### 7.1.2 Komponen Lapangan Usaha

Akselerasi dari sisi permintaan akan berdampak pada perbaikan kinerja seluruh lapangan usaha utama. Lapangan usaha perdagangan diprediksi tumbuh positif ditopang oleh perbaikan pendapatan masyarakat. Dampak stimulus dari pemerintah berupa bantuan hibah modal kerja dan restrukturisasi kredit untuk UMKM diprakirakan juga menjaga keberlangsungan usaha. Pengendalian kasus pandemi serta penerapan

protokol kesehatan yang baik akan menghidupkan kembali kegiatan MICE dan pariwisata. Prospek ini akan mendorong percepatan lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Perbaikan LU Perdagangan juga diprediksi akan membaik diorong oleh Kebijakan Bank Indonesia terkait pelonggaran suku bunga BI-7DRRR, pelonggaran uang muka kredit kendaraan bermotor dan LTV/FTV *ratio* untuk properti. Kebijakan ini turut didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melakukan relaksasi PPnBM dan OJK yang menetapkan relaksasi aturan mengenai ATMR kredit kendaraan bermotor.

Membbaiknya investasi bangunan turut menopang kinerja lapangan usaha konstruksi. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur tahun jamak serta prospek peningkatan permintaan properti. Kinerja lapangan usaha pertanian diprediksi terakselerasi dari tahun sebelumnya didorong oleh perbaikan produktivitas komoditas perkebunan dampak *replanting* tahun - tahun sebelumnya. Kondisi cuaca diprediksi lebih kondusif dan menopang peningkatan produksi pertanian. Permintaan bahan makanan dari penyedia akomodasi dan makan minum mulai membaik seiring dengan peningkatan mobilitas dan mengakeselerasi kinerja pertanian lebih lanjut. Tercukupinya bahan baku diiringi oleh peningkatan permintaan global dan domestik diprediksi mendorong percepatan lapangan usaha industri pengolahan. Kegiatan produksi usaha manufaktur utama seperti CPO dan turunannya, karet dan kopi olahan membaik sejalan dengan menguatnya industri hilir di negara mitra dagang. Kondisi sejumlah sektor usaha di dalam negeri yang membaik turut menyokong percepatan pertumbuhan subsektor industri logam dasar, industri pakan ternak, dan industri plastik.

### 7.1.3 RISIKO PERTUMBUHAN EKONOMI

Pandemi COVID-19 menjadi kendala utama pemulihan ekonomi global dan domestik. Tren kasus infeksi harian yang tinggi dan selalu menembus rekor membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk



menutup diri dari warga negara asing (WNA). Hal ini bisa diperburuk oleh sentiment negatif terkait kredibilitas Indonesia dalam hal penanganan pandemi COVID-19 sehingga semakin menahan kedatangan wisatawan mancanegara.

Dari sisi pembiayaan, sektor keuangan yang menjadi kendala adalah fenomena *credit crunch* di mana penyaluran kredit oleh perbankan terhambat karena bank enggan melakukan penyaluran.

Risiko juga datang dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang diminta melego sahamnya ke Pemerintah. Kendati deregulasi untuk investasi telah ditempuh oleh pemerintah, tetapi hal ini tetap terpantau sebagai risiko terhadap perekonomian.

Penting sekali dalam mendorong perekonomian untuk terus melihat dari dua sisi, tidak hanya mendorong *supply* tetapi juga memperhatikan sisi *demand*. Akselerasi reformasi juga harus dilakukan seperti Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola investasi harus dilakukan untuk mendorong investasi tumbuh positif. Hal yang paling utama, diharapkan vaksinasi tidak memakan lebih dari satu tahun, serta efektivitas vaksin yang diharapkan ampuh untuk mengusir pandemi lebih cepat.

## 7.2 PROSPEK INFLASI KESELURUHAN TAHUN 2021

**Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2021 diperkirakan meningkat sejalan dengan proses pemulihan perekonomian.** Inflasi Sumatera Utara tahun 2021 diperkirakan berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni  $3 \pm 1\%$ . Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan membaiknya pendapatan dan perekonomian. Perbaikan konsumsi akan berdampak pada naiknya tekanan inflasi pangan (hortikultura, aneka ikan, daging ayam ras), serta barang dan jasa pada kelompok transportasi, pakaian dan alas kaki, rekreasi, perumahan dan listrik, serta penyediaan makanan dan



INFLASI SUMATERA UTARA  
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, diolah

Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi

minuman. Di samping itu, rencana dimulainya kembali aktivitas belajar dan mengejar di gedung sekolah diperkirakan akan mendorong inflasi terkait biaya pendidikan. Secara keseluruhan laju inflasi Sumatera Utara pada 2021 akan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

**Koordinasi pengendalian inflasi di Sumatera Utara akan tetap diperkuat untuk memastikan pencapaian target inflasi di 2021.** Berbagai program pengendalian harga telah dipersiapkan oleh TPID dalam menghadapi prospek peningkatan inflasi tahun 2021. Program pengendalian inflasi fokus pada pilar 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Untuk aspek K1 (Keterjangkauan Harga), dilakukan melalui pemantauan harga pangan strategis dan pelaksanaan program operasi pasar pada periode-periode tertentu, khususnya saat HBKN. Selain itu, TPID juga akan kembali mendorong peningkatan kemandirian pangan rumah tangga di berbagai daerah. Terkait K2 (Ketersediaan Pasokan), upaya menjaga ketersediaan pasokan antara lain ditempuh melalui program *food estate*, penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terutama yang bersifat lintas provinsi, dan optimalisasi penggunaan teknologi (digitalisasi) pangan. Selain itu, implementasi penggunaan teknologi *storage* pasca panen juga akan terus diperluas. Dari sisi K3 (Mendorong Kelancaran Distribusi), upaya memperlancar distribusi dilakukan melalui penguatan inovasi proses pembelian dan distribusi barang melalui jasa transportasi *online*. Sementara itu, pada



aspek K4 (Komunikasi Efektif), peningkatan kualitas data terkait produksi dan konsumsi pangan menjadi program prioritas yang akan dilakukan di berbagai daerah. Selain itu, komunikasi dengan petani terkait manajemen pola tanam dan berbagai program edukasi melalui iklan layanan masyarakat juga termasuk di dalam program utama TPID pada tahun 2021.

Seiring dengan tekanan inflasi yang diperkirakan meningkat, maka risiko juga meningkat. Risiko tersebut antara lain 1) peningkatan permintaan domestik sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung; 2) kesinambungan pasokan dan distribusi pangan antardaerah dan antarwaktu yang tidak dapat dikelola optimal; serta 3) risiko respon ekspansi moneter yang baru dirasakan pada tahun 2021. Lebih lanjut, untuk memitigasi risiko tersebut, BI akan terus memperkuat sinergi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah, juga Tim Pengendali Inflasi Daerah, sehingga inflasi masih terjaga pada rentang sasaran.

### 7.3 REKOMENDASI

Mengawal masa pemulihan ekonomi yang berlanjut hingga tahun 2021, setidaknya terdapat lima strategi utama yang perlu dilakukan agar akselerasi pertumbuhan dapat berjalan optimal, antara lain:

- **Pertama, penanganan COVID-19 yang efektif menjadi kunci akselerasi pemulihan ekonomi ke depan.** Untuk itu, sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, pemerintah daerah perlu mengupayakan ketersediaan vaksin bagi kelompok masyarakat rentan, sekaligus mempersiapkan sarana prasarana kesehatan yang lebih baik.
- **Kedua, menjaga proses transisi pemulihan ekonomi dengan mendorong proses pemulihan sektor prioritas yang aman dan produktif, yaitu sektor dengan risiko penularan COVID-19 rendah tetapi memiliki daya dukung pemulihan dan potensi ekspor.** Setidaknya terdapat 10 sub-sektor yang dapat diprioritaskan pengembangannya, antara lain tanaman pangan, perkebunan, peternakan, jasa keuangan dan

asuransi, industri makanan minuman, konstruksi, perdagangan, tanaman hortikultura, kehutanan dan perikanan. Selain itu, tiga sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan juga memiliki daya serap tenaga kerja yang besar

**a. Prioritisasi sektor pertanian dapat difokuskan pada perbaikan kualitas infrastruktur dan distribusi.**

Setidaknya terdapat tiga hal krusial dalam meningkatkan produktivitas yaitu ketersediaan saluran irigasi yang memadai, ketersediaan gudang pertanian dan pemenuhan pupuk bersubsidi.

**b. Pada subsektor perkebunan,** perlunya upaya pemerintah untuk memfasilitasi perolehan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) oleh petani sawit rakyat. Tenaga penyuluh perkebunan yang sangat terbatas di daerah juga menjadi kendala yang perlu diatasi agar akselerasi program pendampingan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dapat berjalan.

**c. Untuk sektor perdagangan,** Pemerintah perlu berupaya agar pemulihan bisa menjadi lebih cepat, tetapi juga tidak berisiko terhadap peningkatan kasus COVID-19. Di tengah belum pulihnya kepercayaan masyarakat untuk berbelanja secara langsung, pemerintah kiranya dapat hadir melalui fasilitasi UMKM *go digital* atau *event* promosi *online* lainnya.

Selain itu faktor pembiayaan juga berperan penting dalam mendorong pembukaan sektor prioritas. Hasil asesmen Bank Indonesia Sumatera Utara menemukan adanya *gap* pembiayaan modal kerja terutama untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perikanan, dan industri karet dan plastik. Sementara untuk kredit investasi, minat perbankan yang rendah terjadi pada sektor peternakan, industri karet dan plastik, dan perdagangan. Oleh karena itu diperlukan sejumlah upaya seperti program penjaminan oleh Pemerintah agar dapat mempercepat pertumbuhan kredit di subsektor tersebut.



- **Ketiga, mengawal kelanjutan investasi korporasi dan dukungan kebijakan perbaikan iklim investasi, terutama terkait aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.** Investasi yang memiliki kontribusi sekitar tiga puluh persen dari perekonomian menjadi basis perekonomian yang penting bagi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, kepemilikan kawasan industri terintegrasi, dan destinasi pariwisata prioritas, seharusnya menjadi daya tarik bagi investor. Guna mendukung hal tersebut, Bank Indonesia dan instansi lintas sektor menginisiasi lahirnya *North Sumatra Invest* (NSI). Berbagai capaian telah ditorehkan sepanjang 2020 antara lain mempromosikan tujuh proyek strategis Sumatera Utara yang *clean and clear* kepada stakeholder di berbagai negara, peluncuran *website* NSI serta *capacity building* kepada DPMPPTSP dan Bappeda Kab/Kota se-Sumatera Utara. Sinergi lintas sektor merupakan kunci dalam membangun iklim kemudahan termasuk memperbaiki semua prosedur yang berbelit.
- **Keempat, mendorong realisasi fiskal.** Dalam hal ini, Pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan dalam APBN 2021 yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Di daerah, fokus belanja tersebut menjadi sangat penting untuk menstimulasi roda ekonomi, sehingga perlu dipikirkan bagaimana mempercepat belanja barang dan modal (*front loading*) agar dampaknya dirasakan lebih optimal. Di sisi penerimaan, perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah perlu terus kita dorong karena akan memberi dampak signifikan di tengah tertekannya pendapatan daerah di masa pandemi.
- **Kelima, mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan pelaku usaha UMKM.** Hasil analisis Bank Indonesia Sumatera Utara menunjukkan bahwa UMKM yang telah *go digital* dan bergabung dalam korporatisasi memperkuat ketahanan UMKM di tengah

pandemi. Terkait ini, penerapan korporatisasi dan digitalisasi, yang disertai dengan peningkatan peran lembaga keuangan dalam pembiayaan UMKM diperlukan untuk mendorong UMKM naik kelas melalui strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan korporatisasi** dengan (i) memberikan kemudahan izin pembentukan kelembagaan dan relaksasi pajak; dan (ii) mendorong terbangunnya ekosistem korporatisasi seperti sentra UMKM berbasis *value chain* atau bantuan sebagai *offtaker*.
- b. Penguatan digitalisasi** antara lain melalui (i) kerjasama dengan *e-commerce* atau platform digital untuk meningkatkan digitalisasi UMKM serta memprioritaskan pemasaran produk UMKM; dan (ii) perluasan dan peningkatan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran produk UMKM untuk memperkuat proses akuisisi data sekaligus memfasilitasi pembayaran yang lebih efisien.
- c. Mendorong akses pembiayaan kepada UMKM** antara lain melalui (i) program *business matching* melalui koordinasi antara perbankan, *e-commerce*, *fintech* dengan UMKM; dan (ii) koordinasi dalam rangka optimalisasi program pemerintah melalui penguatan program penjaminan dan relaksasi agunan tambahan untuk program KUR.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



► BOKS 4

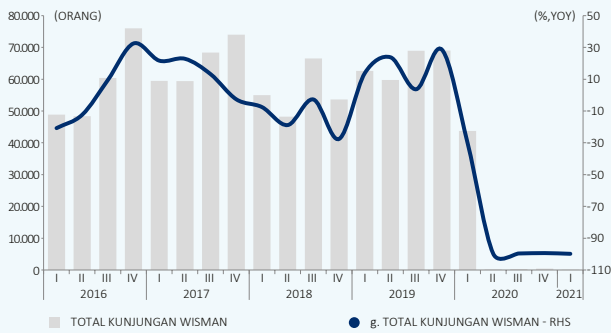
# Genjot Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Kawasan Toba Caldera Resort

---



---

Sumatera Utara terkenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang menyuguhkan ribuan pesona alam yang dapat memanjakan mata. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu cukup memukul sektor pariwisata di Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari anjloknya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara sejak tahun lalu. Namun seiring dengan implementasi vaksinasi diharapkan secara perlahan dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara.



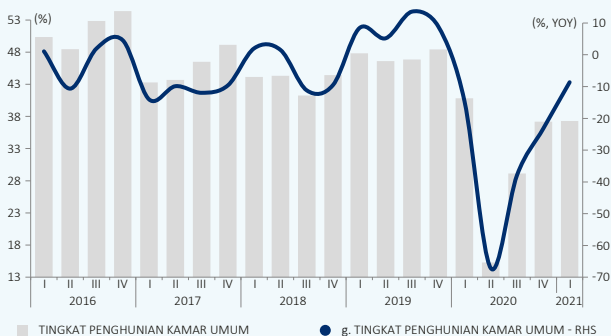
Sumber: BPS Sumut (diolah)

Grafik B4.1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Sejalan dengan tren kenaikan kunjungan wisatawan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) juga mengalami peningkatan tren. Sinyal positif ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa aktivitas perhotelan telah kembali tumbuh menuju arah pemulihan.

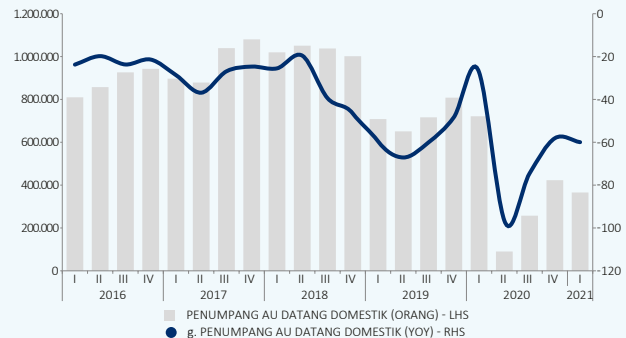
Berdasarkan negara pengunjung, tiga besar negara kunjungan wisman ke Sumatera Utara edisi Maret 2021 dipegang oleh Filipina (14,04%), Malaysia (12,28%), dan Vietnam (3,51). Di tengah pemulihan ekonomi Sumatera Utara, diproyeksikan TPK akan terus tumbuh seiring dengan minat wisman yang berkunjung semakin banyak karena aktivitas pariwisata yang telah dibuka. Harapannya, momentum tersebut dapat mengekskalasi pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Beberapa usulan program pun telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi guna membantu pemulihan sektor Pariwisata tahun 2021, diantaranya adalah melalui (i)



Sumber: BPS Sumut (diolah)

Grafik B4.3 Tingkat Penghunian Kamar

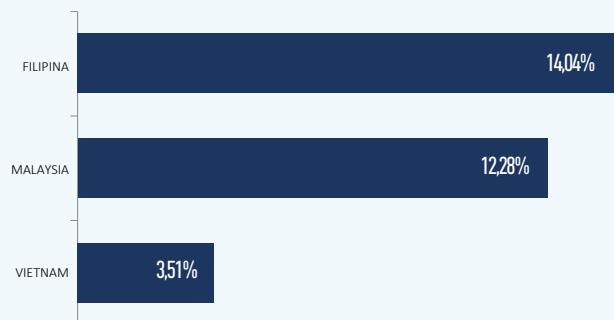


Sumber: BPS Sumut (diolah)

Grafik B4.2 Kunjungan Wisatawan Nusantara

penyelenggaraan pekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Beli Kreatif Danau Toba 2021, (ii) program pengembangan UMKM pendukung pariwisata, dan (iii) program perluasan elektronifikasi di kawasan Danau Toba guna meningkatkan amenities layanan.

Danau Toba dipilih sebagai sentra destinasi Sumatera Utara karena memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Bukan hanya sebagai danau kaldera terbesar di dunia, tetapi masyarakat di sekitaran Danau Toba masih melestarikan budaya asli suku Batak dengan baik, sehingga hal tersebut menjadi perpaduan harmonis antara kesejukan suasana alam dengan kekayaan budaya setempat. Melalui hal tersebut berhasil mengantarkan Danau Toba meraih predikat sebagai 7 (tujuh) keajaiban dunia *Global Geopark* tahun 2021 oleh lembaga internasional UNESCO. Selain itu, Danau Toba juga telah dicanangkan sebagai lima destinasi super



Sumber: BPS Sumut (diolah)

Grafik B4.4 Besar Negara Kunjungan Wisman ke Sumut Maret 2021



Gambar B4.1 Rencana Pengembangan Toba Caldera Resort

prioritas oleh Presiden Joko Widodo, bersama dengan empat destinasi lainnya yaitu Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang. Nama Danau Toba kian mahsyur mendunia yang kelak akan mendatangkan banyak wisatawan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pengembangan amenities yang memadai untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung.

Meraih peluang pengembangan sektor pariwisata, pemerintah melakukan pengembangan wilayah proyek investasi bernama *Toba Caldera Resort*. Program pengembangan ini dikelola oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT). *Toba Caldera Resort* adalah kawasan *resort* dan destinasi wisata terpadu bertema *eco-wisata* seluas 386,72 ha. Menawarkan pemandangan fantastik 360 derajat langsung ke arah Danau Toba, panorama Bukit Barisan, Lembah Sigapiton, dan Pulau Samosir jantungnya Danau Toba.

Dikelilingi oleh perkebunan kopi, jagung, sayuran, serta beberapa area hutan *eucalyptus* dan pinus, *Toba Caldera Resort* menawarkan kombinasi antara keindahan alam yang holistik dengan memadukan perkembangan kawasan di masa depan yang berkontribusi pada pertumbuhan industri pariwisata sehingga dapat menstimulus perekonomian daerah. *Resort* ini akan mengembangkan tiga *district*

(kawasan), yakni *District Central Village*, *District North Ridge*, dan *District South Ridge*. Setiap kawasan tersebut akan menawarkan karakter unik, program, dan fitur yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu kompleks *resort* terpadu berkelas dunia, namun tetap menghormati warisan budaya Batak yang otentik.

Hingga kini proyek *Toba Caldera Resort* terbuka untuk pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya di sekitaran Danau Toba. Kendatipun dengan investor potensial yang tertarik. Sebagai upaya promosi proyek investasi *Toba Caldera Resort* bekerja sama dengan wadah promosi proyek investasi daerah Sumatera Utara yakni *North Sumatra Invest* (NSI). Kini informasi proyek *Toba Caldera Resort* sekarang dapat diakses melalui tautan [www.northsumatrainvest.id](http://www.northsumatrainvest.id).



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## **LAMPIRAN**

# Daftar Istilah

## **Administered Price**

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya bahan bakar, penerangan, dan air serta transportasi ataupun harga barang/jasa yang dipengaruhi oleh ketentuan pemerintah misalnya tembakau dan minuman beralkohol.

## **Base Effect**

Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

## **BEC**

Pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

## **Barang Modal (Capital Goods)**

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi, biasanya bernilai guna lebih dari 1 tahun.

## **Bahan Baku (Raw Material)**

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri.

## **BI 7 Day Reverse Repo Rate**

Suku bunga referensi yang mencerminkan sikap atau arah kebijakan moneter yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya dan diumumkan kepada publik.

## **BI-RTGS**

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, merupakan proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), di mana rekening peserta dapat didebit/ dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

## **Ceteris paribus**

Semua variabel di luar sistem/model dianggap konstan.

## **CPO (Crude Palm Oil)**

Minyak nabati yang dihasilkan oleh buah-buahan dari kelapa sawit.

## **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito).

## **Disposable income**

Sejumlah uang yang dapat dapat dibelanjakan dan ditabung setelah dikurangi dengan pajak penghasilan.

## **Ekspor dan Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar daerah.

## **Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

## **Harga Minyak WTI**

Harga minyak mentah dunia yang mengacu pada sebuah ukuran kualitas bernama *West Texas Intermediate* atau *Texas light sweet*.

## **Indeks Penjualan Barang Konstruksi**

Indeks yang merepresentasikan nilai penjualan dari barang-barang konstruksi.

## **Indeks Keyakinan Konsumen**

Indeks yang dihasilkan oleh Survei Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian, baik saat ini maupun masa mendatang.

## **Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu indeks pembentuk Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang menggambarkan persepsi konsumen akan kondisi perekonomian pada saat ini.

## **Inflasi IHK**

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

## **Inflasi Inti**

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

## **Inflow**

Aliran masuk uang kartal ke Kantor Bank Indonesia.

## **Kredit**

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## **Kredit Investasi**

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik dan pembelian mesin.

## **Kredit Modal Kerja**

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

## **Kredit Konsumsi**

Kredit bagi perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), dan lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

## **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM memiliki prospek bisnis yang baik (*feasible*) tapi belum memiliki kemampuan mengembalikan (*bankable*). Dana KUR berasal dari bank pelaksana, namun dijamin sebagian besarnya oleh Pemerintah.

## **Leading Indicators**

Indikator yang digunakan untuk memprediksi pergerakan atau titik balik dari suatu siklus bisnis.



## **Liaison**

Suatu kegiatan pengumpulan data statistik dan informasi yang dilaksanakan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha mengenai perkembangan dan arah kegiatan usaha.

## **Loan to Value (LTV)**

Sebuah dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan aset yang dijadikan jaminan.

## **Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)**

Persentase kredit/pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. Terminologi NPL untuk bank konvensional sementara NPF untuk bank syariah

## **NTP (Nilai Tukar Petani)**

Rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

## **Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

## **Passthrough effect**

Efek dari perubahan kondisi ekonomi terhadap ongkos produksi yang pada akhirnya akan berdampak pada harga retail suatu produk.

## **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## **Quarter on Quarter (qtq)**

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi triwulan tertentu terhadap posisi triwulan sebelumnya.

## **PDRB Riil**

Produk Domestik Bruto Regional yang nilainya menggunakan harga konstan. Hal ini untuk menghilangkan pengaruh inflasi dalam mengukur pertumbuhan antar waktu.

## **Seasonal event**

Kejadian yang terjadi secara musiman yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan cenderung terjadi berulang antar tahun.

## **Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *Retail Value Payment System* (RVPS) atau transaksi bernilai kecil (*retail*) yaitu transaksi di bawah Rp100 juta.

## **Survei Konsumen**

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan secara bulanan untuk mengetahui persepsi atau tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian.

## **Survei Penjualan Eceran**

Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merefleksikan pergerakan dari penjualan eceran dan dilakukan secara bulanan.

## **Uang Kartal**

Alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan dan dijamin oleh Bank Indonesia, baik berupa kertas maupun logam.

## **Volatile Foods**

Komoditas yang termasuk kelompok bahan makanan, kecuali subkelompok ikan diawetkan dan bahan makanan lainnya, yang pergerakan naik turunnya harga cukup besar (*volatile*).

## **Year on year (yoy)**

Ukuran pertumbuhan yang membandingkan posisi satu titik waktu (misal bulan atau triwulan) terhadap posisi satu titik waktu yang sama tahun sebelumnya. Perbandingan ini dilakukan untuk menghilangkan efek *seasonal* yang biasanya terjadi di titik waktu tertentu (misal bulan Ramadhan, tahun ajaran baru, dsb).





## Tim Penyusun

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Sumatera Utara**

### **Pengarah**

Soekowardojo

### **Editor**

**Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter  
Deputi Kepala Perwakilan**

Ibrahim

### **Ekonom Ahli Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Agustinus Fajar Setiawan

### **Kontributor**

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara  
Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Citra Agustina

Fatimah Hidayati

Uswatun Hasanah

Erinetta Lomoria

Juwitasari Nur Rachmawati

Ikhsan Fauzy A.

Zulfansyah

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi

Telp. 061-4150500

Fax. 061-4534760



*Halaman ini sengaja dikosongkan*



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Kelompok Perumusan KEKDA Provinsi**

Jl. Balaikota No.4, Kesawan  
Kota Medan, Sumatera Utara

Foto : Gunung Sibayak, Kabupaten Karo